

MENJAGA RESILIENSI SISTEM KEUANGAN, MEMPERKUAT MOMENTUM PERTUMBUHAN EKONOMI

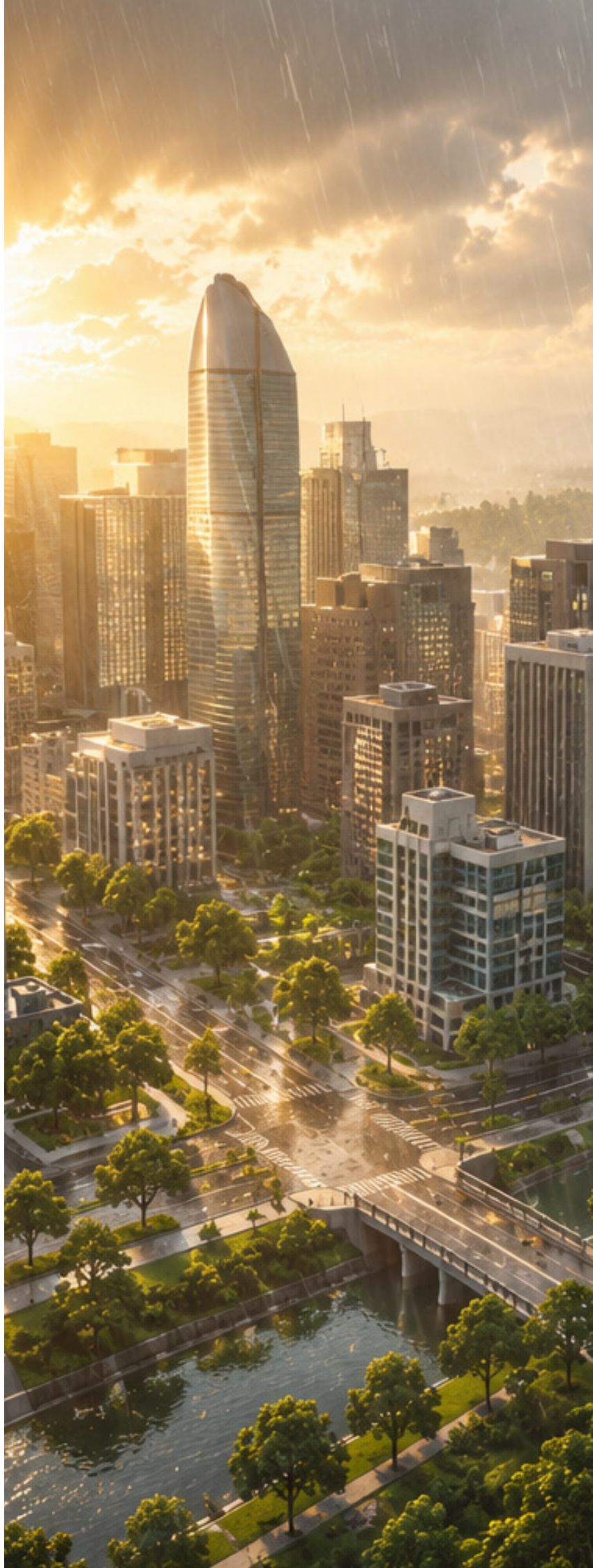
**Kajian Stabilitas Keuangan
No. 47, Agustus 2026**



Bambu yang kokoh dan lentur, melambangkan sistem keuangan Indonesia yang tetap kuat dan adaptif dalam menghadapi berbagai tekanan. Kondisi tersebut sebagaimana karakter bambu yang memiliki akar kuat namun tetap lentur pada sisi batang dalam mengikuti perubahan kondisi.

Curahan hujan menggambarkan eskalasi dinamika dan ketidakpastian yang masih mewarnai perekonomian global. Kondisi tersebut dianalogikan sebagai ragam risiko yang bersumber dari tensi geopolitik, fragmentasi perdagangan, serta volatilitas pasar keuangan global yang menjadi tantangan untuk terus dicermati.

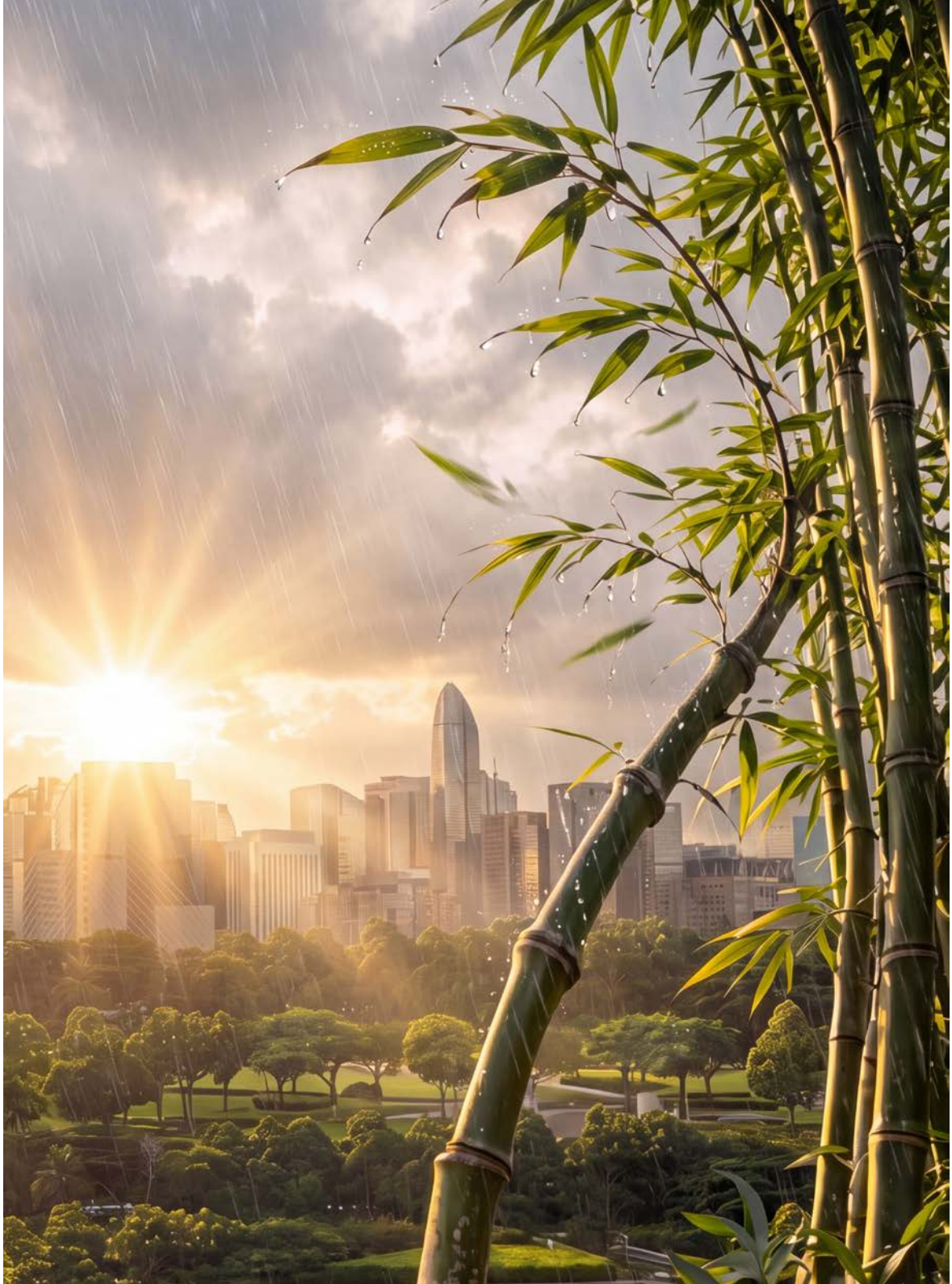
Landscape perkotaan dan pancaran sinar matahari yang menembus awan merepresentasikan optimisme dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang terus diperkuat. Kondisi tersebut menggambarkan aktivitas ekonomi dan pembangunan yang terus bergerak maju, dengan sinar matahari sebagai analogi optimisme dan peluang pertumbuhan ke depan.







BANK INDONESIA



ISSN 2620-9241
DEPARTEMEN KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL

Daftar Isi

Daftar Tabel	iv	Daftar Singkatan	viii
Daftar Gambar	iv	Prakata	xii
Daftar Grafik	v	Ringkasan Eksekutif	2

Bab 1 5

Kinerja Ekonomi Berdaya Tahan di Tengah Ketidakpastian Global

1.1	Ketidakpastian Menurunkan Kinerja dan Prospek Ekonomi Global	6
1.2	Ekonomi Nasional Tetap Tumbuh dan SSK Berdaya Tahan	7
1.3	Rambatan Dinamika Global pada SSK Indonesia Perlu Diwaspadai	9
Boks 1.1	Dinamika Geopolitik dan Implikasi Terhadap Kondisi Makrofinansial	10
Boks 1.2	Portofolio <i>Rebalancing</i> sebagai Kanal Transmisi Risiko Global terhadap SSK	11

Bab 3 27

Intermediasi Keuangan Terus Tumbuh di Tengah Dinamika Permintaan Pembiayaan

3.1	Kapasitas Perbankan Tetap Memadai dalam Mendukung Pertumbuhan Intermediasi	28
3.2	Permintaan Pembiayaan Korporasi dan Rumah Tangga Belum Menguat Secara Merata	31
3.3	Dukungan Industri Keuangan Non-Bank dan Pasar Modal untuk Pembiayaan Perekonomian	36
Boks 3.1	Strategi Alokasi Aset Perbankan dalam Mendorong Pertumbuhan Kredit	38
Boks 3.2	Diversifikasi Pendanaan Non-DPK dan Pembiayaan Nonkredit untuk Mendukung Intermediasi	39

Bab 2 13

Ketahanan Sistem Keuangan Kuat, Menjaga SSK, Mendukung Intermediasi

2.1	Kinerja Perbankan Kuat Mendukung Intermediasi	14
2.2	Ketahanan Korporasi dan Rumah Tangga Tetap Terjaga di Tengah Tekanan	18
2.3	Kondisi Pasar Keuangan dan Sektor Keuangan Nonbank Tetap Terjaga	21
Boks 2.1	Ketahanan Sistem Keuangan dalam Menghadapi Peningkatan Risiko Pasar	24
Boks 2.2	Ketahanan Likuiditas Perbankan di Tengah Segmentasi Pasar Pendanaan	25

Bab 4

41

Penguatan Keuangan Inklusif, Berkelanjutan, dan Syariah sebagai Sumber Pertumbuhan Baru

4.1	Penguatan Keuangan Inklusif	42
4.2	Penguatan Keuangan Berkelanjutan	44
4.3	Penguatan Keuangan Syariah	47
Boks 4.1	Peningkatan Pembiayaan UMKM Melalui Penguatan Kapasitas dan Digitalisasi	50
Boks 4.2	Sinergi Kebijakan untuk Memperkuat Kelayakan Pembiayaan PSEL	52

Bab 6

66

Outlook Ketahanan dan Intermediasi, serta Arah Kebijakan Makroprudensial

6.1	Ketahanan Perekonomian dan Sistem Keuangan Diprakirakan Tetap Terjaga	67
6.2	Prospek Intermediasi Tetap Positif di Tengah Dinamika Permintaan Sektoral	68
6.3	Arah Kebijakan Makroprudensial	69
Boks 6.1	Arah Penguatan Kebijakan Makroprudensial untuk Pembiayaan Sektor Prioritas dan Inklusif	70
Boks 6.2	Penguatan Kerangka Kelembagaan dan Infrastruktur Pasar Keuangan Pascaperubahan UU P2SK	71

Bab 5

54

Bauran Kebijakan Makroprudensial Terus Diperkuat untuk Mendorong Intermediasi dan Menjaga Ketahanan

5.1	Penguatan Kebijakan Makroprudensial untuk Mendukung Pertumbuhan dengan Tetap Menjaga Ketahanan Sistem Keuangan	55
5.2	Asesmen Implementasi dan Transmisi KLM <i>Forward Looking</i>	57
5.3	Sinergi Memperkuat Implementasi Kebijakan dan Ketahanan Sistem Keuangan	59
Boks 5.1	Peningkatan Fleksibilitas Pembiayaan dan Pendanaan untuk Mendorong Intermediasi Perbankan Melalui Penyempurnaan RIM, KLM, dan RPLN	61
Boks 5.2	PINISI: Wadah untuk Sinergi dan Menumbuhkan Optimisme serta <i>Debottlenecking</i> Permasalahan Pembiayaan dalam Rangka Akselerasi Percepatan Intermediasi Indonesia	63

Daftar Tabel

Bab 3

Intermediasi Keuangan Terus Tumbuh di Tengah Dinamika Permintaan Pembiayaan

Tabel 3.1.1	Rasio Likuiditas AL/DPK per Kelompok Bank	29
Tabel 3.1.2	Pertumbuhan Kredit Sektoral	30
Tabel 3.2.1	Perkembangan Penjualan, Profitabilitas dan Capex Korporasi Menurut Sektor	32
Tabel 3.2.2	Perkembangan Porsi Pembiayaan Internal dan Kredit Bank dalam Struktur Pembiayaan Korporasi	34

Bab 4

Penguatan Keuangan Inklusif, Berkelanjutan, dan Syariah Sebagai Sumber Pertumbuhan Baru

Tabel 4.1.1	Perkembangan Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi	43
--------------------	---	-----------

Daftar Gambar

Bab 2

Ketahanan Sistem Keuangan Kuat, Menjaga SSK, Mendukung Intermediasi

Gambar 2.2.1	Transmisi <i>Multiple Shocks</i> Terhadap Ketahanan Korporasi	20
---------------------	---	-----------

Bab 5

Bauran Kebijakan Makroprudensial Terus Diperkuat untuk Mendorong Intermediasi dan Menjaga Ketahanan

Gambar B5.2.1	<i>Kick Off</i> PINISI 2026	64
----------------------	-----------------------------	-----------

Daftar Grafik

Bab 1

Kinerja Ekonomi Berdaya Tahan di Tengah Ketidakpastian Global

Grafik 1.1.1	Indeks Ketidakpastian Pasar Keuangan Global	6
Grafik 1.1.2	Indeks Dolar AS	6
Grafik 1.2.1	Indeks Stabilitas Sistem Keuangan	8
Grafik B1.1.1	Harga Komoditas Energi	10
Grafik B1.1.2	Perkembangan Nilai Tukar Rupiah dan Aliran Modal Asing	10
Grafik B1.2.1	Perkembangan Top 7 Sumber Guncangan Utama SSK	11
Grafik B1.2.2	Perkembangan Kerentanan SSK Utama	11
Grafik B1.2.3	Tingkat Kepercayaan Responden	12

Bab 2

Ketahanan Sistem Keuangan Kuat, Menjaga SSK, Mendukung Intermediasi

Grafik 2.1.1	AL/DPK Berdasarkan Kelompok Bank	14
Grafik 2.1.2	AL/NCD Berdasarkan Kelompok Bank	14
Grafik 2.1.3	Perkembangan LCR dan NSFR	14
Grafik 2.1.4	Perkembangan NPL per Segmen	15
Grafik 2.1.5	Perkembangan NPL per Kelompok Bank	15
Grafik 2.1.6	Perkembangan Coverage CKPN Terhadap Risiko Kredit	15
Grafik 2.1.7	ROA, NIM, dan Spread Suku Bunga Perbankan	16
Grafik 2.1.8	Net Pendapatan Non-Bunga, OHC, dan NII	16

Grafik 2.1.9	BOPO dan CIR	16
Grafik 2.1.10	Perkembangan Rasio Permodalan	16
Grafik 2.1.11	Perbandingan CAR Negara <i>Peers</i> di <i>Emerging Market Economies</i>	17
Grafik 2.1.12	Perkembangan CAR Berdasarkan Kelompok Bank	17
Grafik 2.1.13	Perkembangan Rasio NPL dan LaR Bank Digital	17
Grafik 2.1.14	Total Kerugian Kejahatan Siber Global	18
Grafik 2.2.1	Perkembangan Kemampuan Bayar Korporasi	21
Grafik 2.2.2	Perkembangan Beban Bunga Korporasi	21
Grafik 2.2.3	Perkembangan EBIT Korporasi	19
Grafik 2.2.4	Perkembangan Likuiditas Korporasi	19
Grafik 2.2.5	Perkembangan Indikator <i>Financial Distress</i> (Altman Z-Score) Korporasi	19
Grafik 2.2.6	Jumlah Klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan	20
Grafik 2.2.7	Kenaikan UMP vs Upah Riil	20
Grafik 2.2.8	Matriks Risiko Kredit Konsumsi Rumah Tangga Berdasarkan Kelas Pendapatan	21
Grafik 2.2.9	Rasio NPL KPR Nonsubsidi	21
Grafik 2.3.1	<i>Price Return</i> dan ROA Sektoral	22
Grafik 2.3.2	Kepemilikan SBN	22
Grafik 2.3.3	Investasi Asuransi dan Dana Pensiun	23
Grafik 2.3.4	GR dan NPF	23
Grafik 2.3.5	TWP90 Pindar	23
Grafik B2.1.1	Perkembangan Rasio PDN Harian Berdasarkan Kelompok Bank	24

Grafik B2.2.1	<i>Funding Surplus/(Gap) Perbankan</i>	25
Grafik B2.2.2	Perkembangan LDR Berdasarkan Kelompok Bank	26
Grafik B2.2.3	Indeks Konsentrasi Likuiditas (Z-Score) Berdasarkan Kelompok Bank	28

Bab 3

Intermediasi Keuangan Terus Tumbuh di Tengah Dinamika Permintaan Pembiayaan

Grafik 3.1.1	Pertumbuhan DPK Berdasarkan Kelompok Bank	28
Grafik 3.1.2	Perkembangan Pendanaan Arti Luas (<i>Broad Funding</i>)	28
Grafik 3.1.3	Perkembangan BI-Rate dan Suku Bunga Kredit Baru Rupiah	29
Grafik 3.1.4	Pangsa DPK <i>Special Rate</i> Rupiah terhadap Total DPK	29
Grafik 3.1.5	Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Kelompok Bank	30
Grafik 3.1.6	ILR Sektoral	31
Grafik 3.1.7	ILR per Segmen	31
Grafik 3.2.1	Pertumbuhan Penjualan Korporasi Nonkeuangan Agregat dan Berdasarkan Orientasi Penjualan	31
Grafik 3.2.2	Pertumbuhan Penjualan Korporasi Nonkeuangan Berdasarkan Orientasi Penjualan pada Sektor Utama	32
Grafik 3.2.3	Saldo Bersih Tertimbang untuk Lapangan Usaha Pertanian dan Perdagangan	32
Grafik 3.2.4	Pertumbuhan Indeks Harga Perdagangan Besar Bahan Bangunan/Konstruksi Indonesia	33
Grafik 3.2.5	Margin Keuntungan Bersih Korporasi Berdasarkan Orientasi Penjualan	33

Grafik 3.2.6	Pertumbuhan Biaya Produksi Korporasi Berdasarkan Orientasi Penjualan	33
Grafik 3.2.7	Posisi Kas dan Pembiayaan Obligasi Korporasi	33
Grafik 3.2.8	Pertumbuhan Pembiayaan Produktif: Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja	34
Grafik 3.2.9	<i>Business Confidence Index</i> Indonesia dan <i>Global Supply Chain Pressure Index</i>	34
Grafik 3.2.10	Konsumsi Rumah Tangga Berdasarkan Kelompok Pengeluaran	35
Grafik 3.2.11	Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen	35
Grafik 3.2.12	Perkembangan Indeks Ekspektasi Penghasilan	35
Grafik 3.2.13	Andil Pertumbuhan KK Rumah Tangga Menurut Jenis Kredit	35
Grafik 3.2.14	Pertumbuhan Penjualan Rumah	36
Grafik 3.2.15	Pertumbuhan IHPR Primer	37
Grafik 3.3.1	Perkembangan Pembiayaan Nonbank	37
Grafik 3.3.2	Perkembangan Aktivitas EBUS	38
Grafik 3.3.3	Perkembangan Aktivitas Penawaran Umum	38
Grafik B3.1.1	Perkembangan Rasio Alat Likuid Terhadap Total Aset Berdasarkan Kelompok Bank	38
Grafik B3.1.2	Perkembangan Rasio Alat Likuid Terhadap Kredit Berdasarkan Kelompok Bank	38
Grafik B3.2.1	Pangsa Sumber Pendanaan Bank	39
Grafik B3.2.2	Suku Bunga Pendanaan	40
Grafik B3.2.3	Pangsa Pembiayaan Bank	40
Grafik B3.2.4	Suku Bunga Pembiayaan	40

Bab 4

Penguatan Keuangan Inklusif, Berkelanjutan, dan Syariah Sebagai Sumber Pertumbuhan Baru

Grafik 4.1.1	Perkembangan Kredit dan Kredit UMKM	42
Grafik 4.1.2	Perkembangan Kredit UMKM per Skala Usaha	42
Grafik 4.1.3	ILS Kredit UMKM	43
Grafik 4.1.4	Rasio NPL Kredit UMKM dan Kredit Non-UMKM	44
Grafik 4.1.5	Indeks Kinerja UMKM	44
Grafik 4.1.6	Indeks Kinerja UMKM per Sektor Ekonomi	44
Grafik 4.2.1	Pertumbuhan Kredit Berkelanjutan	45
Grafik 4.2.2	Rasio NPL Kredit Berkelanjutan	45
Grafik 4.3.1	Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Jenis Penggunaan	47
Grafik 4.3.2	Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Segmen Nasabah	47
Grafik 4.3.3	Pertumbuhan Pembiayaan Sektor Unggulan <i>Halal Value Chain</i>	48
Grafik 4.3.4	Pertumbuhan DPK Perbankan Syariah Berdasarkan Instrumen	48
Grafik 4.3.5	Pertumbuhan Rasio Alat Likuid BUS KBMI	49

Grafik 4.3.6	Kualitas Pembiayaan Perbankan Syariah	49
Grafik 4.3.7	Perkembangan Realisasi RIM Syariah	49
Grafik 4.3.8	Perkembangan Realisasi PLM	49
Grafik 4.3.9	Perkembangan Realisasi Insentif KLM	50
Grafik B4.1.1	Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Nasional	51

Bab 5

Bauran Kebijakan Makroprudensial Terus Diperkuat untuk Mendorong Intermediasi dan Menjaga Ketahanan

Grafik 5.2.1	Capaian Insentif KLM Sektoral	58
Grafik 5.2.2	Capaian Insentif KLM Berdasarkan Kelompok Bank	58
Grafik 5.2.3	Pertumbuhan Kredit Sektoral KLM <i>Forward Looking</i>	58
Grafik 5.2.4	Pergerakan CoF dan Insentif KLM	59
Grafik B5.1.1	Sebaran Rasio Sebelum dan Pascapenguatan RIM	62

Bab 6

Outlook Ketahanan dan Intermediasi, serta Arah Kebijakan Makroprudensial

Grafik 6.3.1	Siklus Ekonomi dan Keuangan Indonesia	69
---------------------	---------------------------------------	-----------

Daftar Singkatan

AI	<i>Artificial Intelligence</i>
AL/DPK	Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga
AL/NCD	Alat Likuid terhadap <i>Non-Core Deposit</i>
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
AS	Amerika Serikat
ATMR	Aset Tertimbang Menurut Risiko
BCBS	Basel Committee on Banking Supervision
BCI	<i>Business Confidence Index</i>
BI-FRN	Bank Indonesia <i>Floating Rate Note</i>
BOPO	Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional
BPD	Bank Pembangunan Daerah
BPI Danantara	Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara
BPS	Badan Pusat Statistik
bps	<i>basis points</i>
BUK	Bank Umum Konvensional
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BUS	Bank Umum Syariah
BUSN	Bank Umum Swasta Nasional
Capex	<i>capital expenditure</i>
CAR	<i>Capital Adequacy Ratio</i>
CCyB	<i>Countercyclical Capital Buffer</i>
CIR	<i>Cost-to-Income</i>
CKPN	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
CoF	<i>Cost of Fund</i>
Covid-19	Coronavirus Disease 2019
DaR	<i>Debt at Risk</i>
DAR	<i>Debt to Asset Ratio</i>
DENERA	PT Daya Energi Bersih Nusantara
DER	<i>Debt to Equity Ratio</i>
DHE SDA	Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam

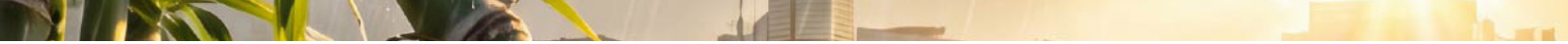
DNDF	<i>Domestic Non-Deliverable Forward</i>
DPK	Dana Pihak Ketiga
DPR-RI	Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
DSCR	<i>Debt Service Coverage Ratio</i>
DSR	<i>Debt Service Ratio</i>
EBUS	Efek Bersifat Utang/Sukuk
EMEAP	<i>Executives Meeting of East Asia-Pacific Central Banks</i>
FaR	<i>Financing at Risk</i>
FEKDI	Forum Ekonomi Keuangan Digital Indonesia
FFR	Federal Funds Rate
FSB	Financial Stability Board
GNPIP	Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan
GPIPS	Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera
GR	<i>Gearing Ratio</i>
GWM	Giro Wajib Minimum
HBKN	Hari Besar Keagamaan Nasional
HVC	<i>Halal Value Chain</i>
ICR	<i>Interest Coverage Ratio</i>
IHPR	Indeks Harga Properti Residensial
IHK	Indeks Harga Konsumen
IKNB	Industri Keuangan Non-Bank
ILR	Indeks <i>Lending Requirement</i>
ILS	Indeks <i>Lending Standard</i>
IMF	International Monetary Fund
IPO	<i>Initial Public Offering</i>
ISEF	Indonesia Sharia Economic Festival
ISSK	Indeks Stabilitas Sistem Keuangan
JDU	Jasa Dunia Usaha
KADIN	Kamar Dagang dan Industri
KBMI	Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti

KCBA	Kantor Cabang Bank Asing
KDKMP	Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
Kemenkeu	Kementerian Keuangan
KI	Kredit Investasi
KK	Kredit Konsumsi
KKB	Kredit Kendaraan Bermotor
KKI	Karya Kreatif Indonesia
KLM	Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial
KMG	Kredit Multiguna
KMK	Kredit Modal Kerja
KPMM	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum
KPR	Kredit Pemilikan Rumah
KSEI	Kustodian Sentral Efek Indonesia
KSSK	Komite Stabilitas Sistem Keuangan
KUR	Kredit Usaha Rakyat
LaR	<i>Loan at Risk</i>
LCR	<i>Liquidity Coverage Ratio</i>
LCT	<i>Local Currency Transaction</i>
LDR	<i>Loan-to-Deposit Ratio</i>
LPS	Lembaga Penjamin Simpanan
LTV/FTV	<i>Loan to Value/Financing to Value</i>
LU	Lapangan Usaha
MBG	Makan Bergizi Gratis
MBR	Masyarakat Berpenghasilan Rendah
mtm	<i>month to month</i>
NDF	<i>Non-Deliverable Forward</i>
NII	<i>Net Interest Income</i>
NIM	<i>Net Interest Margin</i>
NPF	<i>Non-Performing Financing</i>
NPI	Neraca Pembayaran Indonesia
NPL	<i>Non-Performing Loan</i>
NPM	<i>Net Profit Margin</i>
NSFR	<i>Net Stable Funding Ratio</i>
OHC	<i>overhead cost</i>

OJK	Otoritas Jasa Keuangan
OM	Operasi Moneter
PADG	Peraturan Anggota Dewan Gubernur
PBI	Peraturan Bank Indonesia
PDB	Produk Domestik Bruto
PDN	Posisi Devisa Neto
PLN	Perusahaan Listrik Negara
PSN	Proyek Strategis Nasional
Perpres	Peraturan Presiden
PIDI	Pusat Inovasi Digital Indonesia
pindar	pinjaman daring
PINISI	Percepatan Intermediasi Indonesia
PKPN	Program Kerja Prioritas Nasional
PLM	Penyangga Likuiditas Makroprudensial
PMK	Protokol Manajemen Krisis
PMKT	Protokol Manajemen Krisis Terintegrasi
POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
PP	Perusahaan Pembiayaan
PSEL	Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik
PYD	Pembiayaan yang Disalurkan
QRIS	<i>Quick Response Code Indonesian Standard</i>
repo	<i>repurchase agreement</i>
RBC	<i>Risk-Based Capital</i>
RIM	Rasio Intermediasi Makroprudensial
ROA	<i>Return on Asset</i>
ROE	<i>Return on Equity</i>
RPIM	Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial
RPLN	Rasio Pendanaan Luar Negeri
RT	Rumah Tangga
SBDK	Suku Bunga Dasar Kredit
SBI	Sertifikat Bank Indonesia
SBIS	Sertifikat Bank Indonesia Syariah

SBN	Surat Berharga Negara
SDBI	Sertifikat Deposito Bank Indonesia
SIAPIK	Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan
Simtiknas	Simulasi Tematik Nasional
SKI	Siklus Keuangan Indonesia
SRBI	Sekuritas Rupiah Bank Indonesia
SRIA	<i>Sharia Restricted Investment Account</i>
SRS	Survei Risiko Sistemik
SSB	Surat-Surat Berharga
SukBI	Sukuk Bank Indonesia
SVBI	Sertifikat Valuta Asing Bank Indonesia
SSK	Stabilitas Sistem Keuangan
SUVBI	Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia
TK	Tenaga Kerja
TPID	Tim Pengendali Inflasi Daerah
TPIP	Tim Pengendali Inflasi Pusat
TWP90	Tingkat Wanprestasi atau kelalaian penyelesaian kewajiban yang tertera dalam perjanjian pendanaan di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo

UL	<i>Undisbursed Loan</i>
ULN	Utang Luar Negeri
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UMP	Upah Minimum Provinsi
UU	Undang-Undang
UU P2SK	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
UUS	Unit Usaha Syariah
Valas	valuta asing
WC-ABIF	<i>ASEAN Working Committee on the ASEAN Banking Integration Framework</i>
WTE	<i>Waste-to-Energy</i>
yoy	<i>year on year</i>
ytd	<i>year to date</i>



Halaman ini sengaja dikosongkan.

Prakata



Destry Damayanti
Pejabat Gubernur Sementara

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa, Kajian Stabilitas Keuangan No. 47, Agustus 2026 dengan tema **“Menjaga Resiliensi Sistem Keuangan, Memperkuat Momentum Pertumbuhan Ekonomi”** dapat diterbitkan. Kajian ini merupakan bagian strategis dari komunikasi kebijakan Bank Indonesia yang menyajikan perkembangan, potret terkini, dan prospek stabilitas sistem keuangan Indonesia. Kajian ini mengacu pada evaluasi asesmen tiga pilar utama kebijakan makroprudensial meliputi ketahanan sistem keuangan, intermediasi, serta inklusi keuangan dan hijau. Ketiga pilar makroprudensial tersebut ditujukan untuk menjaga ketahanan stabilitas sistem keuangan nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Semester I 2026 diwarnai oleh meningkatnya ketidakpastian global akibat eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang menekan prospek pertumbuhan serta meningkatkan tekanan inflasi dan volatilitas pasar keuangan. Di tengah kondisi tersebut, perekonomian Indonesia tetap berdaya tahan, didukung oleh permintaan domestik dan ketahanan eksternal yang tetap terjaga. Stabilitas Sistem Keuangan tetap terjaga, ditopang oleh ketahanan perbankan dan korporasi serta kondisi pasar keuangan dan sektor keuangan nonbank yang secara umum resilien, meskipun perkembangan risiko pada sebagian bank, korporasi, dan segmen rumah tangga tetap menjadi perhatian.

Ketahanan tersebut memberikan ruang bagi intermediasi untuk terus mendukung aktivitas ekonomi. Kredit perbankan menguat, terutama ditopang oleh Kredit Investasi, dengan kapasitas pendanaan yang tetap memadai, walaupun permintaan pembiayaan belum meningkat secara merata. Pembiayaan nonbank dan pasar modal turut melengkapi sumber pembiayaan perekonomian, sementara perluasan basis pembiayaan inklusif, berkelanjutan, dan syariah terus diperkuat untuk mendukung sumber pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.

Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan melalui kebijakan moneter yang *pro-stability* serta kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran yang *pro-growth*, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Penguatan transmisi kebijakan juga didukung oleh program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) untuk memperkuat informasi dan keyakinan pelaku ekonomi, meningkatkan kesiapan pelaku ekonomi, dan mempertemukan kebutuhan sektor riil dengan sumber pendanaan. Ke depan, ketahanan stabilitas sistem keuangan diperkirakan tetap terjaga dan ruang pertumbuhan intermediasi tetap terbuka. Kebijakan makroprudensial akan terus diarahkan secara terukur dan pruden untuk

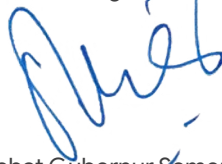
mendukung pertumbuhan kredit/pembiayaan pada kisaran 8–12%, diperkuat oleh sinergi kebijakan dengan Pemerintah, Komite Stabilitas Sistem Keuangan, serta Industri, dan penguatan kerangka kelembagaan Bank Indonesia pascaperubahan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan di tahun 2026.

KSK No.47 hadir sebagai persembahan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Buku ini memberikan wawasan mengenai perkembangan, risiko, dan prospek sistem keuangan Indonesia yang dapat dijadikan acuan strategis ke depan bagi pemangku kepentingan, pelaku industri, akademisi, maupun masyarakat dalam memahami perkembangan sistem keuangan dan arah kebijakan dalam menjaga stabilitas serta memperkuat intermediasi. Kajian ini mempertegas optimisme bahwa perekonomian Indonesia tetap

solid dan adaptif dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Ketahanan sistem keuangan yang tetap terjaga, didukung oleh bauran kebijakan yang konsisten dan sinergi erat antarpemangku kepentingan, memberikan landasan untuk terus memperkuat kontribusi sektor keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas. Dengan menjaga resiliensi sistem keuangan sekaligus memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi, kami meyakini sistem keuangan Indonesia akan terus mampu mendukung perekonomian nasional dalam menghadapi dinamika dan tantangan ke depan.

Dengan ini, kami optimis bahwa ketahanan ekonomi dan sistem keuangan Indonesia tetap solid karena *“melalui sinergi kebijakan yang erat, kita mampu menjaga stabilitas sekaligus mendorong perekonomian agar tumbuh lebih tinggi”*.

Jakarta, Agustus 2026



Pejabat Gubernur Sementara

Destry Damayanti

RINGKASAN EKSEKUTIF



Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) Indonesia pada semester I 2026 tetap terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian global, sekaligus memberikan ruang intermediasi untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut tecermin dari Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK) yang tetap berada pada zona Normal, ditopang oleh likuiditas dan permodalan perbankan yang memadai serta risiko kredit yang tetap rendah. Ketahanan korporasi dan rumah tangga secara agregat tetap terjaga, meski disertai kerentanan pada sebagian korporasi dan segmen rumah tangga, sementara kondisi pasar keuangan dan sektor keuangan nonbank secara umum tetap resilien di tengah meningkatnya risiko pasar. Di tengah ketahanan tersebut, intermediasi perbankan menguat dengan kapasitas pendanaan yang tetap memadai, meskipun permintaan pembiayaan belum merata. Bauran kebijakan Bank Indonesia terus diarahkan untuk menjaga stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan melalui kebijakan moneter yang *pro-stability*, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran yang *pro-growth*, serta penguatan sinergi dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Ketidakpastian global meningkat akibat eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah, tetapi perekonomian Indonesia tetap berdaya tahan ditopang oleh permintaan domestik dan ketahanan eksternal yang terjaga. Konflik di Timur Tengah mengganggu produksi, distribusi, dan rantai pasok global serta mendorong harga minyak mentah Brent hingga mencapai 144,46 dolar Amerika Serikat (AS) per barel pada 7 April 2026 sebelum turun ke 71,52 dolar AS per barel pada akhir Juni 2026. Ketidakpastian ini menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan prospek inflasi global. Respons kebijakan moneter global yang cenderung ketat dan meningkatnya preferensi terhadap aset aman meningkatkan tekanan pada nilai tukar dan pasar keuangan negara berkembang. Di tengah situasi tersebut, ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan dan tumbuh 5,29% (yoy) pada triwulan II 2026 setelah tumbuh 5,61% (yoy) pada triwulan I 2026, didukung oleh konsumsi rumah tangga, konsumsi Pemerintah, dan investasi sementara inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) berada dalam kisaran sasaran $2,5 \pm 1\%$. Cadangan devisa pada akhir Juni 2026 tetap memadai sebesar 145,6 miliar dolar AS sementara aliran modal portofolio asing kembali mencatat aliran masuk neto pada triwulan II 2026, setelah mengalami aliran keluar neto pada triwulan

sebelumnya. Peningkatan ketidakpastian global dan tingginya permintaan valas domestik turut menekan Rupiah, yang melemah dari Rp16.777 per dolar AS pada akhir Desember 2025 menjadi Rp17.880 per dolar AS pada akhir Juni 2026.

Ketahanan sistem keuangan tetap kuat, meskipun heterogenitas risiko pada sebagian bank, korporasi, rumah tangga, dan sektor keuangan nonbank tetap perlu dicermati. Likuiditas perbankan tetap memadai dengan rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 23,08% pada Juni 2026, walaupun dinamika pendanaan dan segmentasi likuiditas antarbank meningkat sejalan dengan penguatan intermediasi. Risiko kredit tetap rendah dengan *Non-Performing Loan* (NPL) bruto sebesar 2,09%, sementara permodalan tetap kuat dengan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sebesar 23,70%. Ketahanan korporasi secara agregat juga terjaga dengan *Interest Coverage Ratio* (ICR) sebesar 2,70 kali pada triwulan I 2026, meskipun peningkatan porsi aset korporasi dalam kategori *distress* menunjukkan adanya kerentanan pada sebagian korporasi. Pada rumah tangga, tekanan pasar tenaga kerja dan perlambatan upah riil memengaruhi kemampuan bayar kelompok menengah bawah, terutama pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR) nonsubsidi. Sementara itu, koreksi pasar saham dan kenaikan risiko pasar masih dapat diimbangi oleh fundamental emiten dan *buffer* permodalan sektor keuangan nonbank yang secara umum memadai.

Intermediasi sistem keuangan menguat, ditopang oleh kapasitas pendanaan perbankan yang tetap memadai dan akselerasi kredit investasi, meskipun permintaan pembiayaan korporasi dan rumah tangga belum menguat secara merata. Kredit perbankan tumbuh 12,67% (yoy) pada Juni 2026, terutama didorong oleh Kredit Investasi yang tumbuh 24,90% (yoy) dan memberikan kontribusi 55,25% terhadap pertumbuhan kredit agregat, sementara Kredit Modal Kerja membaik menjadi 8,94% (yoy). Kapasitas pembiayaan tetap ditopang oleh pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 10,21% (yoy), diversifikasi *funding mix*, dan pendanaan non-DPK. Di sisi lain, korporasi masih mengandalkan dana internal dan tetap berhati-hati melakukan ekspansi, sementara tekanan daya beli kelompok menengah bawah turut menahan pertumbuhan kredit konsumsi. Pembiayaan nonbank tetap tumbuh positif dengan perkembangan bervariasi, terutama ditopang oleh pegadaian dan pinjaman daring, sementara perusahaan pembiayaan tumbuh lebih

moderat. Di sisi lain, penghimpunan dana berbasis pasar modal tetap berlanjut meskipun lebih terbatas di tengah meningkatnya biaya pendanaan dan volatilitas pasar keuangan.

Penguatan keuangan inklusif, berkelanjutan, dan syariah terus diarahkan untuk memperluas basis dan kanal pembiayaan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.

Pada pembiayaan inklusif, besarnya peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menyumbang sekitar 61% PDB belum sepenuhnya tecermin pada pangsa kredit yang baru mencapai 16,73%. Pemulihan kredit UMKM juga belum merata dan masih menghadapi hambatan asimetri informasi, kapasitas usaha, serta keterhubungan dengan rantai pasok. Dalam hal ini, penguatan kapasitas, digitalisasi transaksi dan pencatatan keuangan, serta fasilitasi akses pembiayaan menjadi penting untuk meningkatkan kesiapan pembiayaan. Pada pembiayaan berkelanjutan, intermediasi terus berkembang melalui Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dan KPR berwawasan lingkungan serta proyek pengelolaan sampah dan limbah, sementara pengembangan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) menunjukkan pentingnya kesiapan proyek dan pembagian risiko dalam memperkuat *bankability*. Pasar karbon berpotensi memperkuat kelayakan proyek transisi melalui potensi tambahan pendapatan, tetapi tidak menggantikan sumber pendapatan utama yang menjadi fondasi kelayakan pembiayaan proyek. Sementara itu, pembiayaan syariah memiliki ruang untuk semakin mendukung pertumbuhan melalui keterkaitannya dengan *Halal Value Chain* (HVC), dengan Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) perbankan syariah tumbuh 11,43% (yoy) pada Juni 2026 di tengah kapasitas intermediasi dan kualitas pembiayaan yang tetap memadai.

Di tengah kebijakan moneter yang *pro-stability*, Bank Indonesia memperkuat kebijakan makroprudensial yang *pro-growth* untuk mendukung intermediasi dengan tetap menjaga ketahanan SSK. Penguatan kebijakan ditempuh melalui implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) *Forward Looking*, reformulasi Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), peningkatan batas Rasio Pendanaan Luar Negeri (RPLN), serta optimalisasi Penyangga Likuiditas

Makroprudensial (PLM) yang secara bersama-sama meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas, pembiayaan, dan pendanaan perbankan. Lebih lanjut, Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) diperkuat melalui perluasan modalitas pembiayaan inklusif berbasis ekosistem dan kerja sama antarbank. Untuk memperkuat transmisi kebijakan, Bank Indonesia menginisiasi program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) sebagai wadah sinergi untuk memperkuat informasi dan keyakinan pelaku ekonomi, meningkatkan kesiapan pembiayaan, serta mempertemukan kebutuhan sektor riil dengan sumber pembiayaan. Penguatan intermediasi tersebut diimbangi dengan penyempurnaan Protokol Manajemen Krisis Terintegrasi (PMKT) serta sinergi dengan Pemerintah, KSSK, industri, dan mitra strategis untuk meningkatkan kesiapan dan ketahanan sistem keuangan.

Ketahanan SSK pada 2026 diperkirakan terjaga dengan ruang intermediasi yang terbuka, sementara kebijakan makroprudensial tetap diarahkan *pro-growth* dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh dalam kisaran 4,9–5,7% dengan inflasi tetap berada dalam rentang sasaran $2,5 \pm 1\%$, sementara ketahanan perbankan diperkirakan tetap kuat dengan likuiditas dan permodalan yang memadai serta risiko kredit yang tetap terkendali. *Credit gap* yang masih negatif pada mayoritas sektor menjadi salah satu indikasi masih tersedianya ruang ekspansi kredit. Dari sisi permintaan, prospek penjualan dan belanja modal korporasi yang tetap positif membuka peluang peningkatan kebutuhan pembiayaan. Dengan kondisi tersebut, kebijakan makroprudensial tetap diarahkan *pro-growth* untuk mendukung pertumbuhan kredit/pembiayaan pada kisaran 8–12% melalui penguatan berbagai instrumen kebijakan, termasuk PINISI yang melengkapi dukungan kebijakan makroprudensial dari sisi permintaan. Arah kebijakan tersebut sejalan dengan penguatan kerangka kelembagaan Bank Indonesia pascaperubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mempertegas landasan dalam melaksanakan kebijakan dan bauran kebijakan yang menciptakan lingkungan ekonomi kondusif bagi pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja, dengan tetap menjaga SSK.

Bab 1

KINERJA EKONOMI BERDAYA TAHAN DI TENGAH KETIDAKPASTIAN GLOBAL

Ketidakpastian global meningkat pada semester I 2026 akibat eskalasi konflik geopolitik Timur Tengah. Konflik yang berlangsung sejak akhir Februari 2026 dan penutupan Selat Hormuz, mengganggu produksi, distribusi, dan rantai pasok perdagangan global serta mendorong lonjakan harga minyak mentah Brent hingga sempat mencapai 144,46 dolar Amerika Serikat (AS) per barel. Perkembangan tersebut menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi dunia 2026 menjadi 3,0% dan meningkatkan tekanan inflasi global. Hal ini mendorong sebagian bank sentral memperketat kebijakan, sementara imbal hasil US Treasury yang tetap tinggi, dolar AS yang kuat, dan meningkatnya preferensi terhadap aset aman membatasi aliran modal ke negara berkembang.

Perekonomian Indonesia tetap berdaya tahan di tengah meningkatnya tekanan eksternal didukung oleh permintaan domestik, sementara Stabilitas Sistem Keuangan (SSK) tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,29% (yoy) pada triwulan II 2026, terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga, konsumsi Pemerintah, dan investasi. Ketahanan eksternal tetap didukung oleh kembalinya aliran masuk modal asing dan cadangan devisa sebesar 145,6 miliar dolar AS yang berada di atas standar kecukupan internasional, sementara inflasi

tetap berada dalam kisaran sasaran. SSK tetap terjaga didukung oleh permodalan dan likuiditas perbankan yang memadai serta risiko kredit yang rendah, sehingga memberikan ruang bagi intermediasi untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi.

Rambatan tekanan global terhadap SSK melalui sektor riil, pasar keuangan, dan pembiayaan domestik tetap perlu dicermati, meskipun dampaknya diperkirakan tetap terkendali. Kenaikan harga energi, biaya logistik, dan input impor berpotensi menekan margin korporasi dan daya beli rumah tangga yang selanjutnya dapat memengaruhi kebutuhan pembiayaan dan kemampuan bayar debitur. Pada saat yang sama, meningkatnya aversi risiko mendorong penyesuaian portofolio investor global menuju aset yang lebih aman sehingga berpotensi meningkatkan volatilitas nilai tukar dan harga aset, menurunkan likuiditas pasar, serta premi risiko dan biaya pendanaan domestik. Namun demikian, permodalan dan likuiditas perbankan yang memadai, pengelolaan risiko pasar, diversifikasi sumber pendanaan, penguatan basis investor domestik, serta pendalaman pasar keuangan yang dilakukan secara bersinergi dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menjadi bantalan utama dalam menjaga SSK.

1.1 Ketidakpastian Menurunkan Kinerja dan Prospek Ekonomi Global

Eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah memperburuk kondisi dan prospek perekonomian global. Konflik yang berlangsung sejak akhir Februari 2026 dan diikuti penutupan Selat Hormuz mengganggu produksi dan distribusi global serta mendorong lonjakan harga komoditas energi. Harga minyak mentah Brent sempat mencapai 144,46 dolar AS per barel pada 7 April 2026 sebelum menurun menjadi 71,52 dolar AS per barel pada akhir Juni 2026. Perkembangan tersebut menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi dunia 2026 menjadi 3,0% dari 3,3% pada 2025 dan meningkatkan prospek inflasi global menjadi 4,5%. Mekanisme transmisi guncangan geopolitik melalui jalur komoditas, perdagangan, dan finansial dibahas lebih lanjut pada Boks 1.1.

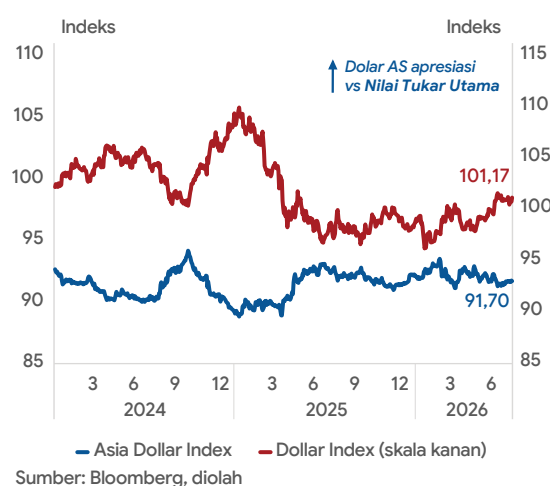
Ketidakpastian pasar keuangan global tetap tinggi, disertai dolar AS yang tetap kuat. Hal ini tecermin pada kenaikan indeks ketidakpastian pasar keuangan global yang mencapai 1,96 pada Maret 2026 dan tetap bertahan di level yang tinggi sampai dengan Juni 2026 sebesar 1,20 (Grafik 1.1.1).

Sementara itu, sejumlah bank sentral mulai menaikkan suku bunga kebijakannya untuk merespons kenaikan tekanan inflasi. Bank of Japan



Grafik 1.1.1. Indeks Ketidakpastian Pasar Keuangan Global

dan European Central Bank menaikkan suku bunga kebijakannya masing-masing sebesar 25 bps pada Juni 2026. Di sisi lain, suku bunga kebijakan moneter AS, Fed Funds Rate (FFR) selama Januari hingga Juni 2026 dipertahankan pada level 3,50–3,75% dan ke depan terdapat kemungkinan akan naik seiring dengan prospek inflasi AS yang lebih tinggi. Imbal hasil (*yield*) US Treasury tetap tinggi mencapai 4,47% (tenor 10 tahun) dan 4,17% (tenor 2 tahun) pada 30 Juni 2026 didorong oleh defisit fiskal yang membesar. Sejalan dengan perkembangan tersebut, preferensi penempatan investor global ke negara *emerging markets* terbatas dan beralih ke aset aman di negara maju. Perkembangan tersebut juga mendorong tetap kuatnya indeks dolar AS terhadap negara maju (DXY) dan negara berkembang (ADXY), yang masing-masing berada pada level 101,17 dan 91,70 pada 21 Juli 2026 (Grafik 1.1.2.). Memburuknya perekonomian dan pasar keuangan global tersebut terus menekan mata uang negara *emerging markets* dan mempersulit pengelolaan perekonomiannya, sehingga dilakukan penguatan respons dan sinergi kebijakan fiskal serta moneter guna memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.



Grafik 1.1.2. Indeks Dolar AS

1.2

Ekonomi Nasional Tetap Tumbuh dan SSK Berdaya Tahan

Di tengah tingginya ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap baik didukung oleh permintaan domestik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 5,29% (yoy), setelah pada triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 5,61% (yoy) ditopang oleh aktivitas ekonomi domestik. Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,06% (yoy) seiring dengan momentum libur sekolah dan berbagai Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Konsumsi Pemerintah tumbuh sebesar 15,97% (yoy) bersumber dari peningkatan realisasi belanja pegawai termasuk pembayaran gaji ke-13, serta belanja barang dan jasa terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Investasi tumbuh sebesar 6,87% terutama didorong oleh pertumbuhan subkomponen kendaraan serta investasi Pemerintah dan swasta sejalan dengan meningkatnya realisasi penanaman modal. Dari eksternal, ekspor tumbuh sebesar 4,13% (yoy) ditopang oleh permintaan mitra dagang utama, dan perlu terus didorong guna memanfaatkan tingginya harga komoditas dunia, di tengah melambatnya prospek pertumbuhan ekonomi global. Ke depan, berbagai program stimulus Pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat permintaan domestik akan terus dioptimalkan, sejalan dengan penguatan bauran kebijakan Bank Indonesia untuk memperkuat stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Ketahanan eksternal tetap terjaga di tengah tingginya ketidakpastian global. Neraca perdagangan Indonesia periode Januari-Juni 2026 secara kumulatif mencatat surplus sebesar 3,58 miliar dolar AS, dengan perkembangan pada Juni 2026 mencatat defisit sebesar 0,45 miliar dolar AS dipengaruhi oleh defisit neraca perdagangan migas di tengah neraca perdagangan nonmigas yang tetap mencatat surplus. Pada transaksi modal dan finansial, portofolio asing berbalik dari aliran keluar neto sebesar 0,8 miliar dolar AS pada triwulan I 2026 menjadi aliran masuk neto sebesar 8,5 miliar dolar AS pada triwulan II 2026. Perkembangan tersebut berlangsung di tengah penguatan respons kebijakan moneter Bank Indonesia dan meningkatnya imbal hasil instrumen keuangan domestik, terutama Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Berharga

Negara (SBN). Posisi cadangan devisa pada akhir Juni 2026 tetap kuat, tercatat sebesar 145,6 miliar dolar AS atau setara dengan pembiayaan 5,5 bulan impor atau 5,4 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Nilai tukar Rupiah menguat ke Rp17.880 per dolar AS pada 30 Juni 2026 setelah sebelumnya sempat tertekan hingga Rp18.175 per dolar AS pada 8 Juni 2026.

Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) tetap terjaga di tengah meningkatnya dampak gejolak global terhadap perkembangan harga-harga domestik. Inflasi IHK pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,34% (yoy). Perkembangan ini dipengaruhi oleh inflasi kelompok inti yang tetap terkendali sebesar 2,76% (yoy) didukung oleh konsistensi kebijakan Bank Indonesia (BI-Rate) dalam menjaga inflasi. Inflasi kelompok *administered prices* tercatat sebesar 3,42% (yoy) dipengaruhi oleh penyesuaian harga bahan bakar minyak nonsubsidi dan avtur akibat tingginya harga energi global. Inflasi kelompok *volatile food* tercatat sebesar 5,58% (yoy) seiring dengan penurunan produksi beberapa komoditas pangan di daerah sentra, kenaikan biaya transportasi, serta berakhirnya panen raya. Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) melalui penguatan implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS), termasuk untuk mengantisipasi risiko gangguan cuaca (*El Nino*) terhadap harga pangan.

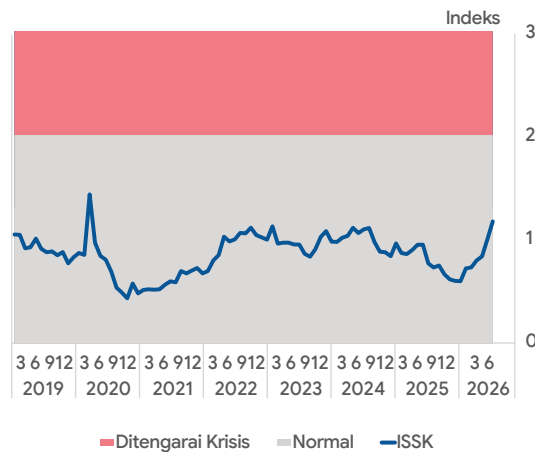
Di tengah kebijakan moneter yang diarahkan *pro-stability*, kebijakan makroprudensial tetap diarahkan *pro-growth* untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan intermediasi dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kredit/pembiayaan ke sektor riil dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Pertumbuhan kredit perbankan tetap kuat sebesar 12,67% (yoy) pada Juni 2026, lebih tinggi bila dibandingkan dengan Mei 2026 sebesar 11,51% (yoy). Berdasarkan kelompok penggunaan, perkembangan ini didukung oleh Kredit Investasi yang tumbuh signifikan sebesar 24,90%

(yoy), sejalan dengan realisasi penyaluran kredit pada program prioritas Pemerintah, termasuk hilirisasi sumber daya alam. Sementara itu, kredit UMKM tumbuh terbatas sebesar 1,05% (yoy), sehingga penguatan pembiayaan UMKM tetap perlu didorong. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia terus mendukung pembiayaan sektor prioritas dan UMKM melalui Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM), termasuk pada sektor Pertanian, Industri, Hilirisasi, Konstruksi, dan Perumahan.

Ketahanan perbankan tetap kuat di tengah risiko rambatan konflik geopolitik di Timur Tengah.

Perkembangan ini ditandai dengan likuiditas perbankan yang memadai, kapasitas permodalan yang terjaga pada level tinggi, dan risiko kredit yang terjaga rendah. Rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) perbankan pada Juni 2026 tercatat tinggi sebesar 23,70%, yang tergolong kuat dalam menyerap risiko dan mendukung pertumbuhan kredit. Rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL*) secara agregat (bruto) tetap rendah sebesar 2,09% pada Juni 2026. Perubahan harga pasar surat berharga berpotensi menimbulkan kerugian *mark-to-market* pada perbankan. Hasil *stress test* Bank Indonesia menunjukkan ketahanan perbankan tetap kuat dalam menghadapi berbagai risiko, termasuk dampak rambatan berlanjutnya perang di Timur Tengah dan potensi kerugian dari risiko pasar, ditopang oleh kemampuan bayar dan profitabilitas korporasi yang tetap terjaga baik.

Secara keseluruhan hasil asesmen Bank Indonesia menunjukkan SSK pada semester I 2026 tetap terjaga. Kondisi ini tecermin dari Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK) yang tetap berada pada zona Normal (Grafik 1.2.1). Pertumbuhan ekonomi yang solid, ketahanan eksternal yang terjaga, dan inflasi yang terkendali turut mendukung kinerja intermediasi perbankan yang tetap kuat. Pada saat yang sama, kondisi perbankan tetap resilien, tecermin



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 1.2.1. Indeks Stabilitas Sistem Keuangan

dari likuiditas yang memadai, permodalan yang tinggi, dan risiko kredit yang rendah, serta didukung oleh kemampuan bayar dan profitabilitas korporasi yang tetap baik.

Ketahanan sistem keuangan yang tetap kuat memberikan ruang untuk terus meningkatkan intermediasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia memprakirakan pertumbuhan kredit 2026 tetap terjaga pada kisaran 8-12%. Prospek ini didukung oleh ruang peningkatan penyaluran kredit yang masih besar, tecermin dari pertumbuhan kredit yang masih berada di bawah tingkat optimalnya, masih tingginya fasilitas pinjaman yang belum digunakan (*undisbursed loan*) sebesar Rp2.490 triliun atau 21,52% dari plafon kredit yang tersedia, masih memadainya kapasitas pembiayaan bank yang tecermin pada rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) sebesar 23,08%, serta DPK yang masih tumbuh tinggi sebesar 10,21% (yoy) pada Juni 2026. Ke depan, Bank Indonesia akan terus mempertahankan kebijakan makroprudensial akomodatif untuk mendukung pertumbuhan kredit 2026 dengan tetap menjaga SSK.

1.3

Rambatan Dinamika Global pada SSK Indonesia Perlu Diwaspadai

Meningkatnya ketegangan geopolitik global mendorong kenaikan harga energi yang berpotensi menekan aktivitas ekonomi melalui berbagai saluran transmisi. Lonjakan harga minyak meningkatkan biaya produksi, transportasi, logistik, serta harga input impor, terutama pada sektor-sektor yang memiliki intensitas penggunaan energi dan kandungan impor (*import content*) yang tinggi. Gangguan rantai pasok global turut membatasi ketersediaan bahan baku dan komponen produksi, sehingga memperbesar tekanan biaya produksi dan memperlambat aktivitas pada sektor berorientasi ekspor maupun industri yang bergantung pada bahan baku impor. Dampak rambatan terhadap perekonomian domestik mulai tecermin pada meningkatnya tekanan inflasi, khususnya kelompok inflasi *administered prices* yang meningkat dari 0,17% (ytd) pada Januari 2026 menjadi 2,91% (ytd) pada Juni 2026.

Transmisi tekanan global ke sektor riil berpotensi menekan kinerja korporasi, terutama pada sektor dengan intensitas energi dan kandungan impor yang tinggi, serta daya beli rumah tangga. Kenaikan biaya energi, transportasi, dan bahan

baku impor dapat meningkatkan biaya operasional serta menekan margin dan arus kas korporasi ketika ruang penyesuaian harga jual terbatas. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan kehati-hatian korporasi dalam melakukan ekspansi dan perbankan ketika menyalurkan pembiayaan. Pada saat yang sama, tekanan terhadap daya beli rumah tangga, terutama kelompok pendapatan menengah bawah, dapat memengaruhi permintaan pembiayaan dan kemampuan bayar.

Selain melalui sektor riil, tekanan global juga dapat ditransmisikan melalui pasar keuangan domestik.

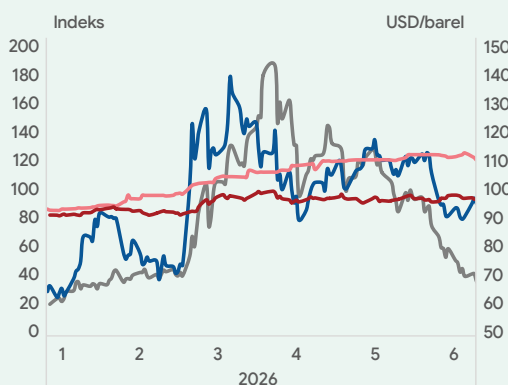
Pergeseran preferensi investor global menuju aset yang lebih aman dapat meningkatkan volatilitas nilai tukar, SBN, dan saham serta mengurangi likuiditas pasar, yang selanjutnya berpotensi memperketat kondisi pembiayaan domestik. Mekanisme *portfolio rebalancing* dan transmisinya terhadap SSK dibahas lebih lanjut pada Boks 1.2, sementara dampaknya terhadap ketahanan perbankan diuraikan lebih mendalam pada Bab II.

Boks 1.1 | Dinamika Geopolitik dan Implikasi Terhadap Kondisi Makrofinansial

Eskalasi konflik geopolitik antara AS dan Iran memperburuk prospek perekonomian serta meningkatkan ketidakpastian global.

Konflik tersebut ditransmisikan ke perekonomian global melalui jalur harga komoditas dunia, jalur perdagangan, dan jalur finansial. Pada jalur harga komoditas, penutupan Selat Hormuz mendorong lonjakan harga minyak dan komoditas energi (Grafik B1.1.1). Pada jalur perdagangan, terjadi gangguan distribusi yang meningkatkan biaya logistik. Pada jalur finansial, meningkatnya risiko global mendorong pergeseran aliran modal global ke aset keuangan negara maju serta menguatnya dolar AS. Di dalam negeri, rambatan ketiga jalur transmisi tersebut antara lain tecermin pada dinamika neraca perdagangan, aliran modal portofolio, dan nilai tukar Rupiah, sebagaimana diuraikan pada subbab 1.2.

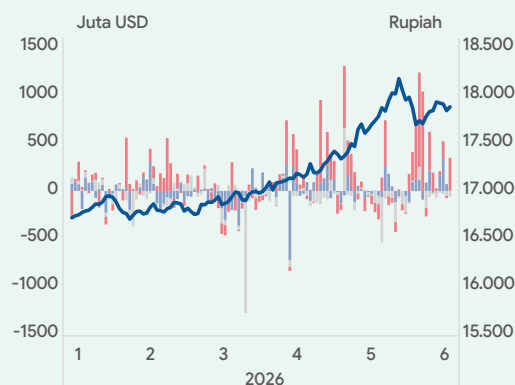
Merespons tekanan tersebut, Bank Indonesia menempuh bauran kebijakan yang bersifat saling melengkapi: kebijakan moneter difokuskan untuk menjaga stabilitas



— Minyak - Brent (skala kanan) — LNG — Batubara — Palm Oil
Sumber: Bloomberg, diolah

Grafik B1.1.1. Harga Komoditas Energi

eksternal (*pro-stability*), sementara kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran tetap diarahkan mendorong pertumbuhan (*pro-growth*). Dari sisi stabilitas, Bank Indonesia menaikkan BI-Rate sebesar total 100 bps sejak Mei hingga Juni 2026, memperkuat intervensi valuta asing (valas), dan memperdalam pasar uang dan valas, termasuk pengembangan *framework* PUVA Renminbi, pengecualian transaksi NDF bagi Dealer Utama PUVA, dan penyesuaian batas pembelian valas tanpa *underlying* menjadi USD10.000 per bulan sejak Juli 2026. Penguatan respons kebijakan tersebut turut mendukung stabilisasi nilai tukar Rupiah ke Rp17.880 pada akhir triwulan II 2026, di tengah cadangan devisa yang tetap berada di atas standar kecukupan internasional (Grafik B1.1.2). Sementara itu, kebijakan makroprudensial yang akomodatif dan sinergi dengan Pemerintah serta KSSK tetap diarahkan untuk mendukung pertumbuhan kredit perbankan dan pembiayaan sektor riil, sebagaimana diuraikan lebih rinci pada Bab V.



■ SBN ■ Saham ■ SRBI ■ Nilai Tukar Rupiah (skala kanan)
Sumber: Bank Indonesia dan Reuters, diolah

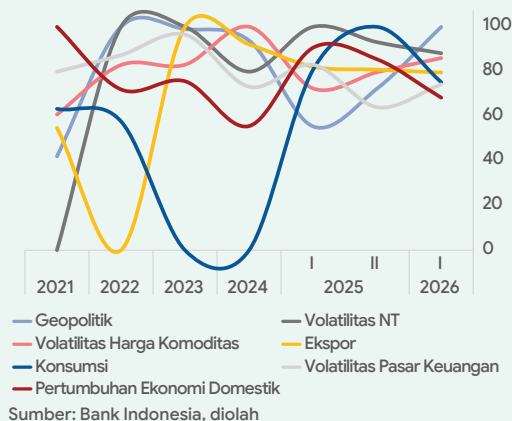
Grafik B1.1.2. Perkembangan Nilai Tukar Rupiah dan Aliran Modal Asing

Boks 1.2 | Portofolio *Rebalancing* sebagai Kanal Transmisi Risiko Global terhadap SSK

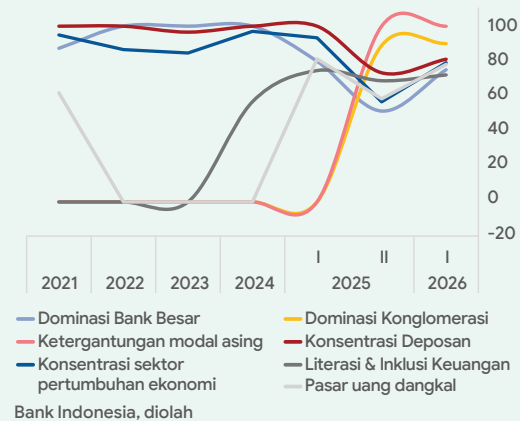
Peningkatan ketidakpastian global dapat mendorong investor melakukan penyesuaian portofolio menuju aset yang lebih aman, seiring dengan perubahan premi risiko, imbal hasil relatif, dan persepsi risiko antarnegara. Dalam konteks SSK domestik, hasil Survei Risiko Sistemik (SRS) semester I 2026¹ menunjukkan bahwa ketegangan geopolitik global dan volatilitas nilai tukar Rupiah masih dipandang sebagai sumber guncangan utama terhadap stabilitas sistem keuangan (Grafik B1.2.1).

Dalam konteks domestik, dampak penyesuaian portofolio asing terhadap SSK dapat diperkuat oleh sejumlah kerentanan. Hasil SRS semester I 2026 juga menunjukkan bahwa ketergantungan pasar keuangan domestik pada aliran modal asing menjadi salah satu kerentanan utama (Grafik B1.2.2). Selain itu, responden juga mengidentifikasi sumber kerentanan lain, di antaranya konsentrasi pendanaan perbankan pada deposito besar, konsentrasi sumber pertumbuhan ekonomi, serta keterbatasan literasi dan inklusi keuangan.

Penyesuaian portofolio investor menjadi salah satu kanal transmisi tekanan pada pasar saham dan SBN, volatilitas nilai tukar dan harga aset, kenaikan premi risiko, serta penurunan likuiditas pasar. Penurunan harga surat berharga berpotensi menimbulkan *mark-to-market losses* pada neraca perbankan, sementara meningkatnya volatilitas dan premi risiko dapat memengaruhi *risk appetite* perbankan. Tekanan pada neraca dan kondisi pendanaan perbankan tersebut selanjutnya berpotensi ditransmisikan ke sektor riil melalui kenaikan suku bunga serta pengetatan kondisi pembiayaan bagi korporasi dan rumah tangga. Apabila berlanjut, kondisi pembiayaan yang lebih ketat dapat menekan arus kas dan profitabilitas korporasi, menahan investasi dan konsumsi, serta menurunkan *wealth* rumah tangga sehingga memperkuat umpan balik (*feedback loop*) antara sektor riil dan sektor keuangan.



Grafik B1.2.1. Perkembangan Top 7 Sumber Guncangan Utama SSK



Grafik B1.2.2. Perkembangan Kerentanan SSK Utama

1 Survei Risiko Sistemik semester I 2026 merupakan survei yang dilakukan oleh Bank Indonesia pada periode Maret-April 2026 terhadap antara lain institusi keuangan, korporasi, perguruan tinggi, lembaga internasional, lembaga riset, asosiasi profesi, wartawan, dan ekonom.

Berdasarkan asesmen terkini, risiko rambatan tekanan eksternal terhadap stabilitas sistem keuangan diperkirakan tetap terkendali.

Hasil SRS semester I 2026 menunjukkan bahwa kepercayaan responden terhadap stabilitas sistem keuangan masih tinggi, baik dalam horizon hingga enam bulan maupun lebih dari enam bulan ke depan (Grafik B1.2.3). Namun, proporsi responden yang menyatakan sangat percaya menurun, sementara proporsi responden yang menyatakan tidak percaya meningkat dibandingkan dengan semester sebelumnya.

Sistem keuangan Indonesia memiliki sejumlah buffer yang membantu meredam transmisi risiko dari tekanan global.

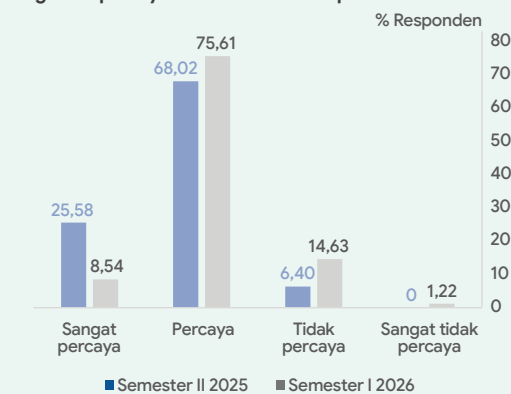
Dari sisi lembaga keuangan, permodalan yang kuat, likuiditas yang tetap memadai, serta pengelolaan risiko pasar yang mengedepankan prinsip kehati-hatian meningkatkan kapasitas perbankan dalam menyerap potensi kerugian akibat perubahan harga aset keuangan maupun gejolak nilai tukar Rupiah tanpa mengganggu fungsi intermediasi. Dari sisi pendanaan, struktur sumber dana yang semakin beragam meningkatkan fleksibilitas bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas di tengah perubahan kondisi pasar keuangan. Sementara

itu, berkembangnya basis investor domestik dan pendalaman pasar keuangan turut membantu menjaga *market functioning* serta mengurangi sensitivitas pasar domestik terhadap perubahan sentimen investor global.

Untuk membantu meredam transmisi tekanan global melalui pasar keuangan, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan.

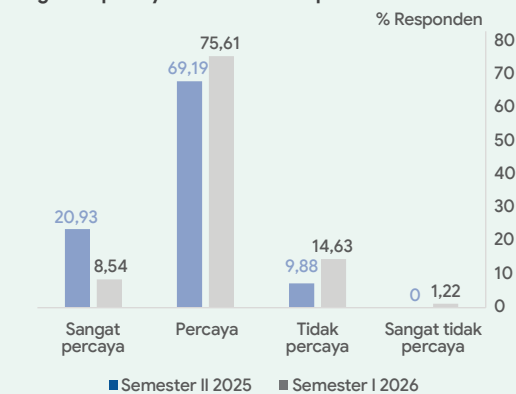
Dari sisi pengawasan, Bank Indonesia memperkuat pengawasan terhadap transaksi valas perbankan melalui pengecekan transaksi valas secara lebih intensif atas kesesuaian *underlying transaction*, kepatuhan terhadap ketentuan, dan pemenuhan *threshold* yang berlaku. Dari sisi pendalaman pasar keuangan, Bank Indonesia melanjutkan upaya memperluas basis investor domestik melalui peningkatan akses investor institusional, termasuk dana pensiun dan perusahaan asuransi, terhadap instrumen surat berharga komersial. Selain itu, Bank Indonesia juga mendorong pengembangan pasar instrumen lindung nilai baik suku bunga maupun nilai tukar, seperti *Overnight Index Swap* dan *Domestic Non-Deliverable Forward* (DNDF), melalui penguatan peran *Dealer Utama Pasar Uang dan Valuta Asing*.

Tingkat Kepercayaan s.d. 6 bulan ke depan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Tingkat Kepercayaan >6 bulan ke depan



Grafik B1.2.3. Tingkat Kepercayaan Responden

Bab 2

KETAHANAN SISTEM KEUANGAN KUAT, MENJAGA SSK, MENDUKUNG INTERMEDIASI

Kinerja dan ketahanan perbankan pada semester I 2026 tetap kuat dalam mendukung intermediasi, ditopang oleh likuiditas, kualitas aset, profitabilitas, dan permodalan yang memadai. Likuiditas perbankan tetap terjaga dengan rasio AL/DPK sebesar 23,08% pada triwulan II 2026, di tengah dinamika pendanaan dan segmentasi likuiditas antarbank tetap perlu dicermati sejalan dengan peningkatan intermediasi. Risiko kredit juga tetap rendah dengan rasio NPL sebesar 2,09%, sementara permodalan terjaga kuat dengan CAR sebesar 23,70%. Risiko pasar perbankan tetap terkendali, di tengah volatilitas pasar keuangan. Kondisi ini didukung oleh pengelolaan risiko nilai tukar yang *prudent* dan kapasitas permodalan yang memadai.

Ketahanan korporasi secara agregat tetap terjaga, di tengah kerentanan pada sebagian korporasi dan rumah tangga perlu terus dicermati. Kemampuan bayar korporasi menguat, tecermin dari *Interest Coverage Ratio* (ICR) sebesar 2,70 kali pada triwulan I 2026 yang meningkat dari triwulan IV 2025 dan berada jauh di atas ambang batas 1 (satu) kali. Walaupun demikian, terdapat peningkatan aset korporasi dalam kategori *distress*

dari 19,0% menjadi 24,2% pada periode yang sama, mengindikasikan masih terdapat kerentanan pada sebagian korporasi. Pada rumah tangga, tekanan pasar tenaga kerja dan perlambatan upah riil turut menekan kemampuan bayar kelompok menengah bawah, terutama pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR) nonsubsidi.

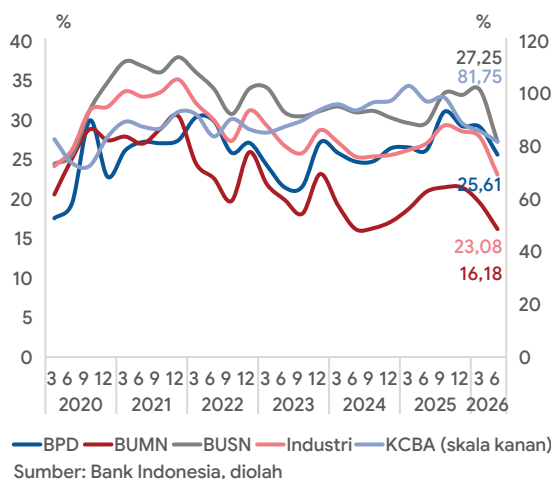
Ketahanan pasar keuangan dan sektor keuangan nonbank tetap terjaga, di tengah meningkatnya risiko pasar. Pasar saham mengalami koreksi sejalan dengan arus keluar investor asing, di tengah dinamika evaluasi Morgan Stanley Capital International (MSCI) dan kondisi *risk-off* global, di tengah fundamental emiten secara umum masih relatif terjaga. Pada industri asuransi, eksposur terhadap perubahan nilai aset tetap ditopang oleh bantalan permodalan yang memadai, sebagaimana tecermin dari rasio *Risk-Based Capital* (RBC) asuransi jiwa sebesar 481,20% serta asuransi umum dan reasuransi sebesar 319,12%, keduanya berada di atas batas minimum. Namun, perkembangan risiko pada beberapa segmen sektor keuangan nonbank tetap perlu dicermati.

2.1

Kinerja Perbankan Kuat Mendukung Intermediasi

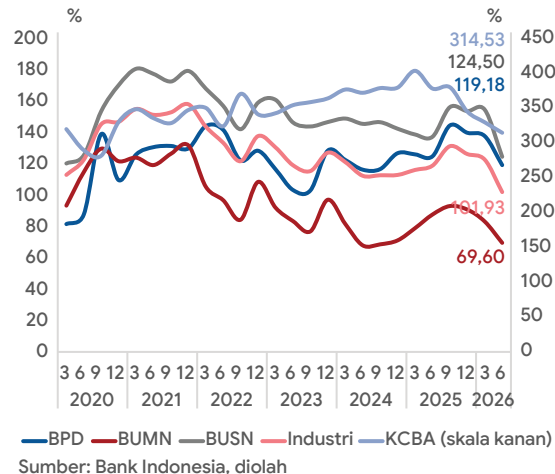
Ketahanan likuiditas tetap terjaga baik, di tengah akselerasi penyaluran kredit yang tinggi, walaupun ruang likuiditas menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Penyaluran kredit yang cukup tinggi berdampak pada penurunan likuiditas yang tecermin melalui penurunan rasio AL/DPK menjadi 23,08% pada triwulan II 2026 dari sebelumnya sebesar 27,85% pada triwulan I 2026. Meskipun demikian, rasio tersebut masih berada jauh di atas ambang batas (*threshold*) kehati-hatian (*prudential*) sebesar 10% (Grafik 2.1.1).

Kapasitas likuiditas yang memadai juga tecermin dari indikator likuiditas lainnya. Rasio Alat Likuid terhadap *Non-Core Deposit* (AL/NCD)² berada pada tingkat yang memadai sebesar 101,93% pada Juni 2026 (Grafik 2.1.2). Porsi terbesar aset likuid ditempatkan pada instrumen SBN sebesar 37,98% pada Juni 2026, menurun dibandingkan dengan Juni 2025 sebesar 41,19%. Rasio *Liquidity Coverage Ratio* (LCR)³ dan rasio *Net Stable Funding Ratio* (NSFR)⁴



Grafik 2.1.1. AL/DPK berdasarkan Kelompok Bank

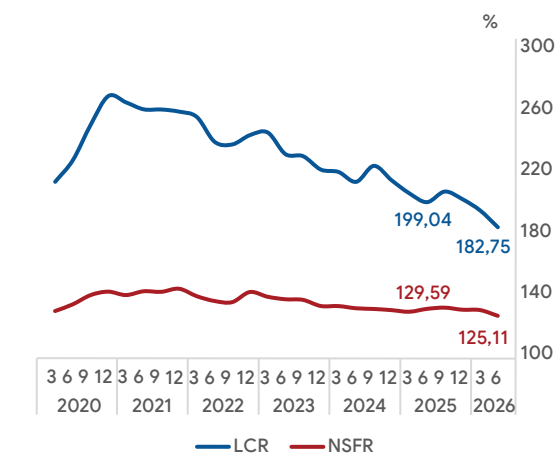
- 2 Perhitungan NCD menggunakan pendekatan 30% Giro + 30% Tabungan + 10% Deposito.
- 3 LCR adalah rasio perbandingan antara *high quality liquid assets* dengan *net cash outflow* (total arus kas keluar bersih) selama 30 hari ke depan dalam skenario stres.
- 4 NSFR adalah rasio perbandingan antara pendanaan stabil yang tersedia (*available stable funding*) dan pendanaan stabil yang diperlukan (*required stable funding*). NSFR mengukur kemampuan bank untuk mendanai aktivitasnya dengan sumber dana yang stabil dalam periode satu tahun, dengan persyaratan rasio minimal 100%.



Grafik 2.1.2. AL/NCD Berdasarkan Kelompok Bank

relatif tinggi masing-masing sebesar 182,75% dan 125,11%. Kedua rasio likuiditas tersebut berada di atas ambang batas yang ditetapkan sebesar 100% (Grafik 2.1.3). Likuiditas secara agregat tetap memadai, namun terdapat dinamika ruang pendanaan serta heterogenitas distribusi dan biaya likuiditas antarbank yang dibahas lebih lanjut pada Boks 2.2.

Risiko kredit secara umum masih terjaga yang tecermin dari penurunan rasio NPL, walaupun terdapat sedikit peningkatan pada segmen konsumsi. Pada triwulan II 2026, rasio NPL tercatat sebesar 2,09%, lebih rendah dibandingkan 2,14% pada triwulan I 2026. Perbaikan kualitas kredit

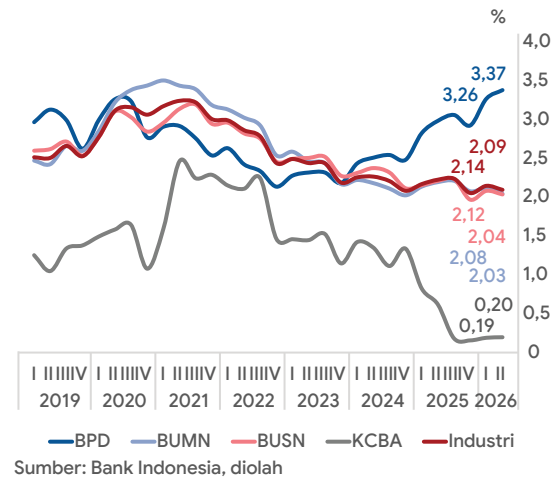


Grafik 2.1.3. Perkembangan LCR dan NSFR

tersebut terutama didorong oleh penurunan NPL pada segmen komersial dan korporasi. Namun demikian, risiko kredit pada segmen konsumsi masih menunjukkan peningkatan seiring dengan tekanan kemampuan bayar (*repayment capacity*) masyarakat kelas menengah dan bawah. Sejalan dengan kondisi tersebut, rasio NPL pada kredit konsumsi meningkat dari 2,35% pada triwulan I 2026 menjadi 2,45% pada triwulan II 2026, terutama bersumber dari penurunan kualitas KPR. Sementara itu, rasio NPL pada kredit UMKM berada pada level yang relatif tinggi walaupun menurun dari 4,60% pada triwulan I 2026 menjadi 4,54% pada triwulan II 2026 (Grafik 2.1.4).

Berdasarkan kelompok bank, perbaikan risiko kredit terjadi pada kelompok bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Bank Umum Swasta Nasional (BUSN). Hal ini tecermin dari penurunan rasio NPL bank BUMN dan BUSN masing-masing dari 2,12% dan 2,08% pada triwulan I 2026 menjadi 2,04% dan 2,03% pada triwulan II 2026. Sementara itu, rasio NPL Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) relatif stabil dengan kenaikan tipis dari 0,19% menjadi 0,20%. Di sisi lain, perkembangan risiko kredit Bank Pembangunan Daerah (BPD) perlu dicermati sejalan dengan penurunan kualitas kredit beberapa segmen, kecuali UMKM. Rasio NPL BPD meningkat dari 3,26% menjadi 3,37% (Grafik 2.1.5).

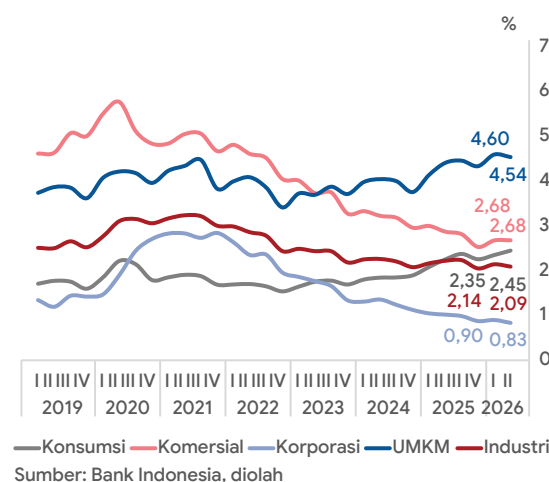
Perbankan tetap menjaga kecukupan pencadangan untuk mengantisipasi risiko kredit. Hal ini tecermin dari rasio *coverage* Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terhadap NPL yang tetap berada di atas 100%. Pada triwulan II 2026, rasio CKPN terhadap NPL tercatat sebesar 165,95%, sedikit menurun



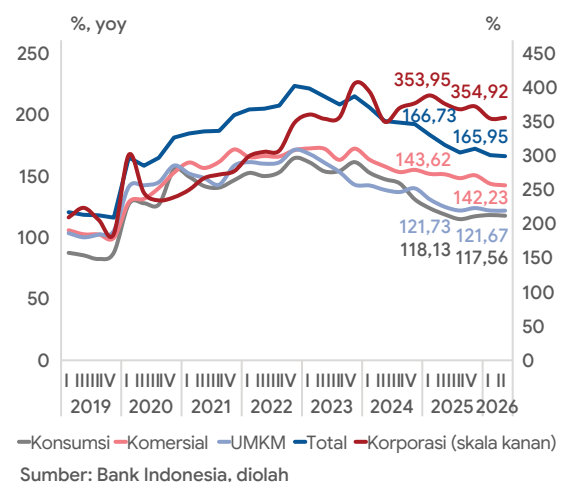
Grafik 2.1.5. Perkembangan NPL per Kelompok Bank

dibandingkan triwulan sebelumnya (Grafik 2.1.6). Berdasarkan segmen kredit, *coverage* ratio CKPN terhadap NPL tercatat sebesar 354,92% pada segmen korporasi, 142,23% pada segmen komersial, 121,67% pada segmen UMKM, dan 117,56% pada segmen konsumsi.

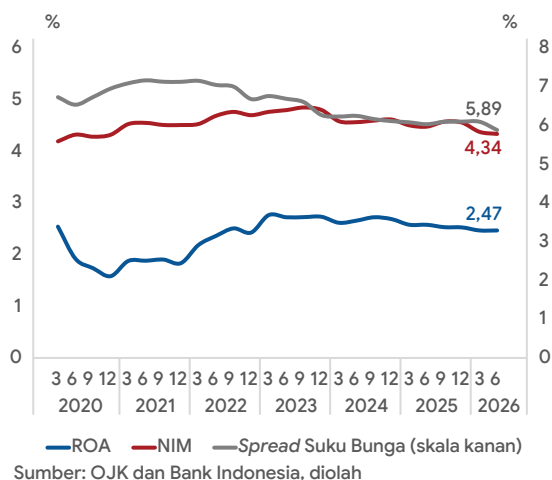
Profitabilitas perbankan tetap terjaga dan terus mendukung ketahanan perbankan. Rasio *Return on Asset* (ROA) dan *Net Interest Margin* (NIM) masing-masing tercatat sebesar 2,47% dan 4,34% pada Juni 2026, sedikit menurun dibandingkan Juni 2025, seiring dengan kenaikan *overhead cost* (OHC) yang melampaui peningkatan pendapatan non-bunga (termasuk *fee-based income*, pendapatan bunga dari surat berharga, serta koreksi CKPN) (Grafik 2.1.7). Namun demikian, profitabilitas pada Juni 2026 tetap terjaga ditopang oleh pertumbuhan pendapatan operasional, terutama *Net Interest*



Grafik 2.1.4. Perkembangan NPL per Segmen



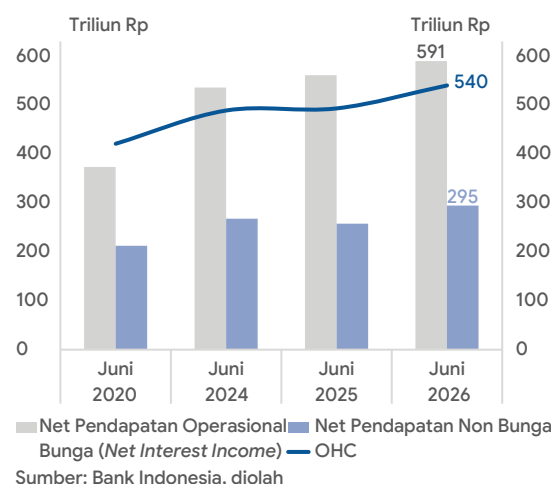
Grafik 2.1.6. Perkembangan Coverage CKPN Terhadap Risiko Kredit



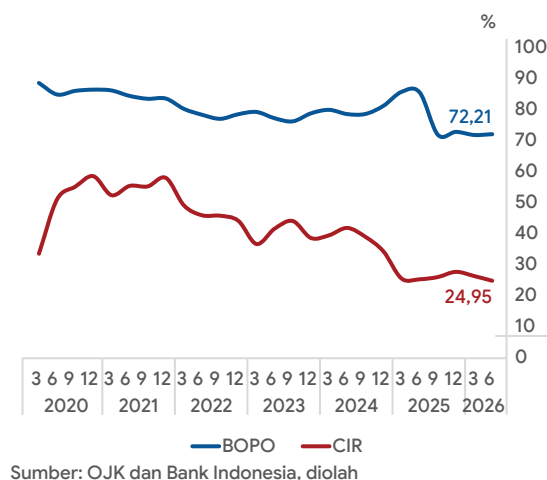
Grafik 2.1.7. ROA, NIM, dan Spread Suku Bunga Perbankan

Income (NII) yang meningkat menjadi Rp591 triliun (disetahunkan) (Grafik 2.1.8). Di periode yang sama, efisiensi operasional mengalami perbaikan yang tercermin pada tren penurunan rasio *Cost-to-Income* (CIR) sebesar 24,95% dan rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 72,21% (Grafik 2.1.9).

Ketahanan permodalan tetap kuat, tercermin dari CAR yang berada pada level tinggi. Pada triwulan II 2026, CAR terjaga tinggi sebesar 23,70%, sedikit menurun dibandingkan triwulan I 2026 yang tercatat sebesar 25,09%. Penurunan tingkat permodalan diindikasikan karena terjadi distribusi laba pada triwulan I 2026 dan dampak negatif tekanan NIM terhadap pertumbuhan laba tahun berjalan. Di sisi lain, pertumbuhan kredit



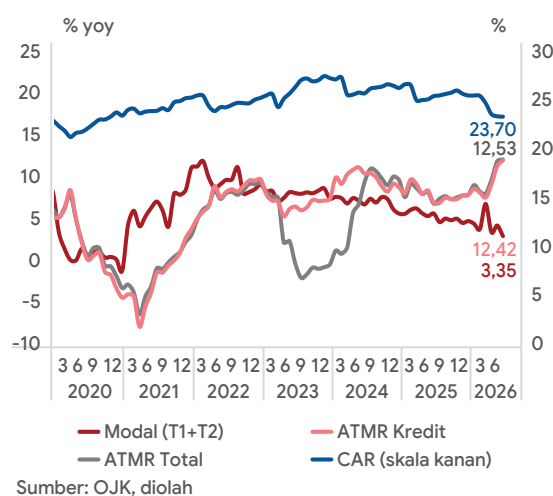
Grafik 2.1.8. Net Pendapatan Non-Bunga, OHC, dan NII



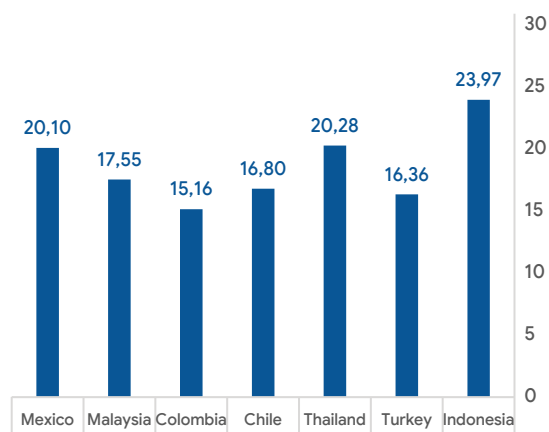
Grafik 2.1.9. BOPO dan CIR

mendorong kenaikan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yang lebih tinggi dibandingkan penambahan ekuitas dari akumulasi laba (Grafik 2.1.10). Secara komparatif, CAR perbankan Indonesia masih berada di atas negara *peers* di *emerging market economies*, yang mencerminkan ketahanan perbankan nasional yang kuat (Grafik 2.1.11).

Ketahanan permodalan juga tetap kuat dalam menghadapi skenario stress test. Skenario tersebut mencakup perlambatan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), peningkatan inflasi, kenaikan *yield* SBN, dan pelemahan nilai tukar. Pada skenario ekstrem, tingkat CAR agregat diperkirakan masih di atas 23%, berada jauh di atas ketentuan minimum dan profil risiko perbankan. Hasil simulasi tersebut



Grafik 2.1.10. Perkembangan Rasio Permodalan

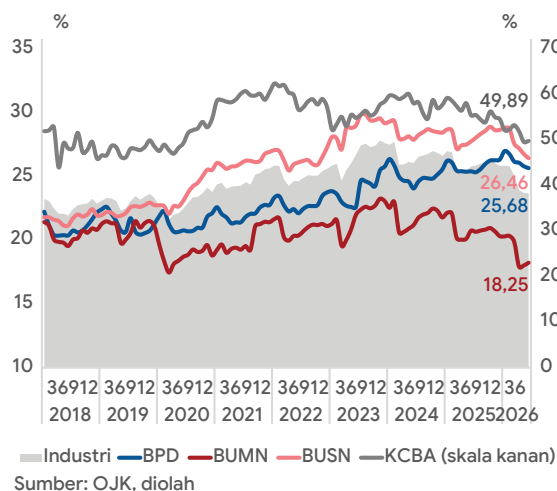


Sumber: CEIC, diolah

Grafik 2.1.11. Perbandingan CAR Negara Peers di Emerging Market Economies

mengindikasikan bahwa permodalan bank tetap kuat untuk menyerap potensi kerugian akibat peningkatan risiko kredit, risiko pasar, dan tekanan makroekonomi. Selain risiko kredit, volatilitas nilai tukar dan perubahan *yield* surat berharga tetap perlu dicermati sebagai sumber risiko pasar. Pendalaman mengenai transmisi kedua faktor tersebut terhadap neraca dan ketahanan disajikan pada Boks 2.1.

Berdasarkan kelompok bank, penurunan CAR secara tahunan terjadi pada kelompok bank BUMN, BUSN, dan KCBA. Level CAR kelompok bank BUMN tercatat paling rendah dibandingkan kelompok bank lainnya sejalan dengan akselerasi penyaluran kredit yang cukup tinggi pada kelompok tersebut. Meskipun demikian, tingkat CAR kelompok bank BUMN masih berada di atas CAR minimum yang ditetapkan dan profil risikonya, yakni sebesar 18,25% (Grafik 2.1.12).



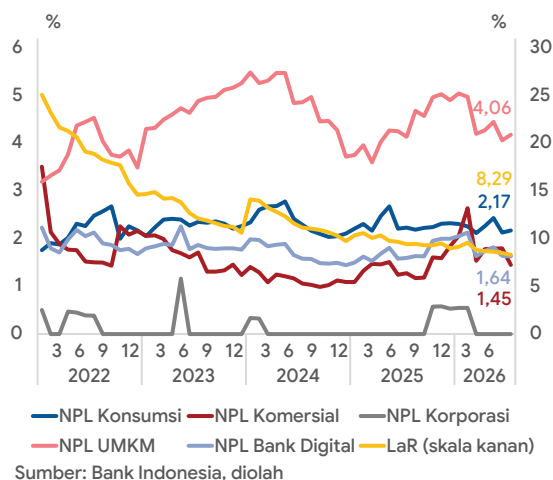
Sumber: OJK, diolah

Grafik 2.1.12. Perkembangan CAR Berdasarkan Kelompok Bank

Ketahanan bank digital masih terjaga ditopang oleh likuiditas dan permodalan yang tinggi, walaupun kualitas aset pada segmen UMKM dan efisiensi operasional perlu terus dicermati.

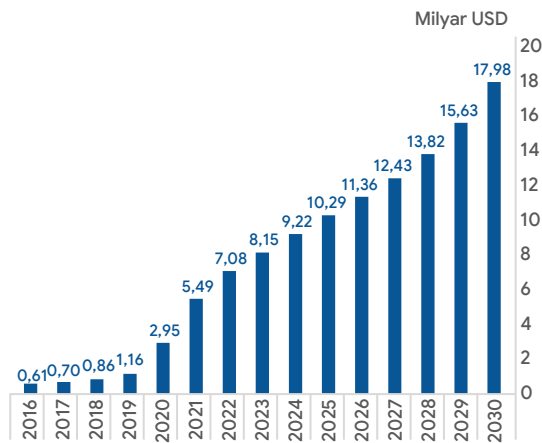
Pada Juni 2026, rasio NPL bank digital tetap rendah sebesar 1,64% didukung oleh tren penurunan *Loan at Risk* (LaR) yang mengindikasikan risiko kredit terjaga, sementara rasio NPL kredit UMKM tercatat lebih tinggi, sebesar 4,06% (Grafik 2.1.13). Kondisi tersebut mengindikasikan risiko kredit secara agregat yang terjaga rendah namun disertai kerentanan pada segmen debitur dengan profil risiko yang lebih tinggi. Dari sisi ketahanan, rasio AL/DPK dan CAR berada pada tingkat yang memadai untuk menyerap potensi kerugian, disertai dengan profitabilitas yang membaik. Kendati demikian, efisiensi operasional belum optimal, tecermin dari rasio BOPO bank digital yang relatif tinggi.

Penguatan ketahanan siber terus dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas interkoneksi digital antarbank dan ancaman kejahatan siber seiring dengan akselerasi digitalisasi sistem pembayaran. Pesatnya digitalisasi sistem pembayaran dan meningkatnya ancaman kejahatan siber, diperkirakan akan memberikan kerugian sebesar 17,98 milyar AS pada 2030 (Grafik 2.1.14). Bank Indonesia terus memperkuat keamanan dan integritas transaksi guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap ekosistem keuangan digital. Pengembangan *BI-Payment Clear* dan *BI-Payment Info* meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap transaksi mencurigakan, anomali, dan potensi *fraud* melalui



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.1.13. Perkembangan Rasio NPL dan LaR Bank Digital



Sumber: Statista 2026, diolah

Grafik 2.1.14. Total Kerugian Kejahatan Siber Global

pemanfaatan data yang lebih granular. Di sisi industri, penerapan kriteria Transaksi, Interkoneksi, Kompetensi, Manajemen Risiko, dan Infrastruktur Teknologi Informasi, yang didukung oleh peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan reformasi regulasi sistem pembayaran, semakin memperkuat manajemen risiko dan ketahanan operasional. Berbagai langkah tersebut dilakukan untuk memastikan keamanan, integritas, dan resiliensi sistem pembayaran nasional agar tetap terjaga di tengah meningkatnya risiko siber dan berkembangnya inovasi keuangan digital.

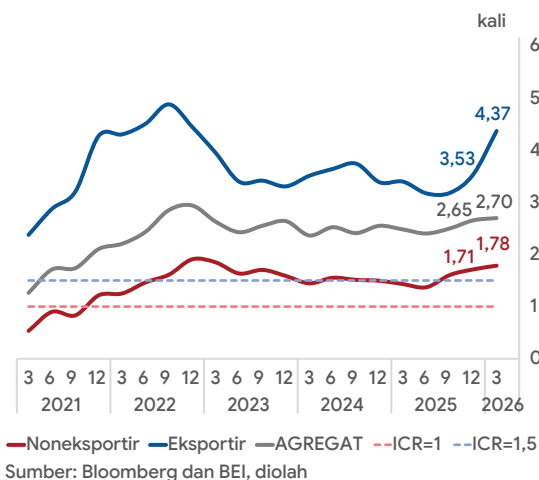
2.2

Ketahanan Korporasi dan Rumah Tangga Tetap Terjaga di Tengah Tekanan

Ketahanan korporasi tetap terjaga di tengah tekanan dan dinamika domestik maupun global. Kemampuan korporasi membayar bunga atau ICR tetap berada di atas ambang batas sebesar 1 kali dan meningkat menjadi 2,70 kali pada triwulan I 2026, lebih tinggi dibandingkan 2,65 kali pada triwulan IV 2025. Peningkatan tersebut ditopang oleh korporasi berorientasi ekspor dengan ICR sebesar 4,37 kali. Sementara itu, korporasi nonekspor juga menunjukkan perbaikan menjadi 1,78 kali (Grafik 2.2.1) yang ditopang

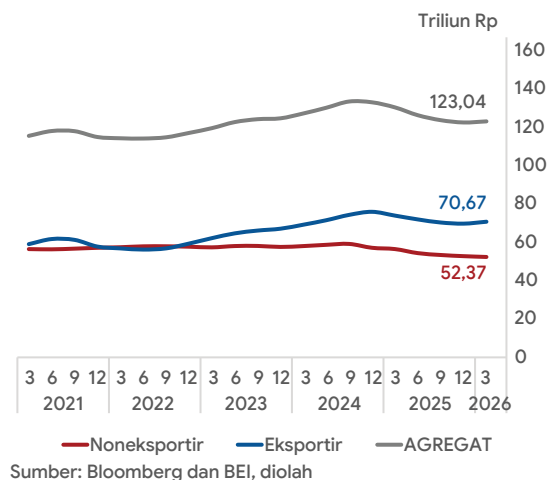
oleh penurunan beban bunga di tengah kinerja profitabilitas yang tetap terjaga (Grafik 2.2.2 dan Grafik 2.2.3).

Likuiditas korporasi pada awal 2026 tetap tinggi di tengah perilaku kehati-hatian dalam melakukan investasi, sejalan dengan ketidakpastian global yang masih tinggi. *Cash ratio* korporasi mengalami tren peningkatan menjadi 0,49 di triwulan I 2026 (Grafik 2.2.4). Peningkatan *cash ratio* tersebut antara lain



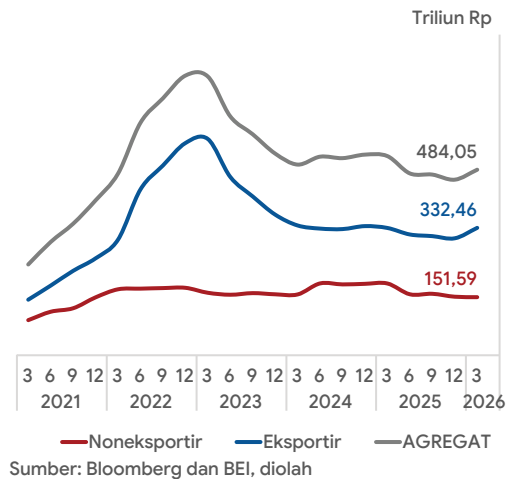
Sumber: Bloomberg dan BEI, diolah

Grafik 2.2.1. Perkembangan Kemampuan Bayar Korporasi

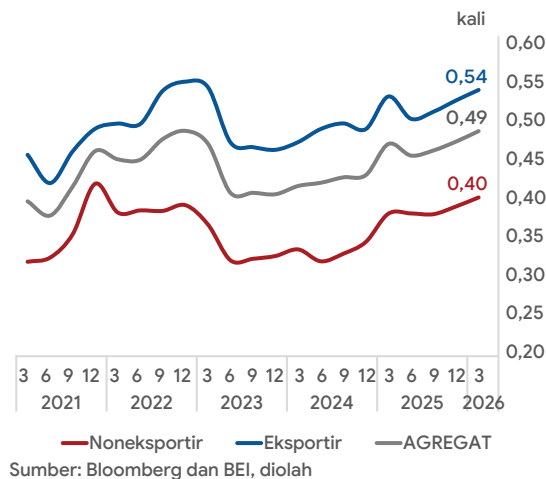


Sumber: Bloomberg dan BEI, diolah

Grafik 2.2.2. Perkembangan Beban Bunga Korporasi



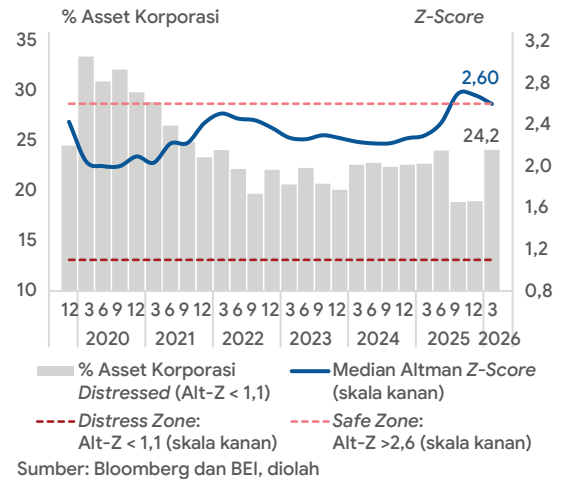
Grafik 2.2.3. Perkembangan EBIT Korporasi



Grafik 2.2.4. Perkembangan Likuiditas Korporasi

menunjukkan kecenderungan korporasi yang mempertahankan bantalan (*buffer*) likuiditas di tengah ketidakpastian. Korporasi berorientasi ekspor mencatatkan peningkatan *cash ratio* sebesar 0,54 pada triwulan I 2026, dari triwulan IV 2025 sebesar 0,53. Sementara itu, *cash ratio* korporasi nonekspor juga meningkat, namun lebih rendah sebesar 0,40 pada triwulan I 2026.

Risiko *financial distress* korporasi secara agregat masih terjaga berdasarkan indikator Altman Z-Score, walaupun kerentanan meningkat pada sebagian korporasi. Pada triwulan I 2026, median agregat Altman Z-Score korporasi tercatat sebesar 2,60 yang berarti masih berada pada batas zona aman namun sedikit menurun dari triwulan sebelumnya (Grafik 2.2.5). Pada saat yang sama, porsi aset korporasi dengan kategori *distress* meningkat dari 19,0% pada triwulan IV 2025 menjadi 24,2% pada triwulan



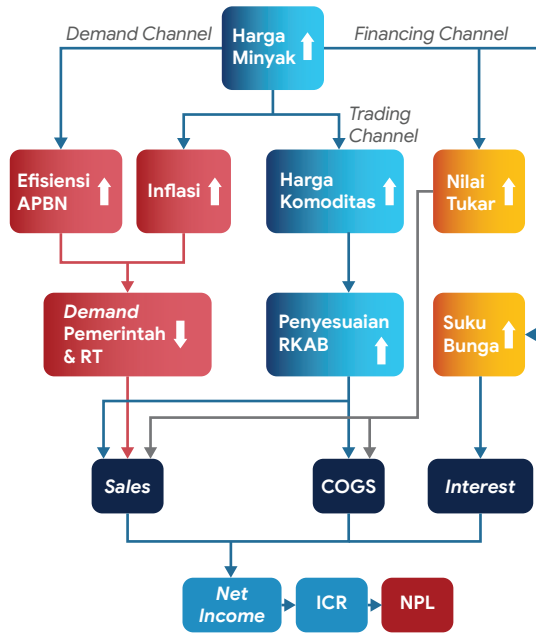
Grafik 2.2.5. Perkembangan Indikator Financial Distress (Altman Z-Score) Korporasi

I 2026, menunjukkan bahwa ketahanan korporasi terdampak tekanan ketidakpastian global yang meningkat.

Hasil *stress test* menunjukkan bahwa ketahanan korporasi secara agregat masih terjaga dalam menghadapi skenario *multiple shocks* yang berasal dari faktor global maupun domestik. Kenaikan harga minyak dan komoditas mendorong peningkatan inflasi yang kemudian memengaruhi daya beli rumah tangga, belanja Pemerintah, dan biaya produksi korporasi. Bersamaan dengan tekanan tersebut, faktor global juga meningkatkan tekanan nilai tukar dan memicu peningkatan suku bunga acuan yang pada akhirnya meningkatkan beban bunga korporasi. Kombinasi penurunan permintaan, kenaikan *cost of goods sold* dan meningkatnya beban bunga berpotensi menekan penjualan dan *net income* korporasi (Gambar 2.2.1). Walaupun demikian, hasil *stress test* menunjukkan bahwa ketahanan korporasi secara agregat masih terjaga, ditopang oleh kemampuan bayar yang tetap memadai dan risiko kredit yang masih terkendali dalam menghadapi skenario tekanan. Namun, tekanan yang lebih besar tetap perlu dicermati pada korporasi dengan cadangan likuiditas, *debt servicing capacity*, dan profitabilitas yang rendah.

Ketahanan sektor rumah tangga, terutama kelompok pendapatan menengah bawah, menghadapi tekanan dari pasar tenaga kerja dan perlambatan pertumbuhan upah yang berpotensi menurunkan kapasitas pembayaran kredit. Tekanan tersebut tecermin dari peningkatan klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan dari 164.084 kasus pada Mei 2025 menjadi 193.725 kasus pada

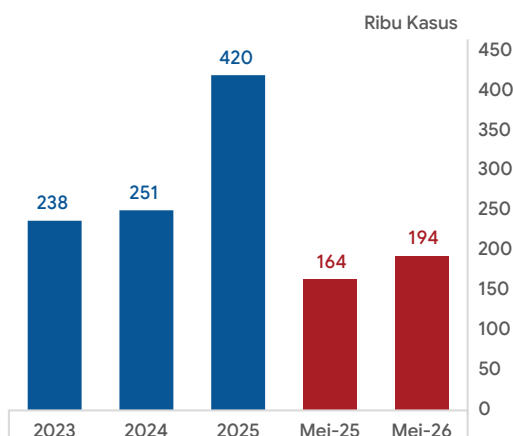
MULTIPLE SHOCKS



Sumber: Bank Indonesia, diolah

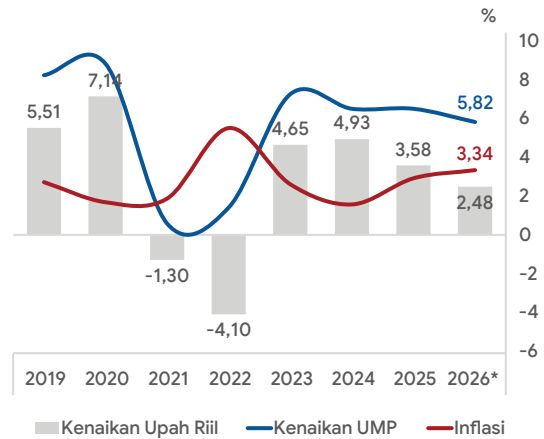
Gambar 2.2.1. Transmisi Multiple Shocks Terhadap Ketahanan Korporasi

Mei 2026 (Grafik 2.2.6). Dari sisi pendapatan, pertumbuhan upah riil dalam tren penurunan dan berada di bawah pertumbuhan Upah Minimum Provinsi (UMP) (Grafik 2.2.7). Deselerasi upah riil kemudian menekan kapasitas pembayaran cicilan kredit kelompok menengah bawah dengan bantalan keuangan terbatas. Hal ini kemudian berdampak pada peningkatan risiko gagal bayar terutama pada kredit dengan nilai yang besar dan bertenor panjang, seperti KPR.



Sumber: BPJS Ketenagakerjaan, diolah

Grafik 2.2.6. Jumlah Klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan

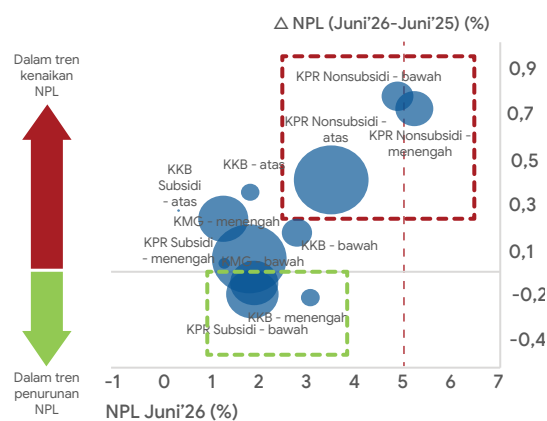


Sumber: Sakernas, BPS, diolah

Grafik 2.2.7. Kenaikan UMP vs Upah Riil

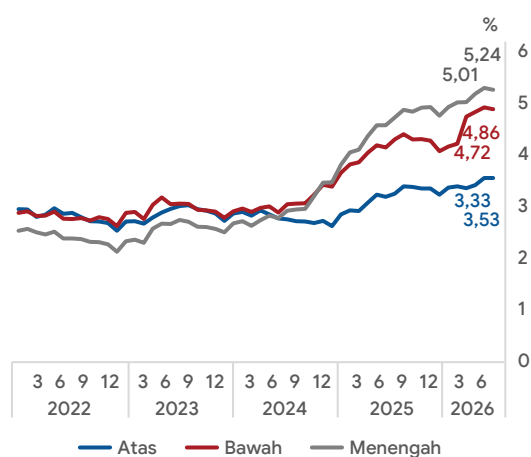
Peningkatan risiko gagal bayar tecermin dari sebaran risiko KPR per kelas pendapatan. KPR nonsubsidi kelas bawah dan menengah tercatat berada pada kuadran risiko tinggi dengan pangsa besar (Grafik 2.2.8). Rasio NPL untuk kredit tersebut relatif tinggi dengan tren yang meningkat sejak triwulan II 2025 hingga triwulan II 2026. Sejalan dengan kondisi tersebut, rasio NPL pada KPR nonsubsidi kelas menengah dan kelas bawah meningkat, baik secara triwulanan maupun tahunan, dengan level yang lebih tinggi dibandingkan kelas atas (Grafik 2.2.9).

Dalam menjaga daya beli dan keterjangkauan pembiayaan kelompok menengah bawah, Pemerintah menempuh sejumlah langkah kebijakan. Di sisi pembiayaan perumahan, Pemerintah memperluas akses KPR bersubsidi melalui peningkatan batas maksimal penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menjadi Rp8,5 juta s.d. Rp14 juta per bulan sesuai dengan kategori wilayah. Tenor KPR direncanakan akan diperpanjang untuk meningkatkan keterjangkauan KPR dan menekan beban pembayaran angsuran (*debt service*). Selain itu, Pemerintah melanjutkan subsidi energi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang mencakup bahan bakar minyak solar, LPG 3 kg, dan listrik bagi rumah tangga rentan untuk menjaga daya beli dan konsumsi.



*Bubble size mencerminkan pangsa terhadap KK RT
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.2.8. Matriks Risiko Kredit Konsumsi Rumah Tangga Berdasarkan Kelas Pendapatan



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 2.2.9. Rasio NPL KPR Nonsubsidi

2.3

Kondisi Pasar Keuangan dan Sektor Keuangan Nonbank Tetap Terjaga

Ketahanan pasar keuangan dan sektor keuangan nonbank secara umum tetap terjaga di tengah meningkatnya risiko pasar dan heterogenitas risiko antarlembaga. Perkembangan pasar keuangan pada semester I 2026 diwarnai koreksi indeks saham dan kenaikan *yield* SBN, sejalan dengan berlanjutnya arus keluar investor asing serta meningkatnya persepsi risiko. Kendati demikian, tekanan tersebut dapat diimbangi oleh fundamental emiten yang relatif terjaga dan basis investor domestik yang cukup kuat.

Pasar saham domestik mencatatkan koreksi seiring dengan berlanjutnya penyesuaian portofolio investor global. Indeks saham Indonesia terkoreksi 7,90% (yoy) dan 34,74% secara kumulatif sejak awal tahun, sementara Malaysia terkoreksi 1,13% (yoy) dan sebagian bursa kawasan seperti Thailand, Singapura, dan Filipina mencatatkan penguatan. Pola serupa terlihat pada *benchmark* MSCI⁵, dengan *total return* MSCI Indonesia IDR tercatat -36,64%, dibandingkan dengan MSCI

ASEAN *Local Currency* sebesar 3,05% dan MSCI *Emerging Markets Local Currency* sebesar 0,12%. Koreksi tersebut sebagian besar mencerminkan penyesuaian valuasi dan premi risiko di tengah fundamental emiten yang secara umum tetap terjaga.

Indonesia tetap berada dalam *klasifikasi emerging markets* pada rangkaian evaluasi MSCI, di tengah dinamika arus modal asing yang fluktuatif. Investor asing secara kumulatif mencatatkan penjualan neto (*net selling*) sebesar Rp74,18 triliun sepanjang semester I 2026, termasuk Rp19,63 triliun pada periode Juni 2026, seiring dengan pembekuan sementara perubahan indeks pada Januari 2026, penghapusan 6 (enam) saham dari Standard Index pada Mei 2026, serta penilaian keterbukaan informasi pada Juni 2026. Evaluasi lanjutan pada Agustus dan November 2026 menjadi kesempatan untuk mengukuhkan posisi tersebut, didukung oleh valuasi emiten yang tecermin dari *earnings per share* dan *dividend payout* yang masih positif serta sejumlah penguatan tata kelola yang tengah berjalan.

Fundamental perusahaan berdasarkan sektor secara umum tetap positif sehingga tekanan indeks harga tidak sepenuhnya mencerminkan kinerja korporasi. Sebagian besar sektor masih membukukan ROA positif, tertinggi pada sektor

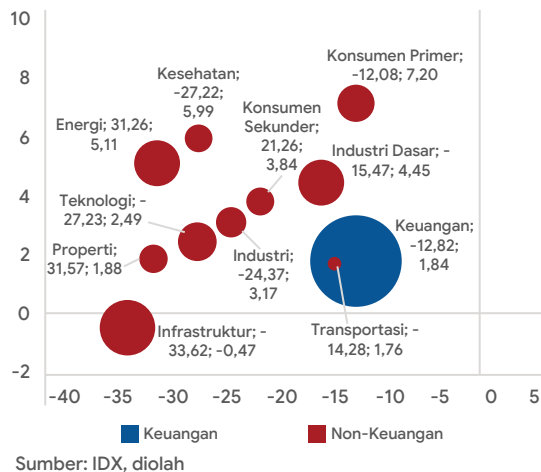
⁵ *Benchmark* MSCI merupakan indeks acuan yang disusun oleh Morgan Stanley Capital International untuk mengukur dan membandingkan kinerja pasar saham berdasarkan cakupan negara, kawasan, atau kelompok pasar tertentu. *Benchmark* MSCI menggunakan indeks *total return* yang memperhitungkan perubahan harga saham dan reinvestasi dividen. MSCI Indonesia IDR merepresentasikan kinerja saham berkapitalisasi besar dan menengah di Indonesia dalam Rupiah.

barang konsumen primer sebesar 7,20%, diikuti sektor kesehatan 5,99%, energi 5,11%, dan barang baku 4,45% (Grafik 2.3.1). Sektor keuangan juga masih memegang peran dominan dengan pangsa 27,06% terhadap kapitalisasi pasar dan 26,46% terhadap nilai transaksi. Aktivitas perdagangan pun tetap terjaga, dengan pangsa nilai transaksi terbesar pada sektor barang baku, yakni 33,27% dan sektor energi sebesar 18,21%.

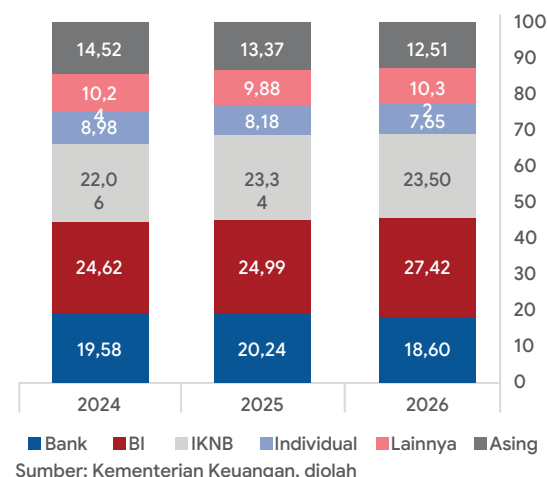
Pada sektor keuangan, fundamental subsektor perbankan secara umum tetap terjaga di tengah koreksi harga saham. Emiten Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 4 masih mencatatkan profitabilitas dan pertumbuhan rasio *Earning Per Share* yang solid, sehingga penurunan *price to earning ratio* pada kelompok bank dimaksud lebih mencerminkan penyesuaian valuasi dan kenaikan premi risiko dibandingkan dengan pelemahan kinerja usaha. Dengan fundamental yang tetap terjaga, kelompok saham dimaksud berpotensi menjadi salah satu penopang pemulihan harga saham seiring dengan meredanya tekanan sentimen dan arus keluar investor.

Kondisi pasar surat berharga menunjukkan ketahanan yang lebih baik dibandingkan dengan pasar saham, antara lain ditopang oleh basis investor domestik yang relatif kuat dan berorientasi jangka panjang. Kenaikan *yield* US Treasury dapat mendorong penyesuaian portofolio global dan mengurangi daya tarik relatif aset domestik. Arus keluar investor asing dan meningkatnya persepsi risiko domestik turut memengaruhi permintaan dan pergerakan *yield* SBN. Walaupun demikian, penurunan permintaan dari investor asing sebagian dapat diimbangi melalui kepemilikan SBN oleh investor domestik, termasuk Bank Indonesia dan Industri Keuangan

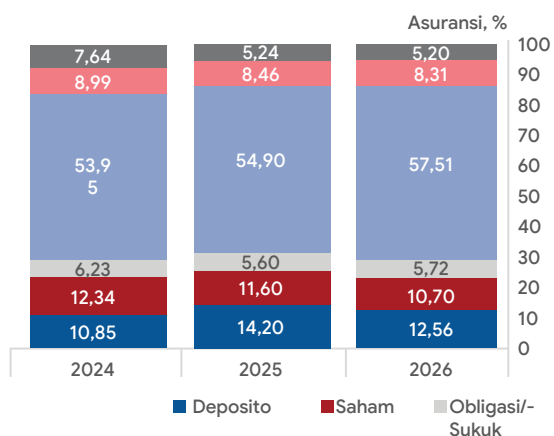
Non-Bank (IKNB), sehingga tekanan terhadap pasar relatif terbatas (Grafik 2.3.2). Kepemilikan SBN oleh IKNB meningkat, terutama melalui perusahaan asuransi dan dana pensiun yang menempatkan masing-masing sekitar 57,51% dan



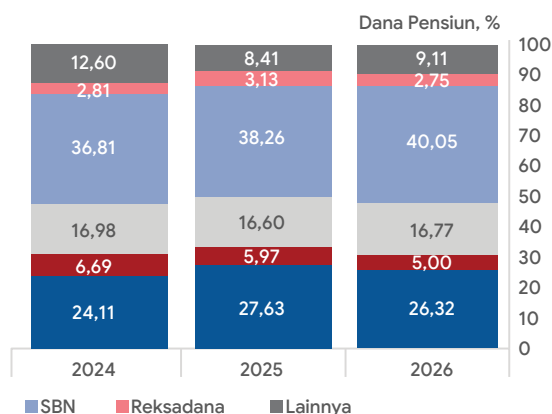
Grafik 2.3.1. Price Return dan ROA Sektoral



Grafik 2.3.2. Kepemilikan SBN



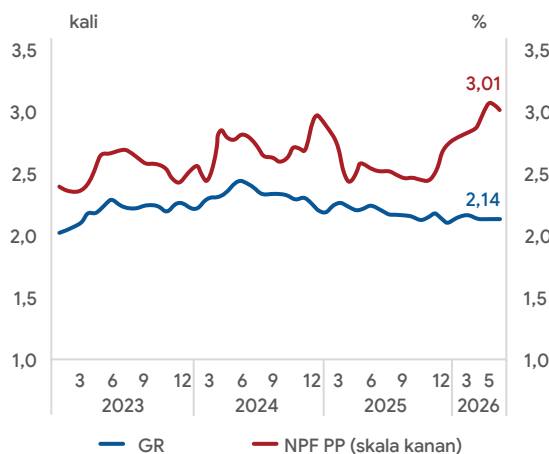
Grafik 2.3.3. Investasi Asuransi dan Dana Pensiun



40,05% portofolio investasinya pada SBN (Grafik 2.3.3). Investasi tersebut di satu sisi menopang daya serap pasar, namun di sisi lain meningkatkan eksposur IKNB terhadap risiko pasar sehingga perkembangannya perlu terus dicermati.

Sebagai investor institusional, risiko pasar IKNB diperkirakan masih dapat diserap oleh bantalan permodalan industri asuransi yang relatif memadai. Pada Mei 2026, RBC⁶ asuransi jiwa serta asuransi umum dan reasuransi masing-masing tercatat sebesar 481,20% dan 319,12%, berada di atas ketentuan minimum sebesar 120%. Kendati demikian, tingkat ketahanan belum sepenuhnya merata sehingga perkembangannya tetap perlu dicermati.

Di luar perannya sebagai investor, risiko pembiayaan IKNB secara industri relatif terjaga, tecermin dari ketahanan perusahaan pembiayaan yang tetap terpelihara, di tengah sedikit menurunnya kualitas pembiayaan. *Non-Performing Financing* (NPF) perusahaan pembiayaan tetap terjaga yaitu sebesar 3,01% pada Juni 2026. Pada periode yang sama, *Gearing Ratio* (GR)⁷ masih berada pada tren yang memadai dengan capaian sebesar 2,14 kali, berada jauh di bawah batas maksimum 10 kali (Grafik 2.3.4).



Sumber: OJK, diolah

Grafik 2.3.4. GR dan NPF

6 *Risk-Based Capital* merupakan rasio untuk mengukur seberapa besar kemampuan modal atau kekayaan bersih perusahaan asuransi menyerap potensi kerugian yang timbul dari risiko usaha.

7 *Gearing ratio* merupakan perbandingan antara total pinjaman perusahaan pembiayaan dengan total modal sendiri dan pinjaman subordinasi setelah dikurangi penyertaan modal. Rasio ini menggambarkan tingkat *leverage* atau ketergantungan perusahaan pada pendanaan berbasis pinjaman. Penurunan *gearing ratio* menunjukkan bahwa jumlah pinjaman relatif terhadap modal menurun, sehingga kapasitas modal untuk menyangga kewajiban dan potensi kerugian relatif lebih besar.

Di sisi lain, risiko pada industri pinjaman daring (pindar) tercatat meningkat dan menjadi salah satu sumber kerentanan yang perlu dicermati. Tingkat Wan Prestasi 90 hari (TWP90)⁸ agregat berada pada tren yang meningkat, tercatat sebesar 4,26% pada Juni 2026 (Grafik 2.3.5). Kenaikan tersebut terutama bersumber dari segmen pembiayaan produktif dan UMKM yang kemampuan pembayarannya relatif lebih sensitif terhadap perlambatan usaha dan tekanan arus kas, sejalan dengan karakteristik pindar yang didominasi kelompok masyarakat dan pelaku usaha yang belum sepenuhnya terjangkau lembaga keuangan formal. Namun demikian, eksposur langsung pindar terhadap perbankan masih relatif rendah sehingga potensi rambatan melalui jalur gagal bayar antarlembaga, tetap terbatas.

Risiko rambatan langsung antara IKNB dan perbankan diperkirakan masih terkendali, meskipun struktur interkoneksinya semakin beragam. Pada sisi aset, perusahaan pembiayaan mencakup sekitar 43,29% dari total tagihan bank kepada IKNB, terutama melalui kredit dan kepemilikan surat berharga. Pada sisi kewajiban, perusahaan asuransi mencakup sekitar 26,58% dari total kewajiban bank kepada IKNB, terutama melalui penempatan DPK dan surat berharga bank. Dengan struktur tersebut, rambatan risiko berpotensi terjadi melalui pemburukan kemampuan bayar IKNB maupun penarikan dana institusional. Namun demikian, risiko secara agregat masih relatif terbatas karena kredit bank kepada IKNB masih berkontraksi dan penempatan reksa dana hanya sekitar 0,7% dari total DPK perbankan, meskipun konsentrasinya pada beberapa bank tetap perlu dicermati.



Sumber: OJK, diolah

Grafik 2.3.5. TWP90 Pindar

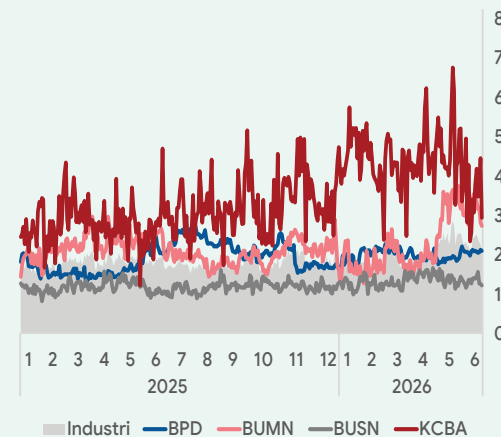
8 TWP90 merupakan rasio pendanaan yang mengalami wanprestasi lebih dari 90 hari sejak tanggal jatuh tempo terhadap total *outstanding* pendanaan. Semakin tinggi TWP90, semakin besar proporsi pendanaan bermasalah dan risiko gagal bayar pada industri pinjaman daring.

Boks 2.1 | Ketahanan Sistem Keuangan dalam Menghadapi Peningkatan Risiko Pasar

Risiko pasar perbankan tetap terkelola di tengah meningkatnya volatilitas pasar keuangan global. Ketidakpastian global dapat meningkatkan volatilitas dan tekanan terhadap nilai tukar Rupiah, yang selanjutnya berpotensi meningkatkan eksposur risiko pasar perbankan. Namun demikian, risiko nilai tukar tetap dimitigasi melalui pengelolaan Posisi Devisa Neto (PDN) secara *prudent* serta didukung oleh kapasitas permodalan yang memadai untuk menyerap potensi kerugian.

Rasio PDN dijaga paling tinggi sebesar 20% terhadap modal untuk pengendalian risiko nilai tukar dan mencegah *currency mismatch* yang berlebihan. Secara historis, rasio PDN perbankan masih berada jauh di bawah *threshold* yang ditetapkan, sehingga memberikan ruang yang memadai dalam pengelolaan risiko nilai tukar (Grafik B2.1.1). Bank Indonesia juga terus menjaga stabilitas pasar valas dan memperkuat pengawasan transaksi valas perbankan, termasuk kesesuaian *underlying transaction* dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku sehingga secara keseluruhan memperkuat pengelolaan risiko nilai tukar yang *prudent*.

Selain nilai tukar, peningkatan imbal hasil (*yield*) Surat-Surat Berharga (SSB) meningkatkan risiko pasar yang berdampak pada penurunan nilai SSB yang dimiliki bank. Pangsa penempatan bank pada SSB (terutama SBN) mencapai kisaran 15-20% dari



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik B2.1.1. Perkembangan Rasio PDN Harian Berdasarkan Kelompok Bank

seluruh aset pada Mei 2026 yang diantaranya terdampak kenaikan *yield*. Kenaikan *yield* tersebut menyebabkan penurunan nilai pasar obligasi dan menimbulkan potensi kerugian *mark-to-market* pada portofolio yang dicatat berdasarkan nilai pasar. Potensi kerugian tersebut terutama terkonsentrasi pada bank-bank besar yang memiliki eksposur kepemilikan surat berharga lebih tinggi. Namun demikian, bank-bank tersebut umumnya didukung oleh tingkat permodalan yang kuat sehingga perbankan secara keseluruhan diperkirakan masih mampu menyerap potensi risiko pasar dengan rasio kecukupan modal yang tetap tinggi.

Boks 2.2 | Ketahanan Likuiditas Perbankan di Tengah Segmentasi Pasar Pendanaan

Ketahanan likuiditas perbankan pada triwulan II 2026 tetap kuat dan memadai untuk mendukung intermediasi, meskipun ruang likuiditas mulai menurun sejalan dengan akselerasi pertumbuhan kredit. Pada Juni 2026, kredit perbankan tumbuh sebesar 12,67% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan DPK sebesar 10,21% (yoy). Kinerja penghimpunan dana tetap terjaga pada berbagai kelompok simpanan, termasuk membaiknya pertumbuhan simpanan ritel, penempatan dana Pemerintah pada kelompok bank BUMN, dan pemanfaatan sumber pendanaan non-DPK. Secara agregat, ketahanan likuiditas tetap memadai, tecermin dari rasio *Loan-to-Deposit Ratio* (LDR) sebesar 88,32%, serta rasio AL/NCD dan AL/DPK masing-masing sebesar 101,92% dan 23,08%, jauh di atas *threshold* minimum masing-masing sebesar 50% dan 10%.

Akselerasi kredit yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan sumber pendanaan menunjukkan bahwa ruang pendanaan perbankan relatif menyempit dibandingkan dengan periode sebelumnya. Perkembangan *funding surplus/(gap)*⁹ menunjukkan bahwa pertumbuhan *broad funding* yang mencakup DPK dan pendanaan non-DPK, belum sepenuhnya mengimbangi peningkatan kebutuhan pembiayaan pada triwulan II 2026 (Grafik B2.2.1). Kondisi ini belum mengindikasikan tekanan likuiditas secara agregat, tetapi menunjukkan bahwa keberlanjutan ekspansi kredit semakin memerlukan penguatan dan diversifikasi sumber pendanaan perbankan.

⁹ *Funding Surplus/(Gap)* dihitung sebagai selisih antara pertumbuhan sumber pendanaan secara luas (*broad funding*) yang terdiri atas DPK dan pendanaan non-DPK (SSB dan PYD), dengan pertumbuhan kredit. menunjukkan kemampuan pertumbuhan sumber pendanaan dalam mengimbangi peningkatan kebutuhan pembiayaan.



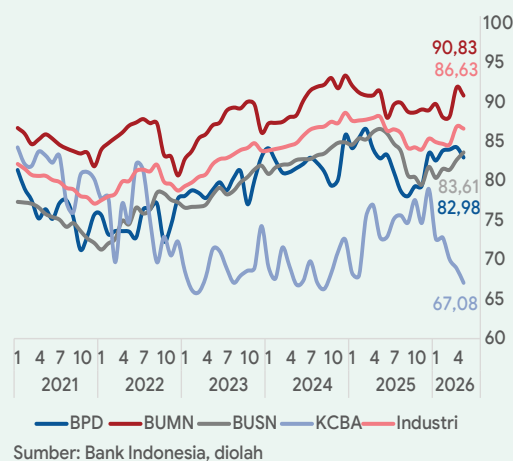
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik B2.2.1. Funding Surplus/(Gap) Perbankan

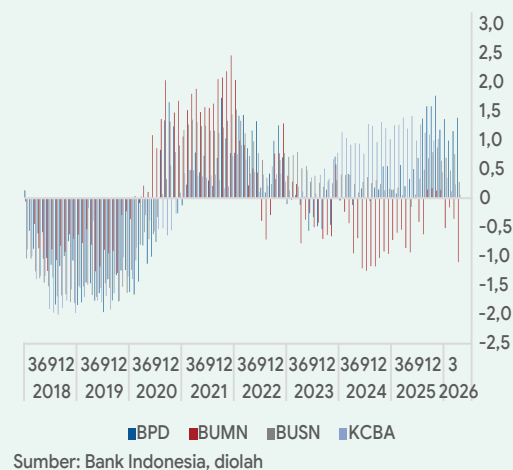
Distribusi likuiditas dan biaya dana belum sepenuhnya merata antarbank akibat adanya indikasi *market imperfection* pada pasar pendanaan, di tengah kondisi likuiditas agregat yang memadai. Diversifikasi dana masyarakat yang beralih pada berbagai alternatif instrumen keuangan dengan imbal hasil yang kompetitif, seperti SBN ritel, reksa dana pasar uang, dan instrumen investasi lainnya, meningkatkan kompetisi perbankan dalam mempertahankan DPK. Di saat yang sama, ketergantungan sebagian bank terhadap deposan besar mendorong penggunaan suku bunga khusus (*special rate*) sehingga biaya penghimpunan dana dan kemampuan memperoleh pendanaan menjadi berbeda antarbank. Kondisi ini menciptakan segmentasi pasar pendanaan, yaitu likuiditas yang secara agregat tetap memadai namun belum dapat dialokasikan secara merata kepada bank yang memiliki kebutuhan pendanaan lebih tinggi. Di sisi lain, terdapat indikasi pergeseran sebagian DPK Rupiah ke DPK valas seiring dengan meningkatnya preferensi nasabah terhadap aset berdenominasi valas di tengah pelemahan nilai tukar Rupiah dan tingginya ketidakpastian global.

Heterogenitas kondisi likuiditas antarbank yang tidak merata tercermin pada perbedaan LDR dan konsentrasi likuiditas antarkelompok bank. Variasi LDR menunjukkan perbedaan optimalisasi pemanfaatan sumber pendanaan untuk ekspansi kredit (Grafik B2.2.2) sementara Indeks Konsentrasi Likuiditas¹⁰ yang bervariasi menunjukkan distribusi cadangan likuiditas yang berbeda antarkelompok bank (Grafik B2.2.3). Dalam kaitan ini, *market imperfection* pada pasar pendanaan lebih merupakan persoalan distribusi dan biaya likuiditas daripada kekurangan likuiditas secara agregat. Walaupun demikian, kondisi tersebut belum mengindikasikan adanya tekanan ataupun kerentanan likuiditas, mengingat seluruh kelompok bank secara umum masih memiliki cadangan likuiditas yang memadai.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa penguatan ketahanan likuiditas tidak hanya memerlukan kecukupan likuiditas secara agregat, tetapi juga peningkatan fleksibilitas dan efisiensi distribusi likuiditas antarbank. Dalam hal ini, Bank Indonesia terus menjaga kecukupan likuiditas pasar uang dan perbankan serta memperkuat fleksibilitas pengelolaan pendanaan. Operasi moneter diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas secara terukur dan mendukung kelancaran distribusi likuiditas dalam sistem keuangan. Selain itu, kebijakan makroprudensial terus diperkuat untuk meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas dan sumber pendanaan perbankan, antara lain melalui reformulasi RIM dan peningkatan batas RPLN bank dari 35% menjadi 40% yang berlaku efektif sejak 1 Juli 2026, dan penyempurnaan KLM yang diarahkan untuk mendorong intermediasi sekaligus mengurangi segmentasi likuiditas di pasar uang dan perbankan.



Grafik B2.2.2. Perkembangan LDR Berdasarkan Kelompok Bank



Grafik B2.2.3. Indeks Konsentrasi Likuiditas (Z-Score) Berdasarkan Kelompok Bank

¹⁰ Indeks Konsentrasi Likuiditas (Z-Score) didapatkan dari persamaan pangsa likuiditas masing-masing kelompok bank terhadap total likuiditas industri. Nilai indeks kemudian dinormalisasi menjadi z-score untuk menunjukkan deviasi konsentrasi likuiditas setiap kelompok bank terhadap rata-rata historisnya.

Bab 3

INTERMEDIASI KEUANGAN TERUS TUMBUH DI TENGAH DINAMIKA PERMINTAAN PEMBIAYAAN

Intermediasi perbankan menguat pada semester I 2026, didukung oleh kapasitas pendanaan yang tetap memadai dan akselerasi kredit investasi (KI) sebagai kontributor utama pertumbuhan kredit. Kredit tumbuh 12,67% (yoy) pada Juni 2026, ditopang oleh KI sebesar 24,90% (yoy) dengan kontribusi 55,25% terhadap pertumbuhan kredit agregat. Kredit Modal Kerja (KMK) juga membaik menjadi 8,94% (yoy), sejalan dengan meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk aktivitas operasional di sejumlah sektor. Kapasitas pembiayaan perbankan tetap memadai, ditopang oleh pertumbuhan DPK sebesar 10,21% (yoy), diversifikasi sumber pendanaan melalui optimalisasi *funding mix* dan pendanaan non-DPK, serta pengelolaan alokasi aset dengan tetap menjaga kecukupan likuiditas.

Di tengah kapasitas pendanaan perbankan yang tetap memadai, permintaan kredit korporasi dan rumah tangga belum menguat secara merata. Korporasi masih mengutamakan dana internal dengan porsi sebesar 63,8% pada akhir triwulan I 2026. Hal ini sejalan dengan *Business Confidence Index* (BCI) yang berada di bawah level 100 (99,84 per Juni 2026) dan mengindikasikan kehati-hatian korporasi dalam melakukan ekspansi dan memanfaatkan pembiayaan eksternal. Pada sisi rumah tangga, tekanan daya

beli kelas menengah bawah masih berlangsung, sejalan dengan perlambatan pertumbuhan kredit konsumsi menjadi 5,14% (yoy) pada Juni 2026 dari sebelumnya 8,95% (yoy) di Juni 2025. Ke depan, penguatan keyakinan korporasi untuk melakukan ekspansi dan perbaikan daya beli rumah tangga berpotensi mendorong permintaan kredit yang lebih kuat dan merata.

Pembiayaan nonbank dan pasar modal melengkapi intermediasi perbankan sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi perekonomian. Pembiayaan nonbank, baik yang disalurkan oleh Perusahaan Pembiayaan (PP), pegadaian, maupun melalui pindar, tetap tumbuh positif dengan perkembangan bervariasi antarsegmen. Pertumbuhan ditopang oleh Pegadaian dan pindar, sedangkan PP tumbuh lebih moderat. Sementara itu, penghimpunan dana korporasi melalui pasar modal, baik melalui penawaran umum saham melalui *Initial Public Offering* (IPO) dan *rights issue*, maupun penerbitan Efek Bersifat Utang dan Sukuk (EBUS) tetap berlanjut meski lebih terbatas dibandingkan dengan periode sebelumnya, seiring dengan meningkatnya biaya pendanaan dan volatilitas pasar keuangan.

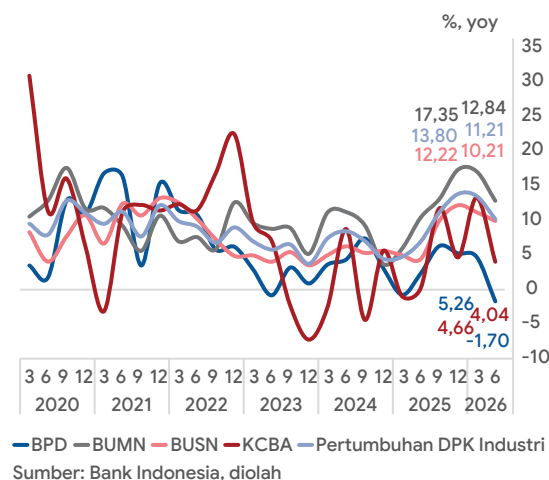
3.1

Kapasitas Perbankan Tetap Memadai dalam Mendukung Pertumbuhan Intermediasi

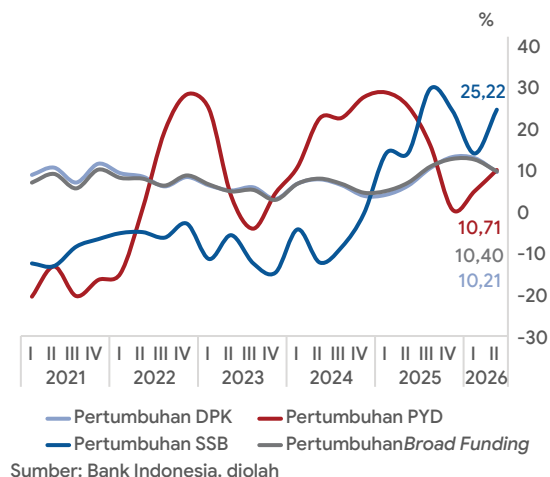
Kapasitas pendanaan perbankan tetap kuat untuk mendukung pertumbuhan intermediasi. Pertumbuhan DPK tetap tinggi sebesar 10,21% (yoy) pada Juni 2026, didukung oleh penghimpunan dana masyarakat yang tetap baik serta penempatan dana Pemerintah pada kelompok bank BUMN yang masih berlanjut (Grafik 3.1.1). DPK tetap tumbuh positif sejalan dengan berlanjutnya aktivitas penyaluran kredit, antara lain melalui proses *funding liquidity creation*¹¹ yang berjalan seiring dengan aktivitas intermediasi. Selain penciptaan likuiditas secara alamiah (*natural creation*), penempatan dana Pemerintah pada kelompok bank BUMN sejak triwulan III 2025 turut memperkuat kapasitas pendanaan perbankan.

Pendanaan dalam arti luas (*broad funding*) juga tetap meningkat, mencerminkan terjaganya kapasitas pendanaan perbankan. Pertumbuhan positif dari *broad funding* didukung oleh kombinasi DPK dan sumber pendanaan non-DPK, seperti pinjaman yang diterima dan SSB yang diterbitkan (Grafik 3.1.2). Di sisi lain, strategi *funding mix* terus dioptimalkan melalui penghimpunan dana murah

11 *Funding liquidity creation* merupakan proses penciptaan likuiditas dana bank, di mana penyaluran kredit kemudian menyebabkan kembalinya dana yang disalurkan menjadi simpanan baru dalam sistem perbankan sejalan dengan berkembangnya nilai usaha yang dibiayai (*economic size*).



Grafik 3.1.1. Pertumbuhan DPK Berdasarkan Kelompok Bank

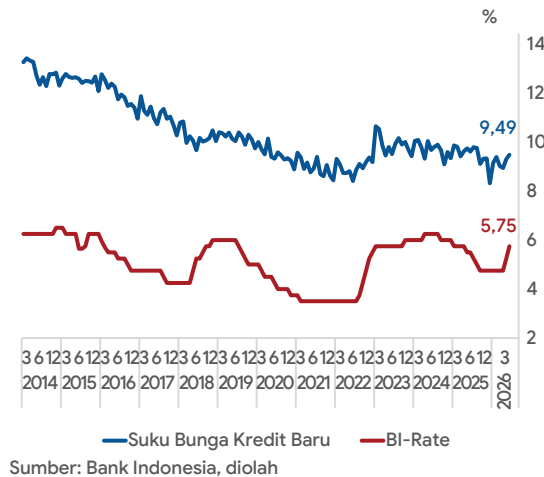


Grafik 3.1.2. Perkembangan Pendanaan Arti Luas (*Broad Funding*)

(*Current and Saving Account*) yang tetap kuat dan pertumbuhan deposito yang masih tinggi untuk mendukung kebutuhan pendanaan intermediasi. Diversifikasi sumber pendanaan melalui strategi *funding mix* tersebut memberikan fleksibilitas bagi perbankan dalam memenuhi kebutuhan pendanaan seiring dengan intermediasi perbankan yang masih meningkat.

Strategi optimalisasi pengelolaan struktur pendanaan memberikan ruang bagi perbankan untuk melakukan penyesuaian suku bunga kredit secara terukur guna menjaga daya saing penyaluran kredit. Di tengah kenaikan BI-Rate secara kumulatif sebesar 100 bps pada Mei-Juni 2026, perbankan melakukan penyesuaian suku bunga kredit dengan tetap mempertimbangkan kondisi biaya dana (*cost of fund*), persaingan pasar, dan keberlanjutan intermediasi. Suku bunga kredit pada Juni 2026 sedikit meningkat sebesar 8 bps dibandingkan dengan April 2026. Kenaikan yang relatif terbatas tersebut sejalan dengan upaya perbankan menjaga daya saing penyaluran kredit di tengah kenaikan suku bunga acuan (Grafik 3.1.3).

Pangsa DPK dengan *special rate* masih relatif tinggi di tengah meningkatnya kebutuhan dan persaingan penghimpunan dana. Hal ini tecermin dari meningkatnya pangsa DPK *special rate* terhadap



Grafik 3.1.3. Perkembangan BI-Rate dan Suku Bunga Kredit Baru Rupiah

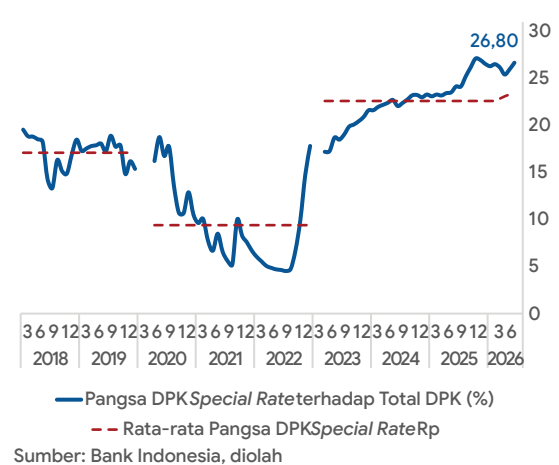
total DPK (Grafik 3.1.4). Kondisi tersebut membantu sebagian bank untuk mempertahankan sumber pendanaan dari nasabah inti, namun pada saat yang sama, dapat membatasi penurunan biaya dana bank. Implikasi peningkatan pangsa DPK *special rate* terhadap segmentasi pasar pendanaan telah dibahas lebih lanjut pada Boks 2.2.

Pengelolaan alokasi aset perbankan masih menyediakan ruang untuk mendukung target pertumbuhan kredit 2026 dengan kecukupan likuiditas agregat yang terjaga. Hal ini didukung oleh likuiditas perbankan yang masih memadai, sebagaimana tecermin dari AL/DPK dan LCR posisi Juni 2026, masing-masing sebesar 23,08% dan 183% (Tabel 3.1.1). Namun demikian, kapasitas pembiayaan antarkelompok bank relatif bervariasi,

Tabel 3.1.1. Rasio Likuiditas AL/DPK per Kelompok Bank

Kel. Bank	AL/DPK			LCR		
	Des-25	Mar-26	Jun-26	Des-25	Mar-26	Jun-26
BUMN	21,46%	19,50%	16,18%	142%	137%	123%
BUSN	33,17%	33,83%	27,25%	256%	249%	244%
BPD	29,23%	29,12%	25,61%	214%	200%	177%
KCBA	88,84%	85,77%	81,75%	307%	330%	304%
Industri	28,57%	27,85%	23,08%	201%	194%	183%

Sumber: Bank Indonesia, diolah

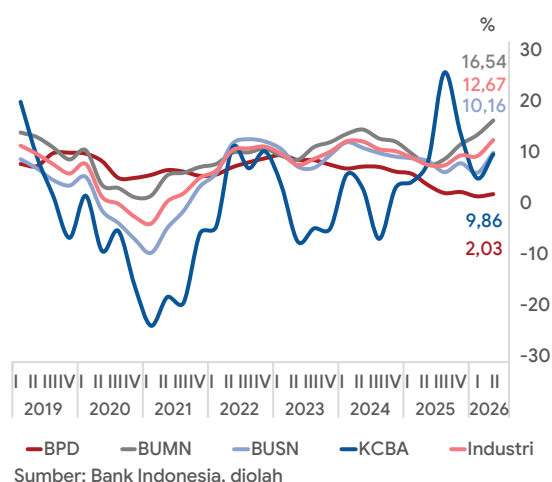


Grafik 3.1.4. Pangsa DPK Special Rate Rupiah terhadap Total DPK

yang mencerminkan perbedaan strategi pengelolaan neraca. Pada kelompok bank BUMN, pemanfaatan kapasitas intermediasi relatif lebih tinggi sejalan dengan pertumbuhan kredit yang kuat, sementara kelompok bank lainnya masih memiliki ruang yang lebih besar untuk meningkatkan penyaluran kredit. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa secara agregat perbankan memiliki kapasitas memadai untuk mendukung penguatan intermediasi lebih lanjut.

Kredit yang tumbuh tinggi, dapat menopang pertumbuhan ekonomi domestik. Kuatnya kinerja kredit didorong oleh mayoritas kelompok bank, terutama pada kelompok bank BUMN dan BUSN (Grafik 3.1.5). Pada Juni 2026, kredit tumbuh sebesar 12,67% (yoy), didorong oleh kelompok bank BUMN yang tumbuh kuat sebesar 16,54% (yoy). Selain itu, BUSN dan KCBA turut menunjukkan tren perbaikan kinerja kredit tahunan. Sementara itu, kinerja penyaluran kredit dari kelompok BPD cenderung tertahan, namun masih tumbuh positif sebesar 2,03% (yoy) pada Juni 2026.

Pertumbuhan kredit yang menguat terutama ditopang oleh akselerasi KI, disertai dengan membaiknya pertumbuhan KMK. KI tumbuh tinggi pada Juni 2026 sebesar 24,90% (yoy) dan memberikan kontribusi dominan sebesar 55,25% terhadap pertumbuhan kredit agregat. Peningkatan pertumbuhan KI bersumber dari hampir seluruh sektor ekonomi, kecuali sektor Pertanian. Oleh karena itu, terdapat potensi peningkatan kebutuhan



Grafik 3.1.5. Pertumbuhan Kredit Berdasarkan Kelompok Bank

pembiayaan untuk ekspansi kapasitas produksi di berbagai sektor (Tabel 3.1.2). Sementara itu, KMK tumbuh sebesar 8,94% (yoy) terutama didorong oleh sektor Jasa Dunia Usaha (JDU), Industri Pengolahan, Pertambangan, dan Konstruksi. Perbaikan KMK tersebut menjadi indikasi awal dari meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk mendukung aktivitas operasional dunia usaha, meskipun belum setinggi pertumbuhan kredit investasi.

Akselerasi KI membuka peluang bagi peningkatan aktivitas operasional di sektor terkait pada fase selanjutnya. Seiring dengan investasi yang dibiayai memasuki tahap operasional, kebutuhan pembiayaan untuk modal kerja berpotensi meningkat guna mendukung produksi, pengadaan input, distribusi,

dan aktivitas usaha terkait. Dalam hal ini, pertumbuhan KI yang tinggi, termasuk yang terkait dengan program prioritas Pemerintah, berpotensi diikuti dengan peningkatan KMK pada fase selanjutnya, meskipun besarnya akan bergantung pada realisasi proyek dan elastisitas permintaan KMK di masing-masing sektor dimaksud.

Di tengah akselerasi KI dan perbaikan KMK, pertumbuhan Kredit Konsumsi (KK) pada seluruh segmen perlu terus didorong. KPR dan Kredit Multiguna (KMG) pada Juni 2026 masing-masing tumbuh sebesar 4,65% (yoy) dan 8,56% (yoy), lebih rendah dibandingkan realisasi Maret 2026. Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) juga melanjutkan tren pelemahan dan berkontraksi lebih dalam sebesar 9,72% (yoy). Perlambatan KK mengindikasikan bahwa permintaan pembiayaan rumah tangga masih tertahan, sejalan dengan tekanan daya beli masyarakat dan sikap kehati-hatian masyarakat dalam mengambil pembiayaan baru.

Kondisi *lending appetite* perbankan secara umum masih mendukung intermediasi. Secara umum, Indeks *Lending Requirement* (ILR) masih dalam zona longgar, seiring risiko kredit perbankan yang terjaga dengan tren rasio *Loan at Risk* (LaR) yang menurun. ILR yang relatif lebih longgar utamanya tercatat pada KI dan KMK sejalan dengan kuatnya pertumbuhan KI dan membaiknya pertumbuhan KMK. Secara sektoral, mayoritas sektor ekonomi berada di zona ILR longgar dan mengalami perbaikan *lending appetite*, sementara sektor Pertanian dan segmen

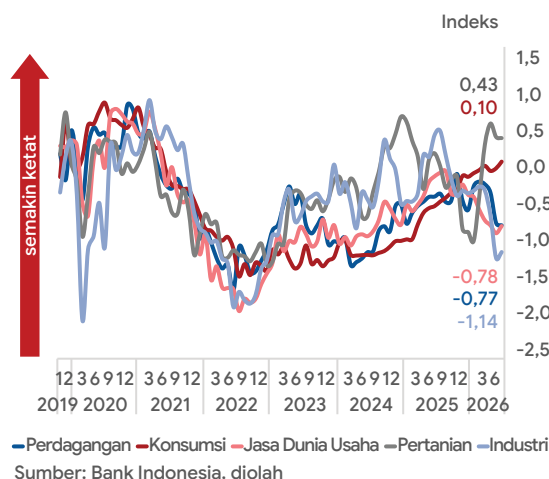
Tabel 3.1.2. Pertumbuhan Kredit Sektoral

Sektor Ekonomi	Pertumbuhan (%. yoy)		Pertumbuhan (%. ytd)		Total Pertumbuhan (trn Rp)	
	Jun-25	Jun-26	Jun-25	Jun-26	Jun-25	Jun-26
A. Pertanian	5,11	4,09	-3,43	-5,72	-0,01	0,32
B. Pertambangan	20,69	10,14	5,48	8,39	2,41	-4,95
C. Industri	6,13	15,94	1,06	10,59	0,16	2,25
D. Listrik, gas	11,23	30,33	1,87	-1,76	-3,83	2,89
E. Konstruksi	1,05	46,72	0,6	15,45	0,29	2,01
F. Perdagangan	2,13	6	2,28	4,2	1,96	2,62
G. Pengangkutan	17,94	10,42	9,2	7,88	2,29	4,31
H. Jasa Dunia Usaha	5,27	17,24	1,74	8,72	1,4	4,35
I. Jasa Sosial	24,46	28,4	7,4	16,35	-1,47	4,17
J. Lain-lain	8,49	5,75	2,76	1,96	0,72	0,58
Total	7,77	12,67	2,91	5,77	0,78	1,83

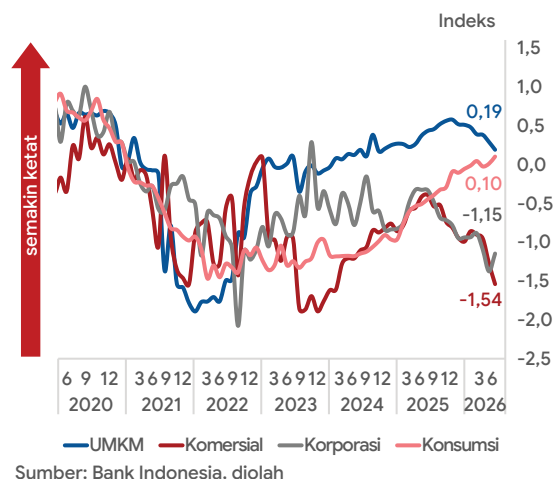
Sumber: Bank Indonesia, diolah

konsumsi masih relatif ketat (Grafik 3.1.6 dan 3.1.7). Pada sektor Pertanian, *lending appetite* yang relatif ketat terjadi bersamaan dengan *credit gap* negatif yang menunjukkan masih adanya ruang peningkatan intermediasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang intermediasi dipengaruhi baik oleh faktor permintaan maupun penawaran kredit. Pendalaman mengenai keterkaitan *credit gap*, *lending appetite*, dan ruang intermediasi sektoral disajikan pada Boks 3.1.

Kapasitas intermediasi perbankan terus diperkuat melalui diversifikasi sumber pendanaan di luar DPK. Kapasitas pendanaan yang tersedia selanjutnya memberikan fleksibilitas bagi bank dalam menyalurkan pembiayaan kepada sektor riil, baik melalui kredit maupun kanal pembiayaan nonkredit, termasuk kepemilikan surat berharga korporasi. Pendalaman mengenai diversifikasi sumber pendanaan dan kanal pembiayaan tersebut disajikan pada Boks 3.2.



Grafik 3.1.6. ILR Sektoral

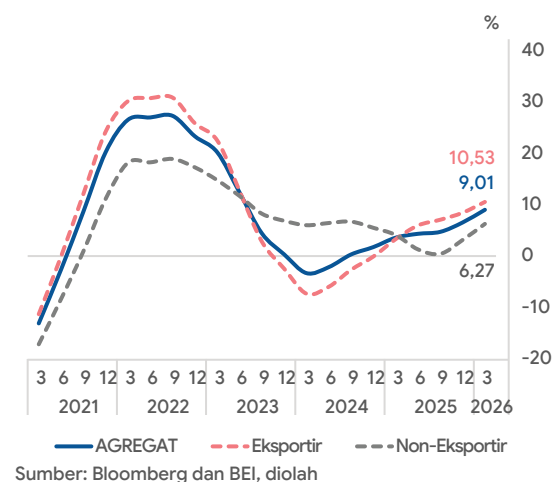


Grafik 3.1.7. ILR per Segmen

3.2

Permintaan Pembiayaan Korporasi dan Rumah Tangga Belum Menguat Secara Merata

Kinerja korporasi secara umum masih positif, meskipun perkembangannya bervariasi antarsektor di tengah ketidakpastian yang masih tinggi. Penjualan korporasi tercatat tumbuh sebesar 9,01% (yoy) pada triwulan I 2026, meningkat dari capaian pada akhir 2025 yang tumbuh sebesar 6,54% (yoy) (Tabel 3.2.1). Perkembangan tersebut, antara lain ditopang oleh kinerja korporasi berorientasi ekspor yang mencatat pertumbuhan penjualan sebesar 10,53% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan korporasi secara agregat (Grafik 3.2.1 dan 3.2.2). Hasil survei kegiatan dunia usaha juga menunjukkan kegiatan usaha pada sejumlah sektor masih berada



Grafik 3.2.1. Pertumbuhan Penjualan Korporasi Nonkeuangan Agregat dan Berdasarkan Orientasi Penjualan

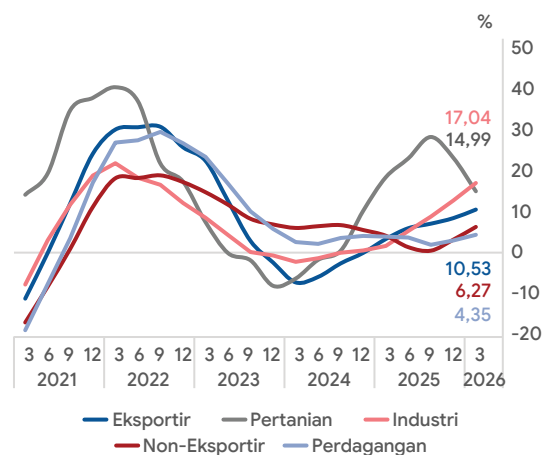
Tabel 3.2.1. Perkembangan Penjualan, Profitabilitas dan Capex Korporasi Menurut Sektor

Sektor	Pertumbuhan Penjualan (%yoy)					Kontribusi Penjualan (%)	Tren 4 Y	Return on Equity (%)					Tren 4 Y	Pertumbuhan Capex (% yoy)					Kontribusi Capex (%)	Tren 4 Y
	2022	2023	2024	2025	2026			2022	2023	2024	2025	2026		2022	2023	2024	2025	2026		
	Des	Des	Des	Des	Mar			Des	Des	Des	Des	Mar		Des	Des	Des	Des	Mar		
Pertanian	17,38	-8,19	10,20	23,19	14,99	0,85		15,29	6,64	9,80	11,94	11,99		33,52	16,64	-10,92	16,75	20,84	0,73	
Pertambangan	67,89	-5,66	-3,69	-1,80	1,54	0,28		36,53	20,20	15,93	10,29	11,68		60,26	35,40	17,70	20,21	4,78	1,55	
Industri Pengolahan	12,15	-0,72	0,49	12,74	17,04	6,48		9,40	9,15	7,94	11,39	11,79		13,97	23,38	20,44	9,38	11,32	2,76	
LGA	18,51	7,43	8,38	5,27	4,48	0,10		9,49	8,61	8,88	6,27	6,62		-39,40	23,90	43,62	21,68	6,07	0,13	
Konstruksi	15,13	10,70	2,34	-8,41	-6,28	-0,33		1,99	1,52	5,44	-2,96	-2,58		-37,94	18,87	1,93	-22,99	-31,54	-1,68	
Perdagangan	26,81	5,77	4,05	2,95	4,35	0,71		18,85	15,42	14,17	11,88	11,22		58,45	68,01	-12,45	0,04	-5,30	-0,43	
Pengangkutan	20,58	8,39	6,47	3,78	5,10	0,48		39,26	15,76	12,63	6,97	6,73		13,00	0,14	-12,74	2,61	3,95	0,78	
Jasa Dunia Usaha	26,20	4,36	2,17	8,58	13,61	0,42		7,23	2,32	2,81	5,73	5,80		16,25	9,60	14,70	45,20	37,43	0,53	
Jasa Sosial	-2,71	-8,88	6,88	6,88	7,88	0,18		5,59	-0,10	5,23	6,89	5,01		19,17	7,84	-7,47	-6,11	-2,26	-0,07	
Grand Total	23,29	0,33	1,75	6,54	9,01	9,01		15,71	10,25	9,69	8,29	8,60		16,69	21,02	5,27	9,48	4,29	4,29	

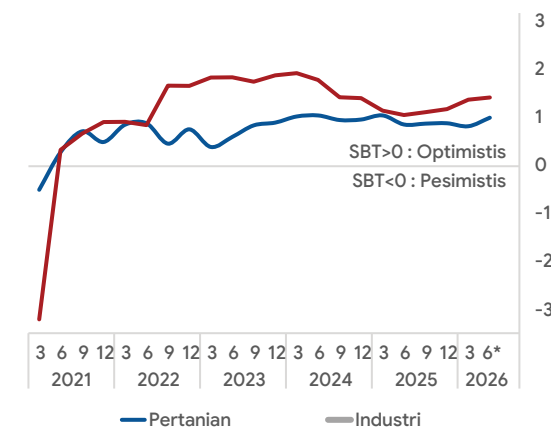
Sumber: Bloomberg dan BEI, diolah

pada zona positif hingga pertengahan 2026 (Grafik 3.2.3). Namun demikian, perbaikan kinerja belum terjadi secara merata, sebagaimana tecermin dari penjualan sektor Konstruksi yang masih berkontraksi di tengah meningkatnya Indeks Harga Perdagangan Besar Konstruksi (Grafik 3.2.4).

Sejalan dengan perkembangan penjualan, profitabilitas korporasi tetap terjaga dengan aktivitas investasi yang masih berlanjut. Terjaganya profitabilitas korporasi tecermin dari pencapaian *Return on Equity* (ROE) sebesar 8,60% sementara belanja modal (*Capital Expenditure/capex*) tumbuh

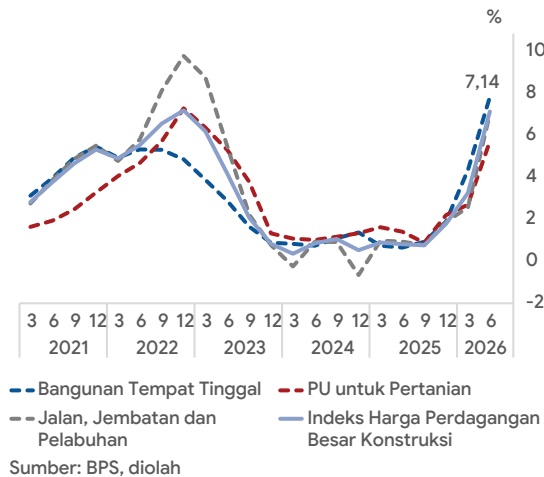


Sumber: Bloomberg dan BEI, diolah

Grafik 3.2.2. Pertumbuhan Penjualan Korporasi Nonkeuangan Berdasarkan Orientasi Penjualan pada Sektor Utama

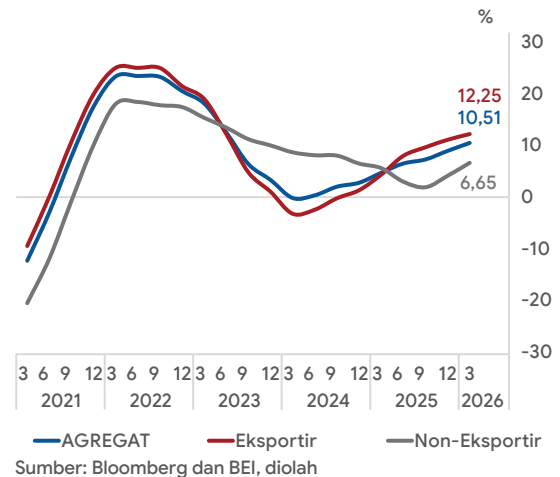
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 3.2.3. Saldo Bersih Tertimbang untuk Lapangan Usaha Pertanian dan Perdagangan



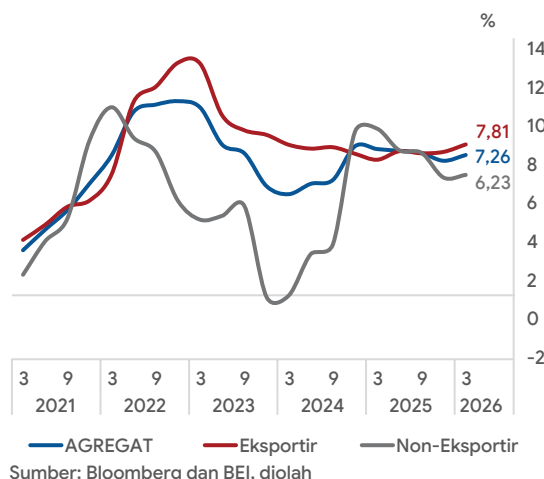
Grafik 3.2.4. Pertumbuhan Indeks Harga Perdagangan Besar Bahan Bangunan/Konstruksi Indonesia

sebesar 4,29% (yoy), terutama pada sektor Industri Pengolahan dan Pertambangan. Kinerja korporasi eksportir juga relatif terjaga dengan *Net Profit Margin* (NPM) yang masih lebih tinggi dibandingkan korporasi secara agregat, meskipun tekanan biaya produksi meningkat (Grafik 3.2.5 dan Grafik 3.2.6). Ke depan, kenaikan biaya distribusi serta risiko pelemahan permintaan dan harga komoditas global tetap perlu dicermati karena berpotensi menekan profitabilitas, terutama pada korporasi berorientasi ekspor.

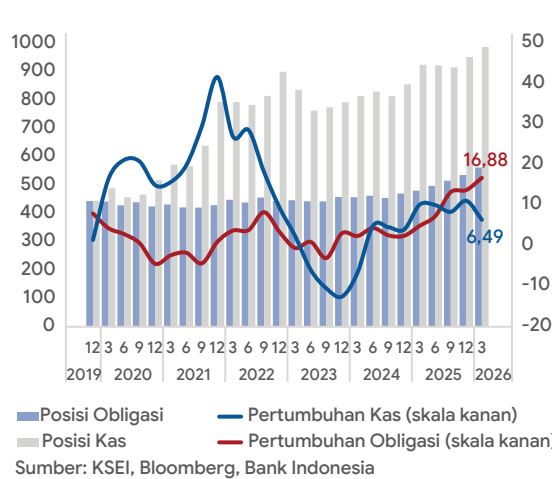


Grafik 3.2.6. Pertumbuhan Biaya Produksi Korporasi Berdasarkan Orientasi Penjualan

Struktur pembiayaan korporasi masih didominasi dana internal seiring dengan kondisi likuiditas korporasi yang masih kuat. Porsi dana internal masih mendominasi struktur pembiayaan korporasi, yaitu 63,8% pada triwulan I 2026 (Tabel 3.2.2). Selain mengandalkan dana internal, korporasi terpantau meningkatkan penerbitan obligasi yang tumbuh sebesar 16,88% (yoy) pada periode yang sama (Grafik 3.2.7). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa sumber pembiayaan internal masih dominan,



Grafik 3.2.5. Margin Keuntungan Bersih Korporasi Berdasarkan Orientasi Penjualan



Grafik 3.2.7. Posisi Kas dan Pembiayaan Obligasi Korporasi

Tabel 3.2.2. Perkembangan Porsi Pembiayaan Internal dan Kredit Bank dalam Struktur Pembiayaan Korporasi

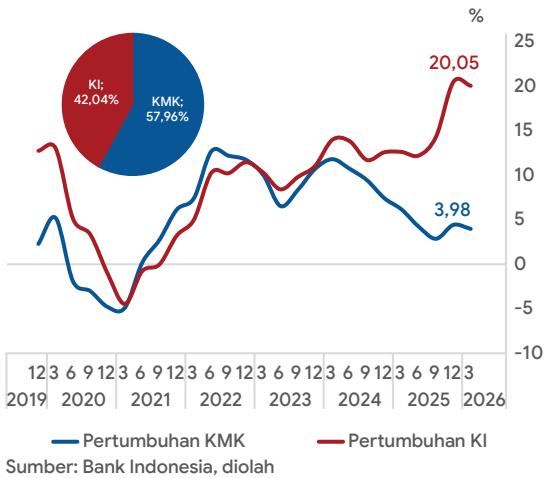
SEKTOR	KOMPONEN	2024	2025	2026-03	TREN 6Y
AGREGAT (n=760 korporasi)	Total Capital (Rp triliun)	5.431,13	5.771,33	6.053,31	
	Internal Financing (% Capital)	61,6%	62,3%	63,8%	
	Debt (% Capital)	38,4%	37,7%	36,2%	
	of which Bank Debt (% Capital)	13,6%	13,1%	11,0%	

Sumber: Bloomberg, S&P Capital IQ dan Bursa Efek Indonesia, diolah

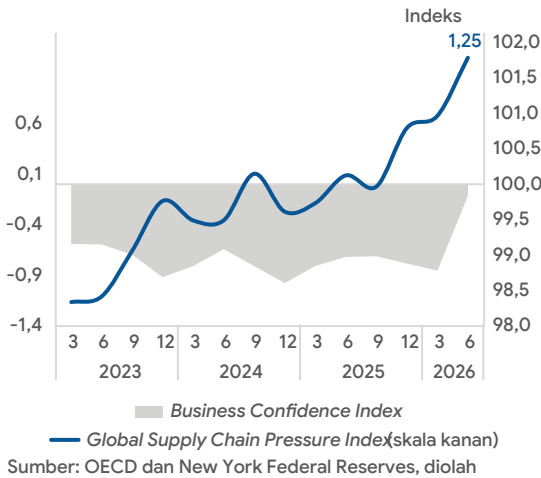
sementara alternatif pembiayaan eksternal tetap dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan korporasi.

Pertumbuhan pembiayaan produktif belum menguat secara merata, sebagaimana tecermin dari perbedaan perkembangan KI dan KMK. Di satu sisi, pertumbuhan KI tetap tinggi sejalan dengan realisasi kontrak dan komitmen investasi yang telah berjalan serta berlanjutnya realisasi sejumlah program Pemerintah. Sementara itu, KMK tumbuh lebih moderat dibandingkan KI, mengindikasikan bahwa

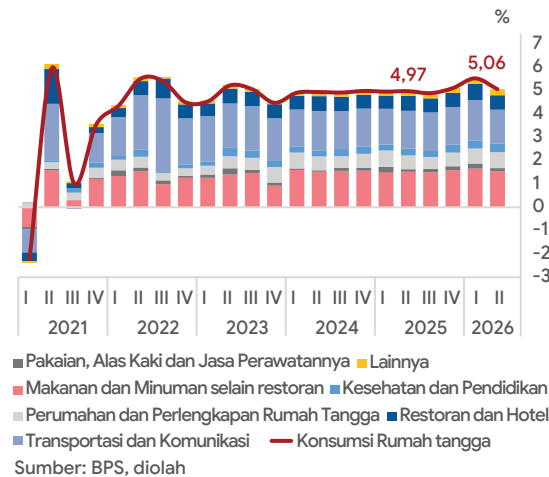
kebutuhan pembiayaan untuk aktivitas operasional belum meningkat sekuat kebutuhan investasi (Grafik 3.2.8). Pola tersebut berlangsung di tengah tingkat keyakinan usaha yang masih relatif terbatas, sebagaimana tecermin dari *Business Confidence Index* sebesar 99,84 pada Juni 2026 yang sedikit di bawah level 100, dan meningkatnya tekanan rantai pasok global (Grafik 3.2.9). Ke depan, seiring dengan investasi yang mulai memasuki tahap operasional, kebutuhan KMK berpotensi meningkat, walaupun perkembangannya tetap bergantung pada realisasi proyek, kondisi usaha, dan permintaan.



Grafik 3.2.8. Pertumbuhan Pembiayaan Produktif: Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja

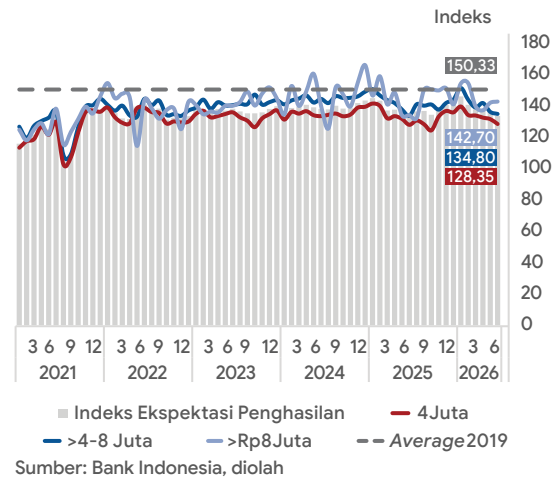


Grafik 3.2.9. Business Confidence Index Indonesia dan Global Supply Chain Pressure Index



Grafik 3.2.10. Konsumsi Rumah Tangga Berdasarkan Kelompok Pengeluaran

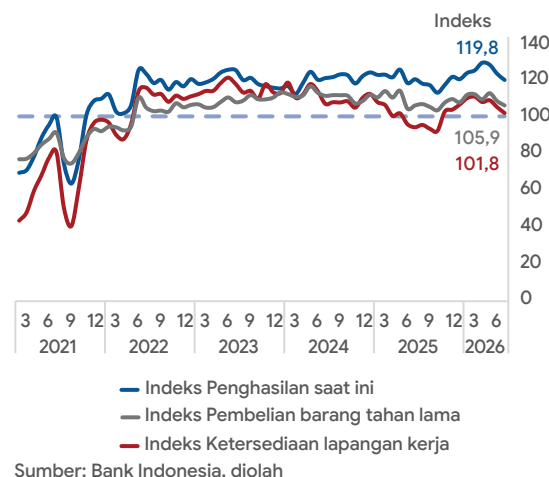
Dari sisi rumah tangga, konsumsi tetap tumbuh, meskipun pemulihan daya beli belum merata terutama pada kelompok menengah bawah. Konsumsi rumah tangga masih tumbuh 5,06% (yoy) pada triwulan II 2026, lebih tinggi dari triwulan II 2025 sebesar 4,97% (yoy). Pertumbuhan konsumsi pada triwulan II 2026 didorong oleh kategori transportasi dan komunikasi, serta makanan dan minuman selain restoran (Grafik 3.2.10). Namun demikian, daya beli rumah tangga khususnya kelas menengah bawah masih melemah, tecermin dari indeks keyakinan konsumen yang menurun (Grafik 3.2.11), serta indeks ekspektasi penghasilan yang relatif menurun dan berada di bawah kondisi prapandemi (Grafik



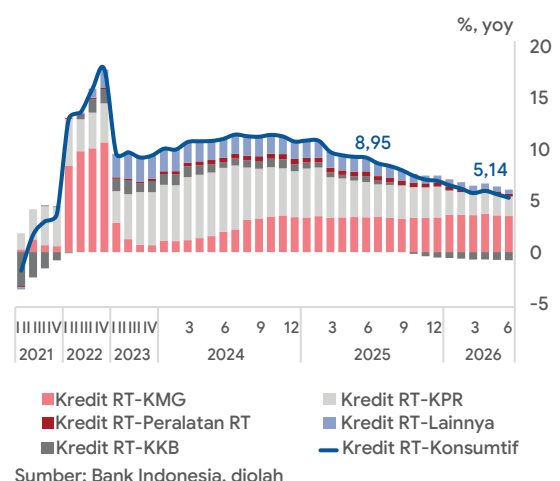
Grafik 3.2.12. Perkembangan Indeks Ekspektasi Penghasilan

3.2.12). Kondisi tersebut berlangsung di tengah masih tingginya pangsa tenaga kerja informal sebesar 59,42% dengan tingkat upah yang lebih rendah dan jaminan sosial yang relatif terbatas dibandingkan dengan tenaga kerja formal.

Di tengah tekanan daya beli pada sebagian kelompok rumah tangga, kredit konsumsi rumah tangga tumbuh melambat. Kredit konsumsi rumah tangga tumbuh melambat dari sebesar 8,95% (yoy) pada Juni 2025 menjadi sebesar 5,14% (yoy) pada Juni 2026 (Grafik 3.2.13). Perlambatan pertumbuhan ini terutama dikonstruibusikan oleh segmen KPR seiring dengan melemahnya permintaan KPR nonsubsidi,



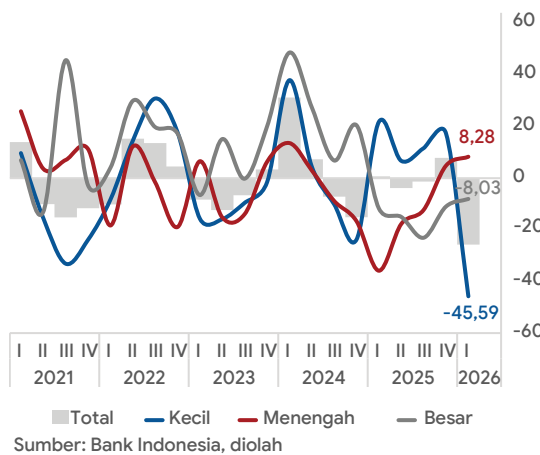
Grafik 3.2.11. Perkembangan Indeks Keyakinan Konsumen



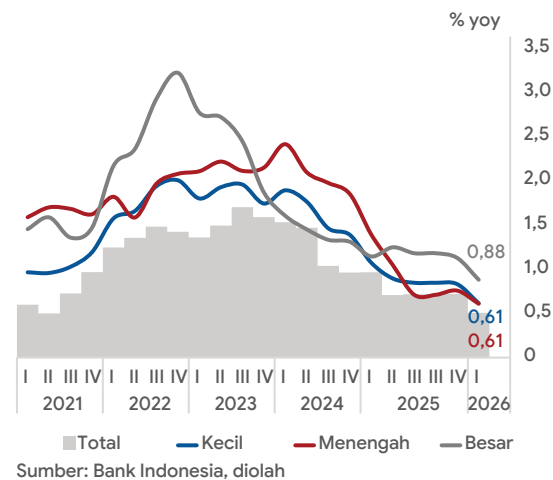
Grafik 3.2.13. Andil Pertumbuhan KK Rumah Tangga Menurut Jenis Kredit

perlambatan pertumbuhan penjualan properti residensial (Grafik 3.2.14), dan perlambatan indeks harga properti residensial (IHPR) pada triwulan I 2026 (Grafik 3.2.15). Di sisi lain, pertumbuhan KMG

mengalami peningkatan dan turut menopang pertumbuhan kredit konsumsi, sejalan dengan fleksibilitas penggunaannya untuk memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga.



Grafik 3.2.14. Pertumbuhan Penjualan Rumah



Grafik 3.2.15. Pertumbuhan IHPR Primer

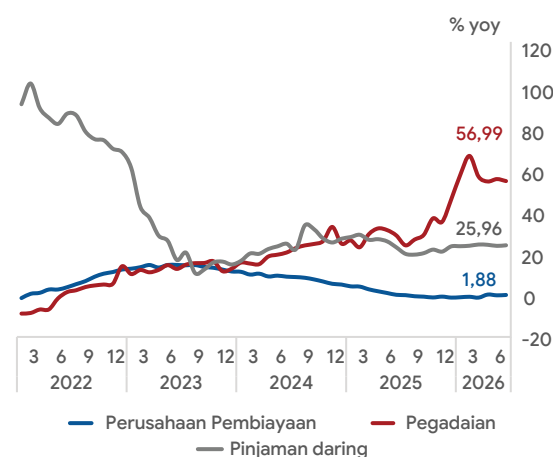
3.3

Dukungan Industri Keuangan Non-Bank dan Pasar Modal untuk Pembiayaan Perekonomian

Pembiayaan IKNB¹² dan pasar modal melengkapi intermediasi perbankan sebagai sumber pembiayaan alternatif bagi perekonomian, dengan perkembangan yang bervariasi. Pembiayaan yang bersumber dari nonbank (PP, Pegadaian, dan Pindar) dan pasar modal semakin berperan dalam menopang pembiayaan perekonomian. Pembiayaan nonbank tumbuh positif dengan perkembangan yang bervariasi antarsegmen. Sementara itu, penghimpunan dana korporasi melalui pasar modal tetap berlanjut, meskipun relatif lebih terbatas dibandingkan periode sebelumnya di tengah meningkatnya biaya pendanaan dan volatilitas pasar keuangan.

Pembiayaan nonbank tetap tumbuh positif dengan perkembangan bervariasi antarsegmen. PP yang saat ini memiliki pangsa terbesar dalam pembiayaan IKNB tumbuh sebesar 1,88% (yoy) pada Juni 2026 (Grafik 3.3.1). Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dengan industri, pertumbuhan PP yang relatif moderat, antara lain dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang masih terbatas dan penerapan kebijakan penyaluran pembiayaan yang

lebih selektif (*selective lending*) oleh PP. Sementara itu, pindar tercatat mengalami pertumbuhan pembiayaan sebesar 25,96% (yoy) pada Juni 2026, terutama pada segmen konsumtif dan pelaku UMKM, termasuk kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau layanan perbankan.



Grafik 3.3.1. Perkembangan Pembiayaan Nonbank

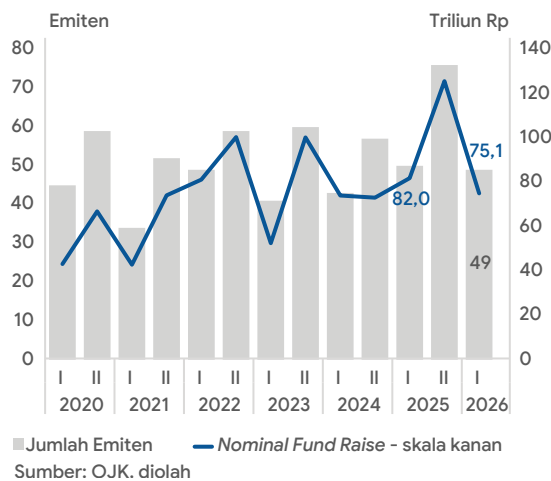
12 Selanjutnya disebut nonbank

Akselerasi pembiayaan pegadaian menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan pembiayaan nonbank. Pembiayaan pegadaian mencatatkan pertumbuhan tertinggi di antara segmen pembiayaan nonbank, yaitu sebesar 56,99% (yoy) pada Juni 2026, melanjutkan akselerasi sejak pertengahan 2025. Perkembangan ini sejalan dengan peningkatan penyaluran produk gadai dengan agunan emas dan tren apresiasi harga emas. Meski demikian, keberlanjutan pertumbuhan pembiayaan nonbank tetap dipengaruhi oleh perkembangan biaya pendanaan terutama terjadi pada lembaga nonbank yang memiliki ketergantungan relatif tinggi terhadap pendanaan perbankan.

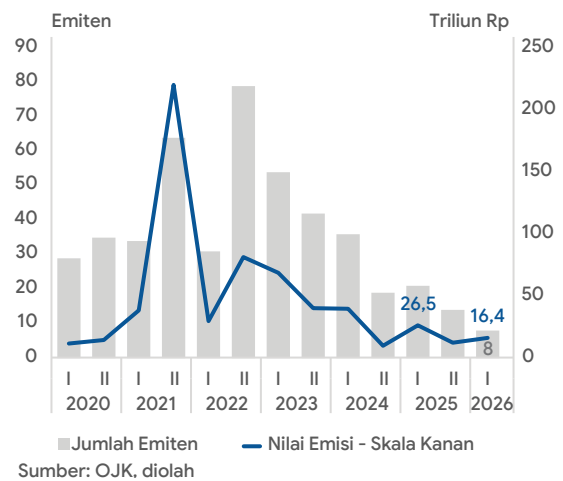
Penghimpunan dana korporasi melalui pasar obligasi masih tetap berlanjut, meski lebih terbatas dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penghimpunan dana melalui penerbitan EBUS pada semester I 2026 tercatat sebesar Rp75,1 triliun dari 49 emiten, lebih rendah dibandingkan semester I 2025 sebesar Rp82,0 triliun (Grafik 3.3.2). Perkembangan tersebut berlangsung di tengah kenaikan *yield* obligasi korporasi dan meningkatnya biaya pendanaan. Secara sektoral, penerbitan EBUS masih didominasi oleh sektor

keuangan, properti, bahan baku, dan energi. Walaupun penerbitannya saat ini lebih terbatas, pasar obligasi tetap menyediakan alternatif pendanaan bagi korporasi di luar kredit perbankan.

Di sisi lain, aktivitas penghimpunan dana melalui pasar saham relatif terbatas. Penghimpunan dana melalui penawaran umum saham, baik melalui penawaran umum perdana (IPO) maupun penawaran umum terbatas (*rights issue*), tercatat sebesar Rp16,4 triliun pada semester I 2026, lebih rendah dibandingkan semester I 2025 sebesar Rp26,5 triliun (Grafik 3.3.3). Sejalan dengan tekanan yang terjadi di pasar saham sebagaimana pembahasan pada Bab II, korporasi ditengarai menunda atau mengurangi rencana penghimpunan dana melalui pasar saham. Secara keseluruhan, pembiayaan nonbank dan pasar modal tetap memperluas pilihan sumber pembiayaan di luar kredit perbankan. Kanal nonbank, terutama pindar, turut memperluas akses pembiayaan bagi segmen yang belum sepenuhnya terjangkau perbankan, sedangkan pasar modal menyediakan alternatif pendanaan bagi korporasi. Namun demikian, perkembangan kedua kanal tersebut tetap dipengaruhi oleh kondisi permintaan, biaya pendanaan, dan volatilitas pasar keuangan.



Grafik 3.3.2. Perkembangan Aktivitas EBUS



Grafik 3.3.3. Perkembangan Aktivitas Penawaran Umum³

13 Penawaran umum terdiri dari IPO dan penerbitan *right issue*

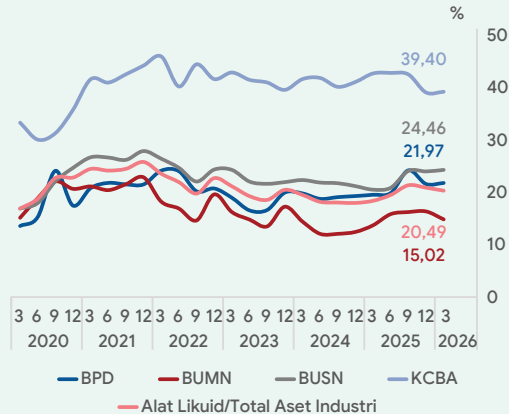
Boks 3.1

Strategi Alokasi Aset Perbankan dalam Mendorong Pertumbuhan Kredit

Keputusan penyaluran kredit oleh perbankan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas pendanaan, tetapi juga dipengaruhi oleh strategi alokasi aset perbankan. Dalam menjalankan fungsi intermediasi, bank mengelola komposisi portofolio aset dengan mempertimbangkan keseimbangan antara imbal hasil, risiko, dan kebutuhan likuiditas (*risk-adjusted return*). Dengan demikian, keputusan penempatan dana pada kredit, surat berharga, maupun aset likuid merupakan bagian dari *Portfolio Decision Making*¹⁴ yang memengaruhi kapasitas penyaluran kredit. Melalui *Portfolio Decision Making*, bank mengoptimalkan kombinasi aset sesuai profil risiko, kebutuhan likuiditas, dan imbal hasil yang diharapkan.

Perkembangan struktur aset menunjukkan adanya penyesuaian komposisi portofolio perbankan sejalan dengan berlanjutnya ekspansi kredit. Rasio alat likuid terhadap total aset menunjukkan tren menurun dalam beberapa periode terakhir, mencerminkan berkurangnya porsi aset likuid terhadap total aset perbankan namun mengindikasikan meningkatnya alokasi aset produktif/kredit (Grafik B3.1.1). Sejalan dengan itu, rasio alat likuid terhadap kredit juga menurun, mencerminkan bahwa pertumbuhan kredit berlangsung relatif lebih cepat terhadap perkembangan alat likuid (Grafik B3.1.2). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa penyesuaian komposisi aset berlangsung sejalan dengan ekspansi kredit, sementara kecukupan likuiditas perbankan secara agregat tetap terjaga. Ke depan, pengelolaan alokasi aset perlu tetap memperhatikan kecukupan *buffer* likuiditas seiring dengan berlanjutnya fungsi intermediasi.

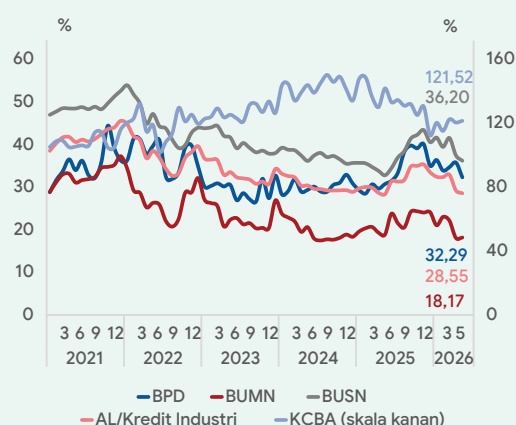
Strategi alokasi aset juga tecermin pada perubahan komposisi kepemilikan surat berharga perbankan. Penyesuaian komposisi



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik B3.1.1. Perkembangan Rasio Alat Likuid Terhadap Total Aset Berdasarkan Kelompok Bank

kepemilikan surat berharga merupakan bagian dari pengelolaan portofolio bank dalam merespons perkembangan kondisi likuiditas, biaya pendanaan, imbal hasil, dan prospek penyaluran kredit. Dalam konteks tersebut, kepemilikan surat berharga dapat berfungsi sebagai bagian dari *buffer* likuiditas maupun instrumen investasi. Oleh karena itu, perubahan porsi SSB perlu dilihat dalam konteks strategi alokasi aset masing-masing bank, termasuk pertimbangan likuiditas, imbal



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik B3.1.2. Perkembangan Rasio Alat Likuid Terhadap Kredit Berdasarkan Kelompok Bank

¹⁴ Konsep ini mengacu pada teori optimisasi portofolio oleh Markowitz (1952), bahwa investor mengalokasikan portofolio untuk memperoleh kombinasi imbal hasil dan risiko yang optimal. Dalam konteks perbankan, prinsip tersebut diadaptasi dalam pengelolaan aset dan liabilitas (*asset-liability management*) dengan mempertimbangkan *risk-adjusted return*.

hasil, risiko, dan ruang penyaluran kredit. Dengan demikian, pengelolaan SSB menjadi bagian dari upaya bank menjaga keseimbangan antara fungsi intermediasi, ketahanan likuiditas, dan profitabilitas. Namun demikian, porsi kepemilikan SSB yang terlalu besar dapat mengindikasikan bahwa penempatan bank di SSB menjadi alat investasi dan bukan sebagai *buffer* likuiditas. Sebagai lembaga intermediasi, perbankan perlu tetap menjaga keseimbangan alokasi aset agar pengelolaan likuiditas dan pencapaian imbal hasil tidak mengurangi ruang penyaluran kredit kepada sektor riil.

Strategi alokasi aset juga perlu mempertimbangkan ruang intermediasi dan profil risiko pada masing-masing sektor ekonomi. Saat ini, mayoritas sektor ekonomi mencatat *credit gap* negatif yang mengindikasikan adanya peningkatan ruang

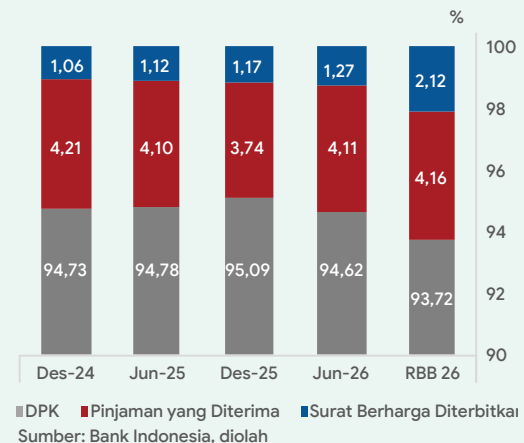
intermediasi karena kredit berada di bawah level optimal yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, penyaluran kredit oleh perbankan masih dapat ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor-sektor tersebut. Namun demikian, pemanfaatan ruang tersebut tetap bergantung pada perkembangan permintaan pembiayaan, *lending appetite* perbankan, dan profil risiko sektoral. Sektor yang mencatat *credit gap* negatif, disertai ILR yang relatif longgar dan risiko kredit yang terjaga, memiliki ruang yang relatif lebih besar untuk dipertimbangkan dalam penguatan intermediasi, antara lain sektor Listrik, Gas dan Air, Jasa Dunia Usaha, Jasa Sosial, dan Industri Pengolahan. Pemetaan sektor tersebut dapat menjadi salah satu acuan dalam mengidentifikasi sektor potensial untuk penguatan intermediasi, yang turut didukung oleh KLM Bank Indonesia.

Boks 3.2

Diversifikasi Pendanaan Non-DPK dan Pembiayaan Nonkredit untuk Mendukung Intermediasi

Kapasitas intermediasi perbankan tidak hanya bergantung pada penghimpunan DPK, tetapi juga pada kemampuan bank mendiversifikasi sumber pendanaan dan kanal pembiayaan. DPK tetap menjadi sumber utama pendanaan perbankan, sementara pendanaan non-DPK dapat menambah fleksibilitas bank dalam mengelola kebutuhan dana, tenor, dan struktur neraca. Dari sisi penyaluran, intermediasi juga dapat dilakukan melalui kanal pembiayaan nonkredit yang melengkapi penyaluran kredit kepada sektor riil. Dengan demikian, diversifikasi sumber pendanaan dan kanal pembiayaan dapat memperluas pilihan bank dalam mengelola kapasitas intermediasi dengan tetap memperhatikan risiko dan kecukupan likuiditas.

Diversifikasi pendanaan non-DPK dapat menambah fleksibilitas perbankan dalam mengelola struktur pendanaan. Strategi ini tecermin dari rencana perbankan yang menargetkan peningkatan pendanaan non-DPK, baik dalam bentuk pinjaman maupun penerbitan surat berharga (Grafik B3.2.1). Perkembangan



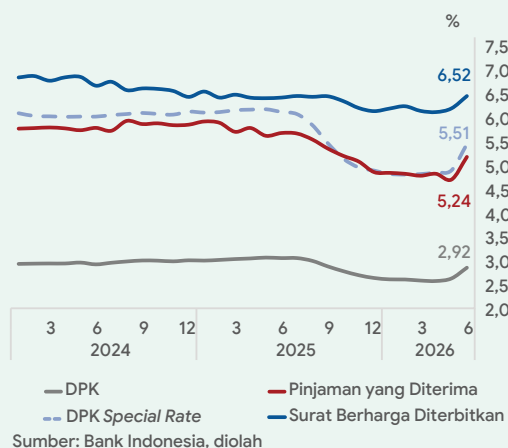
Grafik B3.2.1. Pangsa Sumber Pendanaan Bank

tersebut memberikan alternatif bagi bank dalam mengelola *funding mix*, terutama ketika harga pendanaan non-DPK relatif kompetitif dibandingkan sebagian sumber DPK dengan suku bunga *special rate* (Grafik B3.2.2). Perkembangan ini berpotensi memberikan ruang bagi perbankan untuk mengoptimalkan kapasitas pendanaan,

menjaga daya saing dan menurunkan *cost of fund*, meskipun manfaat terhadap *cost of fund* tetap bergantung pada harga instrumen dan kondisi pasar.

Selain melalui kredit, perbankan dapat melengkapi pembiayaan kepada sektor riil melalui kepemilikan instrumen surat berharga korporasi (Grafik B3.2.3). Perkembangan pasar modal yang menunjukkan tren positif, memberikan peluang bagi perbankan untuk memperluas kanal pembiayaan selain kredit. Kanal tersebut mencakup instrumen pasar modal seperti kepemilikan EBUS serta jenis surat berharga yang diterbitkan korporasi nonbank lainnya. Pemanfaatan kanal tersebut memberikan alternatif bagi bank dalam mengalokasikan aset dengan mempertimbangkan imbal hasil, risiko, likuiditas, dan kebutuhan pembiayaan sektor riil. Perbedaan imbal hasil antara instrumen surat berharga dan kredit turut menjadi salah satu pertimbangan dalam keputusan alokasi aset perbankan (Grafik B3.2.4). Dengan demikian, pembiayaan nonkredit dapat berfungsi sebagai pelengkap kredit sekaligus sejalan dengan upaya pendalaman pasar keuangan agar kuantitas, jenis, dan volume EBUS yang diterbitkan serta diperdagangkan dapat terus meningkat.

Peluang diversifikasi kanal pendanaan selain DPK dan pembiayaan nonkredit tersebut turut didukung oleh penguatan kebijakan akomodatif sektor keuangan. Sejak 1 Juli 2026, penguatan RIM memperluas cakupan instrumen yang diperhitungkan dalam intermediasi, termasuk surat berharga tertentu,

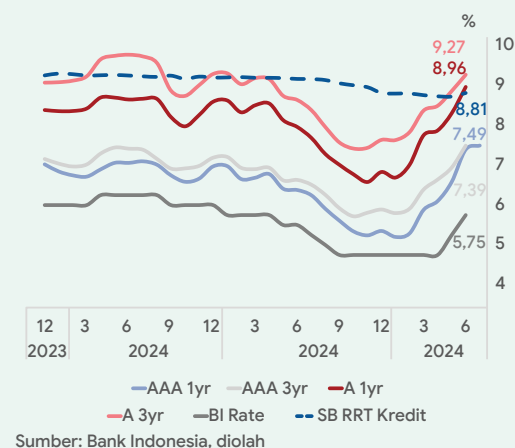


Grafik B3.2.2. Suku Bunga Pendanaan



Grafik B3.2.3. Pangsa Pembiayaan Bank

sehingga memberikan ruang yang lebih luas bagi bank dalam mengelola kanal pembiayaan. Penguatan RIM juga membuka ruang yang lebih luas bagi pemanfaatan instrumen pasar uang, termasuk surat berharga komersial, sebagai salah satu alternatif dalam pengelolaan pendanaan dan pembiayaan. Selanjutnya, peningkatan partisipasi perbankan tersebut diharapkan dapat memperluas basis investor domestik, meningkatkan likuiditas pasar serta memperkuat peran surat berharga komersial sebagai alternatif instrumen pembiayaan jangka pendek bagi korporasi. Pada saat yang sama, batas RPLN meningkat dari 35% menjadi 40% modal bank, yang memperluas ruang pemanfaatan pendanaan luar negeri secara terukur. Di sisi pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan ketentuan yang mengatur penerbitan EBUS yang akan mempermudah korporasi dalam mencari sumber pendanaan alternatif.



Grafik B3.2.4. Suku Bunga Pembiayaan

Bab 4

PENGUATAN KEUANGAN INKLUSIF, BERKELANJUTAN, DAN SYARIAH SEBAGAI SUMBER PERTUMBUHAN BARU

Kuangan inklusif, berkelanjutan, dan syariah terus diperkuat untuk memperluas basis pembiayaan dan sumber pertumbuhan ekonomi. Pada pembiayaan inklusif, besarnya peran UMKM yang menyumbang sekitar 61% PDB belum sepenuhnya tercermin pada pangsa kredit yang baru mencapai 16,73%. Kredit UMKM mulai menunjukkan indikasi awal pemulihan, tetapi belum merata antarskala dan sektor, serta tetap menghadapi keterbatasan kapasitas usaha dan informasi. Karena itu, penguatan literasi dan kapasitas usaha, digitalisasi transaksi dan pencatatan keuangan, serta fasilitasi *business matching* menjadi penting dalam memperluas basis UMKM yang semakin siap dan layak memperoleh pembiayaan formal.

Pembiayaan berkelanjutan terus berkembang melalui intermediasi perbankan pada segmen kendaraan dan properti berwawasan lingkungan serta proyek pengelolaan sampah dan limbah, walaupun saat ini masih mengalami tantangan kelayakan pembiayaan. KKB berwawasan lingkungan tumbuh 59,16% (yoy), sementara KPR berwawasan lingkungan dan kredit di sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang tumbuh

positif meski terbatas dengan kualitas kredit yang relatif terjaga. Rencana implementasi proyek strategis nasional tentang Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) secara paralel di beberapa lokasi akan turut meningkatkan pembiayaan berkelanjutan. Di sisi lain, pengembangan pasar karbon membuka peluang pendapatan tambahan bagi proyek transisi rendah karbon yang dapat memperkuat kelayakan ekonomi dan pembiayaan proyek dimaksud.

Pembiayaan syariah juga memiliki ruang untuk semakin mendukung pertumbuhan melalui keterkaitannya dengan aktivitas produktif dalam ekosistem halal. Aktivitas sektor unggulan rantai nilai halal (*Halal Value Chain/HVC*) mencapai 26,59% terhadap PDB nasional pada triwulan II 2026, sejalan dengan PYD perbankan syariah yang menguat menjadi 11,43% (yoy) pada Juni 2026. Penguatan pembiayaan pada rantai nilai halal, didukung oleh kondisi pendanaan, kualitas pembiayaan, dan kapasitas intermediasi yang tetap memadai, membuka ruang bagi perbankan syariah untuk memperluas pembiayaan secara terukur dengan tetap menjaga resiliensi.

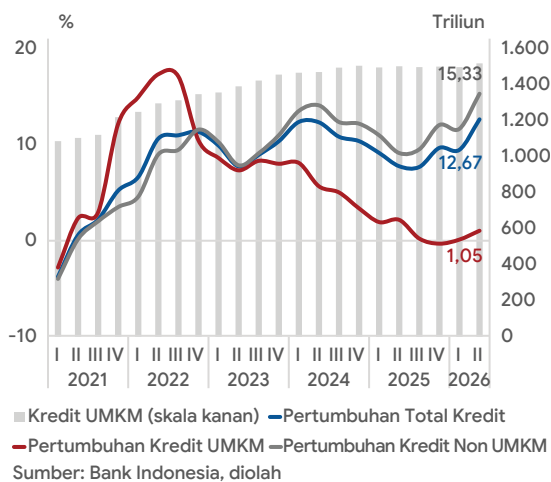
4.1 Penguatan Keuangan Inklusif

Pembiayaan inklusif perlu terus diperkuat seiring dengan peran krusial UMKM sebagai pilar stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian dengan kontribusi 61% terhadap PDB dan mencakup 97% dari seluruh tenaga kerja, sementara pangsa kredit UMKM per Juni 2026 hanya mencapai 16,73% dari total kredit yang disalurkan. Besarnya peran UMKM terhadap perekonomian dibandingkan dengan pangsa pembiayaan yang diterima, menunjukkan masih terdapat ruang untuk memperluas akses pembiayaan. Namun, perluasan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain keterbatasan informasi, kapasitas produksi, dan keterhubungan UMKM dengan rantai pasok, yang dapat memengaruhi kelayakan pembiayaan.

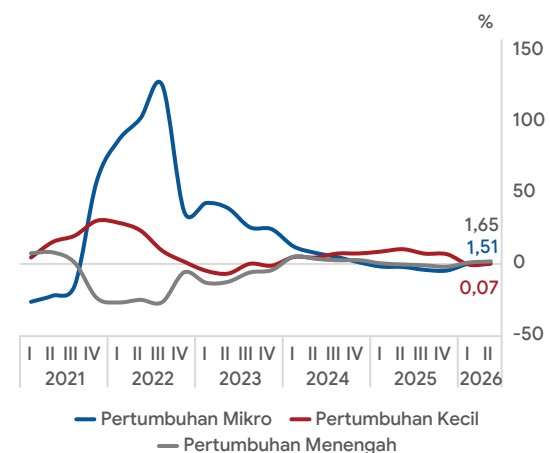
Pertumbuhan kredit UMKM menunjukkan indikasi awal pemulihan meskipun masih terbatas dan belum merata antarskala usaha. Pada Juni 2026, kredit UMKM tumbuh sebesar 1,05% (yoy), menunjukkan indikasi perbaikan setelah mengalami tren perlambatan sejak 2024 (Grafik 4.1.1). Berdasarkan skala usaha, perbaikan terutama terlihat pada kredit skala mikro dan menengah yang masing-masing tumbuh 1,51% (yoy) dan 1,65% (yoy). Sementara itu, kredit UMKM skala kecil tumbuh terbatas sebesar 0,07% (yoy) pada Juni 2026, melambat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 10,28% (yoy) (Grafik

4.1.2). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pemulihan pembiayaan UMKM masih berada pada tahap awal dan belum berlangsung secara merata.

Secara sektoral, perkembangan kredit UMKM juga menunjukkan kinerja yang berbeda antarlapangan usaha. Sektor Pertanian, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh positif sedangkan Konstruksi, Perdagangan serta Pengangkutan dan Pergudangan masih perlu ditingkatkan (Tabel 4.1.1). Pertumbuhan positif, antara lain terlihat pada sektor Pertanian serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang masing-masing tumbuh sebesar 5,22% (yoy) dan 7,86% (yoy) pada Juni 2026. Pada sektor Konstruksi, kredit UMKM tumbuh sebesar 3,13% (yoy), membaik dari kontraksi sebesar 4,32% (yoy) di Juni 2025, di tengah mulai meningkatnya keterlibatan UMKM dalam proyek pembangunan. Sebaliknya, kredit UMKM sektor Perdagangan masih berkontraksi sebesar 4,50% (yoy) pada Juni 2026, lebih dalam dibandingkan kontraksi 0,60% (yoy) pada Juni 2025, di tengah daya beli yang masih terbatas, persaingan usaha yang ketat, keterbatasan kapasitas produksi, dan belum optimalnya keterhubungan UMKM dengan rantai pasok. Sementara itu, kontraksi kredit UMKM sektor Pengangkutan dan Pergudangan menyempit dari 4,32% (yoy) pada Juni 2025 menjadi 2,37% (yoy) pada Juni 2026.



Grafik 4.1.1. Perkembangan Kredit dan Kredit UMKM



Grafik 4.1.2. Perkembangan Kredit UMKM per Skala Usaha

Tabel 4.1.1. Perkembangan Kredit UMKM Berdasarkan Sektor Ekonomi

Sektor	Pertumbuhan (yoy)		NPL		Pangsa	
	TW II 25	TW II 26	TW II 25	TW II 26	TW II 25	TW II 26
Perdagangan	2,18%	0,59%	4,41%	4,53%	18,66%	16,73%
Pertanian	-0,60%	-4,50%	4,81%	5,12%	45,78%	43,27%
Industri Pengolahan	6,30%	5,22%	3,03%	3,31%	19,08%	19,87%
Penyediaan Akomodasi Makanan Minuman	-1,63%	0,03%	4,99%	5,12%	9,52%	9,43%
Pengangkutan dan Pergudangan	10,34%	-2,37%	3,38%	3,57%	3,55%	3,43%
Konstruksi	-4,32%	3,13%	10,08%	9,52%	3,43%	3,50%

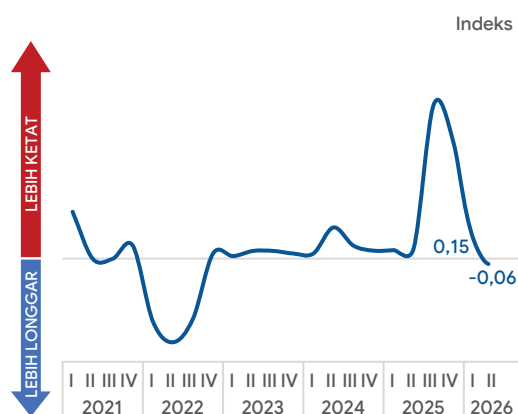
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Di sisi penawaran, standar penyaluran kredit UMKM terindikasi mengalami pelonggaran pada triwulan II 2026. Indeks *Lending Standard* (ILS) UMKM pada triwulan II 2026 tercatat sebesar -0,06, menurun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0,15 (Grafik 4.1.3). Pelonggaran, antara lain terlihat pada aspek persyaratan agunan, khususnya pada penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dibawah Rp100 juta. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa dari sisi standar penyaluran, dan kondisi pemberian kredit UMKM relatif lebih longgar dibandingkan sebelumnya.

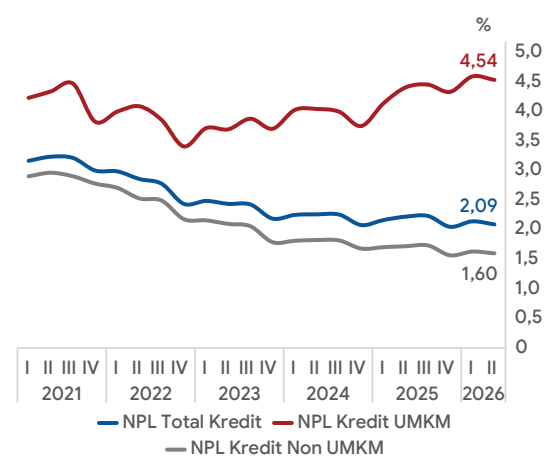
Walaupun demikian, perluasan pembiayaan UMKM tetap perlu dibersamai dengan pengelolaan risiko kredit secara berhati-hati. Rasio NPL UMKM masih menunjukkan kecenderungan meningkat dan berada di atas NPL kredit non-UMKM (Grafik 4.1.4). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelonggaran standar

penyaluran kredit perlu tetap diimbangi dengan asesmen kelayakan usaha, kualitas informasi debitur, kemampuan pembayaran, dan pemantauan kualitas kredit yang memadai.

Di sisi permintaan, kinerja UMKM tetap berada pada zona ekspansi, meskipun mengalami moderasi pada triwulan II 2026. Indeks kinerja UMKM tercatat sebesar 116,67, masih berada di atas batas ekspansi sebesar 100, namun lebih rendah dibandingkan 122,00 pada triwulan II 2025 (Grafik 4.1.5). Moderasi terutama terjadi pada sektor Perdagangan (Grafik 4.1.6) sementara kinerja sektor Pertanian dan Industri Pengolahan meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Perkembangan tersebut berlangsung di tengah daya beli masyarakat yang masih terbatas, tekanan biaya produksi, dan dinamika rantai pasok global. Hasil survei juga menunjukkan UMKM yang memperoleh

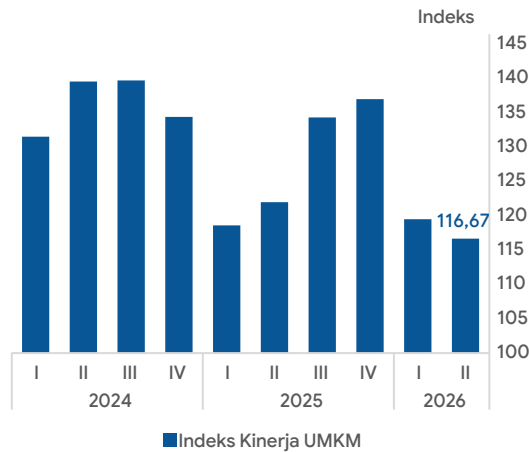


Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.1.3. ILS Kredit UMKM

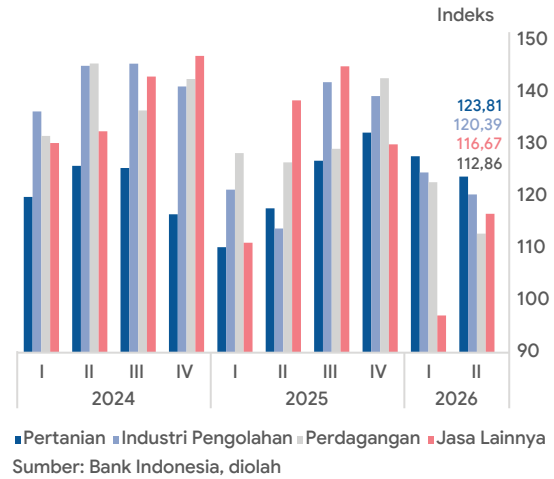
Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.1.4. Rasio NPL Kredit UMKM dan Kredit Non-UMKM



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.1.5. Indeks Kinerja UMKM



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.1.6. Indeks Kinerja UMKM per Sektor Ekonomi

kredit perbankan memprioritaskan penggunaan kredit untuk pembelian perlengkapan usaha dan investasi pembelian mesin produksi.

Digitalisasi transaksi, pencatatan keuangan, serta pemanfaatan data alternatif dan informasi rantai pasok membuka peluang untuk mengurangi asimetri informasi dalam pembiayaan UMKM. Rekam jejak transaksi digital melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) berpotensi menjadi salah satu sumber informasi dalam pengembangan penilaian kelayakan berbasis transaksi dan arus kas, walaupun pemanfaatannya dalam *alternative*

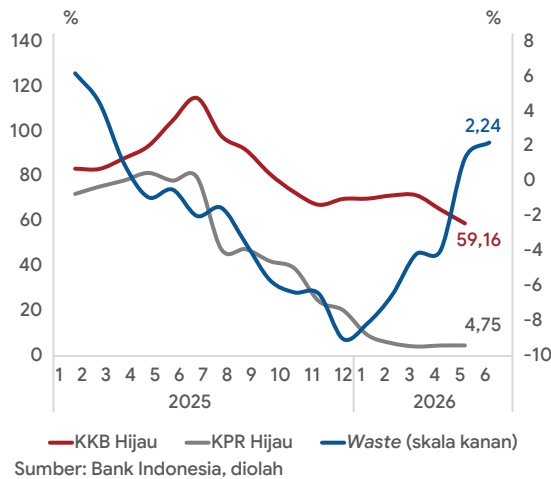
credit scoring masih memerlukan pengembangan kualitas data, integrasi sistem, dan asesmen risiko yang memadai. Di sisi lain, Bank Indonesia juga mengembangkan Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK) yang membantu UMKM melakukan pencatatan transaksi dan menghasilkan laporan keuangan standar untuk menjembatani ketersediaan informasi keuangan yang akurat dalam pengajuan kredit. Informasi di atas dapat dimanfaatkan dalam pengembangan *alternative credit scoring* maupun skema pembiayaan berbasis rantai pasok. Mekanisme penguatan kapasitas dan digitalisasi UMKM dibahas lebih lanjut pada Boks 4.1.

4.2 Penguatan Keuangan Berkelanjutan

Pembiayaan berkelanjutan semakin penting untuk mendukung kebutuhan investasi dalam rangka transisi menuju ekonomi rendah karbon sekaligus membuka sumber pertumbuhan baru. Saat ini, pembiayaan berkelanjutan di Indonesia masih banyak diperoleh melalui intermediasi perbankan, antara lain kepada kendaraan dan properti berwawasan lingkungan serta proyek transisi yang terkait pengelolaan air, sampah, limbah, dan daur ulang. Sementara itu, pembiayaan proyek berkelanjutan dari perbankan masih menghadapi beberapa tantangan, antara lain kesiapan proyek dan kepastian sumber pendapatan, yang memengaruhi kelayakan debitur dalam memperoleh pembiayaan. Dalam kaitan ini, perkembangan pasar karbon, berpotensi

memperkuat kelayakan ekonomi sebuah proyek transisi, melalui perannya memberikan tambahan sumber pendapatan.

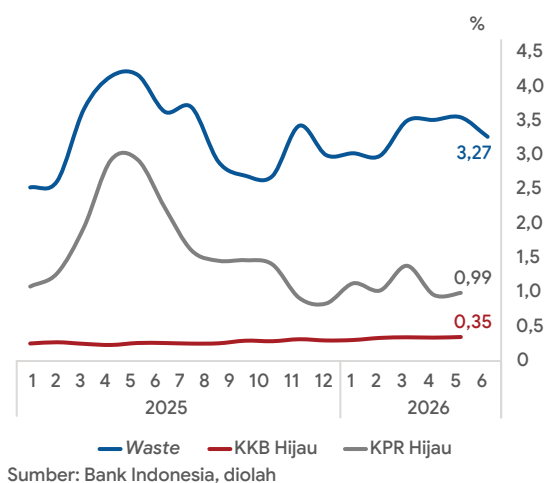
Penyaluran kredit berkelanjutan tumbuh positif meskipun belum merata antarsegmen. Pada Mei 2026, KKB berwawasan lingkungan tumbuh sebesar 59,16% (yoy), sementara KPR berwawasan lingkungan tumbuh lebih terbatas sebesar 4,75% (yoy) (Grafik 4.2.1). Kredit kepada sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang juga tumbuh sebesar 2,24% (yoy) pada Juni 2026 setelah berkontraksi pada periode yang sama tahun sebelumnya. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa ruang pembiayaan berkelanjutan masih



Grafik 4.2.1. Pertumbuhan Kredit Berkelanjutan

terbuka luas, meskipun pemanfaatannya bergantung pada perkembangan permintaan, kesiapan proyek, dan kelayakan pembiayaan yang dilakukan masing-masing oleh bank.

Risiko kredit pada segmen pembiayaan berkelanjutan tetap terjaga. Rasio NPL KKB berwawasan lingkungan tercatat sebesar 0,35% pada Mei 2026 dan relatif stabil dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Rasio NPL KPR berwawasan lingkungan juga membaik menjadi 0,99% dari 2,93% pada Mei 2025. Sementara itu, NPL sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang menurun menjadi 3,27% pada Juni 2026 dari 3,64% pada periode yang sama tahun sebelumnya (Grafik 4.2.2). Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan pembiayaan sejauh ini tetap disertai dengan kualitas kredit yang relatif terjaga.



Grafik 4.2.2. Rasio NPL Kredit Berkelanjutan

Bank Indonesia mendukung pembiayaan berkelanjutan melalui penguatan kebijakan makroprudensial. Pada Desember 2025, skema insentif KLM diperluas untuk mencakup langsung sektor UMKM, koperasi, inklusi, dan kegiatan berwawasan lingkungan, dari semula menjadi bagian insentif KLM berdasarkan pencapaian Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM). Pada Juni 2026¹⁵, total insentif KLM kepada sektor berkelanjutan (termasuk UMKM dan inklusi) mencapai Rp76,24 triliun. Selain melalui insentif KLM, Bank Indonesia juga memberikan dukungan melalui kebijakan *Loan to Value/Financing to Value* (LTV/FTV) hingga 100% dan uang muka minimum 0% bagi KPR hijau dan KKB hijau. Di sisi lain, upaya pengembangan pembiayaan berkelanjutan juga diperkuat berbagai inisiatif, antara lain *business matching*, pengembangan model bisnis, penguatan kapasitas pelaku usaha dan perbankan dalam pengelolaan risiko iklim, serta peningkatan literasi ekonomi dan keuangan berkelanjutan.

Penguatan intermediasi berkelanjutan juga didukung oleh ketersediaan data dan klasifikasi pembiayaan yang semakin baik. Data yang berkualitas dan terstandarisasi diperlukan agar pembiayaan berkelanjutan dapat diidentifikasi, diukur, dan dipantau secara konsisten. Dalam konteks tersebut, adanya *single definition* kredit berkelanjutan dapat menyelaraskan klasifikasi pembiayaan berkelanjutan di sektor keuangan, mengurangi perbedaan interpretasi, serta mendukung asesmen risiko dan perumusan kebijakan yang lebih tepat.

Ke depan, perluasan pembiayaan berkelanjutan tidak hanya didukung oleh pembiayaan pada segmen KKB dan KPR, tetapi juga oleh bertambahnya proyek transisi. Proyek infrastruktur berkelanjutan umumnya membutuhkan investasi awal yang besar, tenor panjang, serta pengelolaan risiko yang lebih kompleks. Oleh karena itu, kesiapan proyek, kepastian sumber pendapatan, pembagian risiko antarpihak, serta kapasitas pelaku usaha dan perbankan menjadi penting agar kebutuhan investasi dapat diterjemahkan menjadi pembiayaan. PSEL merupakan salah satu contoh proyek transisi yang prospektif karena memiliki manfaat ekonomi dan lingkungan. Mekanisme penguatan kelayakan pembiayaan PSEL dibahas lebih lanjut pada Boks 4.2.

15 PADG Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (PADG KLM)

Selain penguatan intermediasi perbankan, perkembangan pasar karbon memiliki implikasi bagi ekosistem keuangan berkelanjutan secara lebih luas. Pasar karbon memberikan nilai ekonomi atas aktivitas pengurangan atau penyerapan emisi yang dapat menjadi tambahan sumber pendapatan proyek rendah karbon. Tambahan pendapatan tersebut dapat memperbaiki profil arus kas sehingga meningkatkan kelayakan ekonomi dan daya tarik proyek bagi lembaga keuangan dan investor.

Dalam konteks proyek PSEL, potensi pendapatan karbon dari pengurangan emisi metana dapat menjadi komponen tambahan yang memperkuat *bankability* proyek. Namun, efektivitas mekanisme tersebut bergantung pada harga karbon yang memadai, likuiditas pasar, serta kepercayaan terhadap integritas kredit karbon. Dengan demikian, pasar karbon berperan sebagai *enabler* yang melengkapi, bukan menggantikan, struktur pembiayaan konvensional proyek transisi. Untuk mendukung fungsi tersebut, kerangka regulasi dan infrastruktur pasar terus diperkuat, antara lain melalui penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 14 Tahun 2023 yang disempurnakan melalui POJK Nomor 10 Tahun 2026, dan peluncuran IDX Carbon pada September 2023.

Seiring dengan penguatan kerangka regulasi dan infrastruktur, perkembangan pasar karbon perlu terus dioptimalisasi. Hingga Juli 2026, total volume perdagangan mencapai 165.240 Ton CO₂e (ytd), sangat rendah dibandingkan potensinya sebesar 13,4 Miliar Ton CO₂e¹⁶. Pada periode yang sama, total nilai transaksi baru mencapai Rp6,88 miliar dengan jumlah partisipan sebanyak 155, relatif stagnan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tersebut, antara lain dipengaruhi oleh terbatasnya sektor yang diwajibkan untuk membeli kredit karbon di tengah sebagian besar perusahaan yang masih berada pada

tahap awal penyusunan strategi dekarbonisasi, serta rendahnya minat investor akibat persepsi risiko dan integritas karbon kredit Indonesia.

Indonesia memiliki ruang besar untuk mengembangkan pasar karbon, didukung terutama dari potensi berbasis alam dan pengembangan proyek pengurangan (*carbon sink*) dan penghindaran emisi (*carbon avoidance*). Untuk mewujudkan potensi tersebut, pengembangan proyek perlu didukung oleh penerapan standar internasional dan proses verifikasi yang kredibel. Dari sisi permintaan, diperlukan perluasan basis pembeli dan peningkatan kepercayaan atas kualitas kredit karbon. Sementara itu, lembaga keuangan memiliki peran strategis dalam membiayai proyek pengurangan emisi yang menghasilkan kredit karbon berkualitas.

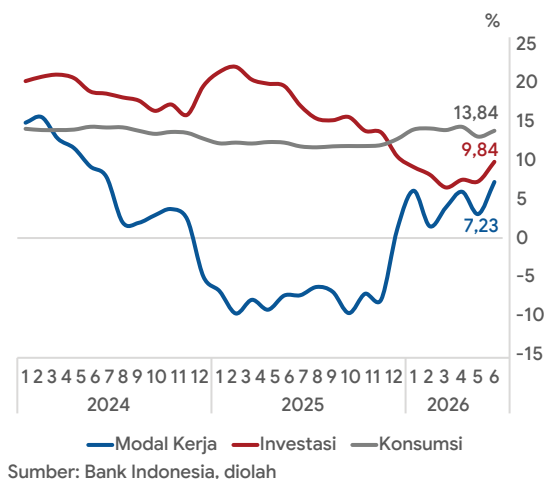
Bank Indonesia turut mendorong pengembangan ekosistem keuangan berkelanjutan melalui penguatan infrastruktur informasi berupa aplikasi “kalkulator hijau” dan sinergi kelembagaan. Dukungan Bank Indonesia diwujudkan dalam pengembangan *tools* penghitungan emisi dalam bentuk aplikasi kalkulator hijau yang terstandarisasi bagi perbankan dan pelaku usaha, termasuk perhitungan *financed emission*. Dalam konteks proyek transisi seperti PSEL, *tools* tersebut dapat membantu perbankan mengukur dampak pengurangan emisi dari pembiayaan yang disalurkan sekaligus mengidentifikasi potensi pendapatan karbon proyek, sehingga melengkapi asesmen kelayakan pembiayaan secara lebih komprehensif. Selain itu, Bank Indonesia juga berpartisipasi dalam *Blue Finance Advisory Committee* bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia yang fokus pada penyelarasan kebijakan dan pengembangan instrumen keuangan berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan.

16 Data dari Kementerian Kehutanan (2026)

4.3 Penguatan Keuangan Syariah

Ekonomi halal memiliki basis aktivitas yang besar dan membuka ruang bagi penguatan pembiayaan syariah sebagai sumber pertumbuhan. Pada triwulan II 2026, pangsa aktivitas usaha sektor unggulan HVC terhadap PDB mencapai 26,59%. Besarnya basis aktivitas tersebut menunjukkan potensi untuk semakin memperkuat keterkaitan antara intermediasi perbankan syariah dan kegiatan produktif dalam ekosistem halal, antara lain pada sektor makanan halal, pariwisata ramah muslim, dan fesyen muslim.

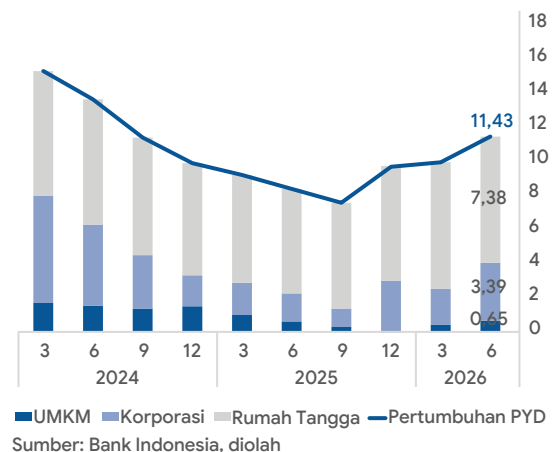
Sejalan dengan potensi tersebut, intermediasi perbankan syariah terus menguat. Pembiayaan yang Disalurkan (PYD) tumbuh sebesar 11,43% (yoy) pada Juni 2026, meningkat dari 8,37% (yoy) pada Juni 2025. Berdasarkan kelompok penggunaan, pembiayaan konsumsi, investasi, dan modal kerja masing-masing tumbuh sebesar 13,84%, 9,84%, dan 7,23% (yoy) (Grafik 4.3.1). Penguatan ini menegaskan ketahanan intermediasi perbankan syariah di tengah dinamika ekonomi global yang masih diliputi ketidakpastian. Membaiknya pembiayaan modal kerja mengindikasikan aktivitas dunia usaha yang mulai pulih.



Grafik 4.3.1. Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Jenis Penggunaan

Penguatan pembiayaan syariah berlangsung berbeda antarkelompok nasabah. Pada Juni 2026, pembiayaan syariah kepada rumah tangga dan korporasi masing-masing tumbuh sebesar 7,38% dan 3,39% (yoy), sementara pembiayaan syariah kepada UMKM tumbuh terbatas sebesar 0,65% (yoy) (Grafik 4.3.2). Perkembangan tersebut menunjukkan masih terdapat ruang untuk memperluas pembiayaan syariah kepada pelaku usaha, termasuk UMKM. Operasionalisasi *spin-off* beberapa Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah (BUS) sejak tahun 2025 memperluas kapasitas industri dalam menyalurkan pembiayaan seiring penguatan tata kelola dan kualitas pembiayaan.

Penguatan peluang kontribusi pembiayaan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi tecermin pada perkembangan pembiayaan sektor unggulan HVC. Pada Juni 2026, pembiayaan pada segmen pariwisata ramah muslim, makanan halal, dan fesyen muslim masing-masing tumbuh sebesar 26,23%, 19,00%, dan 1,16% (yoy) (Grafik 4.3.3). Pertumbuhan pembiayaan pariwisata sejalan dengan meningkatnya daya saing pariwisata ramah muslim Indonesia yang menempati peringkat kedua dunia berdasarkan GMTI



Grafik 4.3.2. Pertumbuhan Pembiayaan Perbankan Syariah Berdasarkan Segmen Nasabah



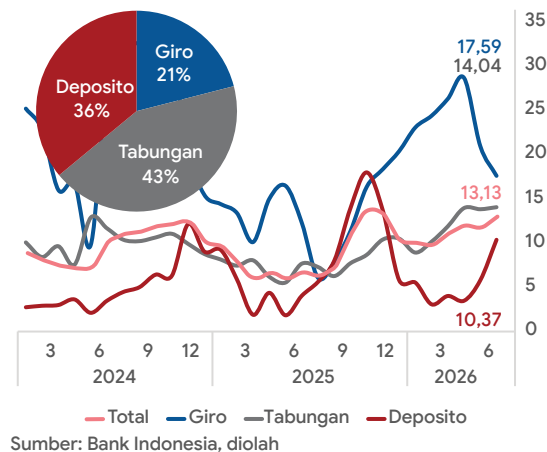
Grafik 4.3.3. Pertumbuhan Pembiayaan Sektor Unggulan Halal Value Chain

2026¹⁷. Adapun penguatan segmen pangan sejalan dengan konsumsi rumah tangga yang tetap kuat serta program prioritas Pemerintah, termasuk MBG yang berimplikasi pada permintaan produk pangan dan makanan olahan halal.

Penguatan pembiayaan HVC membuka peluang untuk memperluas transmisi pembiayaan syariah di sepanjang HVC. Pembiayaan kepada industri pengolahan makanan, dapat memperkuat keterhubungan dengan pemasok dan pelaku usaha di sektor industri pengolahan makanan halal, sementara pengembangan pariwisata ramah muslim dapat mendorong aktivitas di sektor akomodasi, makanan dan minuman, serta jasa. Dengan semakin kuatnya keterkaitan antar sektor melalui HVC, akselerasi pembiayaan syariah berpotensi semakin kuat dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Penguatan intermediasi perbankan syariah didukung oleh pertumbuhan sumber dana dan buffer likuiditas yang tetap memadai. Pada Juni 2026, DPK perbankan syariah tumbuh sebesar 13,13% (yoy), meningkat dari 6,91% (yoy) pada periode yang sama tahun sebelumnya, terutama ditopang oleh tabungan dan giro syariah (Grafik 4.3.4). Penghimpunan dana juga membaik seiring dengan kembali meningkatnya penempatan dana Pemerintah Daerah, terutama pada BPD Syariah. Kondisi likuiditas tetap memadai, tecermin dari rasio AL/DPK sebesar 27,69% pada Juni 2026 (Grafik 4.3.5).

¹⁷ Global Muslim Travel Index (GMTI) merupakan indeks tahunan yang menilai daya saing destinasi wisata ramah muslim.



Grafik 4.3.4. Pertumbuhan DPK Perbankan Syariah Berdasarkan Instrumen

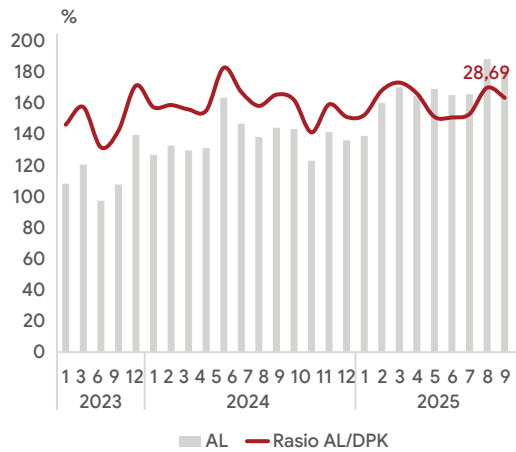
Kualitas pembiayaan tetap terjaga, meskipun masih terdapat risiko penurunan yang perlu dipantau. Dari sisi risiko pembiayaan, rasio NPF¹⁸ dan *Financing at Risk* (FaR)¹⁹ masing-masing tercatat sebesar 2,27% dan 8,21% pada Juni 2026. Rasio NPF yang rendah menunjukkan kualitas pembiayaan yang tetap terjaga, namun selisih yang cukup lebar dengan FaR mengindikasikan adanya pembiayaan yang berpotensi menurun kualitasnya, termasuk pembiayaan dalam perhatian khusus dan restrukturisasi, yang perlu terus dipantau di tengah penyesuaian portofolio pembiayaan yang masih berlangsung (Grafik 4.3.6).

Kapasitas intermediasi perbankan syariah juga tetap memadai, didukung posisi likuiditas dan kebijakan makroprudensial yang akomodatif. Pada Juni 2026, realisasi RIM Syariah²⁰ tercatat mengalami penguatan sebesar 88,09% (Grafik 4.3.7), kembali berada di dalam koridor kebijakan 84–94% setelah sempat tertekan di batas bawah pada akhir 2025. Pemulihan tersebut ditopang oleh *buffer* likuiditas, tecermin dari rasio Penyangga Likuiditas

¹⁸ NPF adalah rasio yang dihitung dengan membandingkan total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan. **SE OJK No. 10/SEOJK.03/2014**

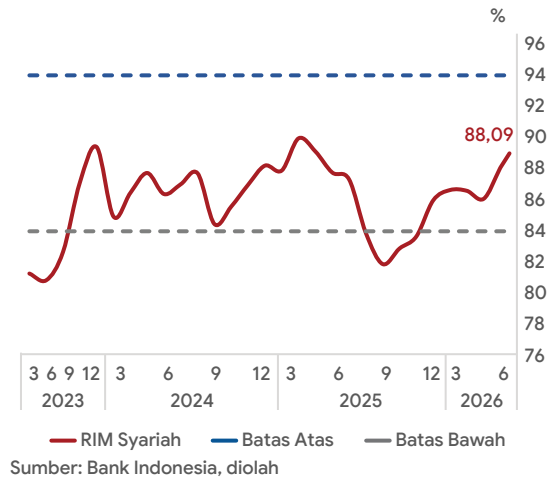
¹⁹ FaR dalam perbankan umum konvensional adalah rasio yang dihitung dengan membandingkan total NPF, pembiayaan dalam perhatian khusus (Kol.2) dan pembiayaan lancar yang direstrukturisasi (Kol.1) dengan total pembiayaan. **SE OJK No. 10/SEOJK.03/2014**

²⁰ RIM Syariah adalah instrumen kebijakan makroprudensial berupa rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat intermediasi perbankan syariah (BUS dan UUS). **PBI No. 20/4/PBI/2018**



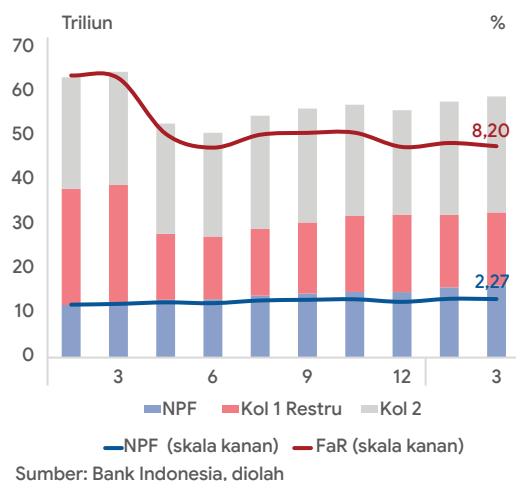
Grafik 4.3.5. Pertumbuhan Rasio Alat Likuid BUS KBMI

Makroprudensial (PLM) Syariah²¹ sebesar 12,80% yang jauh berada di atas batas minimum kebijakan sebesar 2,50% (Grafik 4.3.8), serta pemanfaatan KLM²² oleh perbankan syariah yang relatif tinggi dengan rasio di atas 4% (Grafik 4.3.9). Kondisi ini

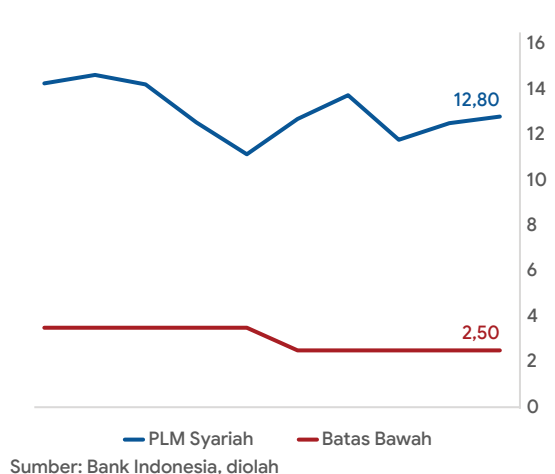


Grafik 4.3.7. Perkembangan Realisasi RIM Syariah

menunjukkan masih tersedianya kapasitas bagi perbankan syariah untuk memperkuat pembiayaan secara terukur sesuai perkembangan permintaan, kelayakan usaha, dan profil risiko.



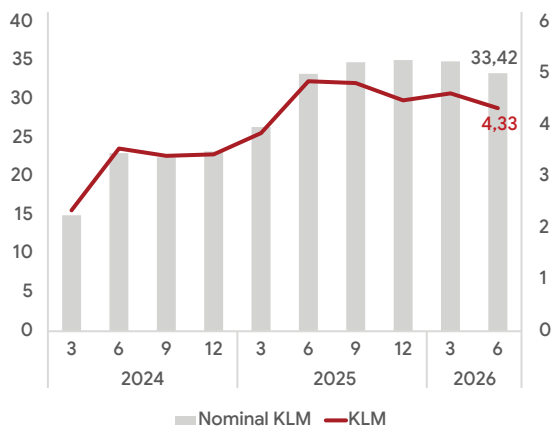
Grafik 4.3.6. Kualitas Pembiayaan Perbankan Syariah



Grafik 4.3.8. Perkembangan Realisasi PLM

21 PLM Syariah adalah cadangan likuiditas minimum dalam mata uang Rupiah yang wajib dipelihara oleh BUS dan UUS dalam bentuk surat berharga yang memenuhi persyaratan tertentu, yang besarnya ditetapkan sebagai persentase tertentu dari DPK. **PBI No. 20/4/PBI/2018**

22 KLM adalah kebijakan pemberian Insentif Likuiditas Makroprudensial, yaitu insentif berupa pengurangan kewajiban pemenuhan GWM dalam Rupiah yang wajib dipenuhi secara rata-rata, yang diberikan Bank Indonesia kepada Bank yang memenuhi kriteria penyaluran kredit/ pembiayaan pada sektor-sektor tertentu yang ditetapkan. **PBI No. 11 Tahun 2023**



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 4.3.9. Perkembangan Realisasi Insentif KLM

Penguatan pembiayaan syariah perlu terus difokuskan pada peningkatan ekosistem halal.

Ke depan, pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah diperkirakan tetap positif, turut ditopang penguatan kapasitas kelembagaan BUS hasil *spin-off* UUS. Penguatan rantai nilai halal, serta fasilitasi akses pembiayaan termasuk melalui Bulan Pembiayaan Syariah, diharapkan dapat semakin memperkuat transmisi pembiayaan syariah ke sektor produktif. Dengan tetap menjaga kualitas pembiayaan dan kecukupan likuiditas, penguatan intermediasi syariah berpotensi menjadi salah satu kanal untuk memperluas basis pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga resiliensi sistem keuangan.

Boks 4.1

Peningkatan Pembiayaan UMKM Melalui Penguatan Kapasitas dan Digitalisasi

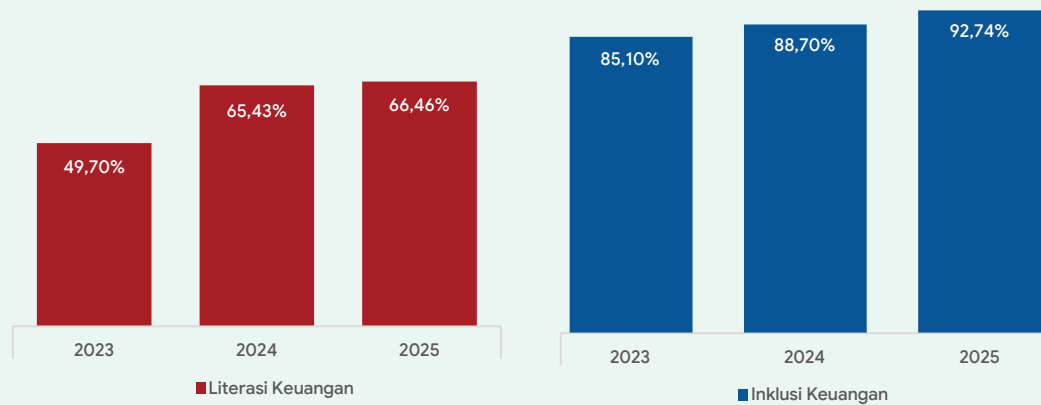
Perluasan pembiayaan UMKM ditentukan oleh akses informasi dan kapasitas UMKM yang memadai. Sebagaimana dibahas pada subbab 4.1, standar penyaluran kredit UMKM mulai lebih longgar, namun perluasan pembiayaan masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan informasi, kapasitas pengelolaan usaha, serta keterhubungan antara UMKM dan lembaga keuangan serta rantai pasok industri. Dalam konteks tersebut, penguatan literasi dan kapasitas usaha, digitalisasi transaksi dan pencatatan keuangan, serta fasilitasi akses pembiayaan dapat saling melengkapi untuk meningkatkan kesiapan UMKM memperoleh pembiayaan.

Kesenjangan antara literasi dan inklusi keuangan menunjukkan pentingnya memastikan perluasan akses diikuti pula dengan peningkatan kapasitas UMKM terkait keuangan. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan, indeks inklusi keuangan nasional sebesar 92,74%, sementara indeks literasi keuangan masih tertinggal di level 66,46% (Grafik B4.1.1). Walaupun indikator tersebut menggambarkan kondisi nasional dan tidak secara khusus mengukur UMKM, namun kesenjangan tersebut menunjukkan kebutuhan penguatan pemahaman keuangan. Dalam konteks UMKM, kondisi ini memperkuat pentingnya

penguatan literasi, kemampuan pengelolaan arus kas, tata kelola keuangan, dan pemahaman terhadap produk pembiayaan sebagai bagian dari peningkatan kesiapan pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan formal.

Penguatan literasi dan kapasitas usaha diarahkan untuk meningkatkan kelayakan pembiayaan UMKM. Dalam kaitan ini, Bank Indonesia bersama Pemerintah meluncurkan program Aksi Kuatkan Literasi dan Inklusi Keuangan untuk Kesejahteraan (AKSI KLIK) untuk mendorong peningkatan literasi keuangan dan digital, termasuk tata kelola keuangan, keamanan digital, dan mitigasi risiko kejahatan finansial. Penguatan tersebut dilengkapi dengan gerakan AKU BISA SEJAHTERA yang mengintegrasikan pendampingan usaha dengan fasilitasi *business matching*. Pendampingan, antara lain mencakup penguatan tata kelola usaha, standardisasi produksi, dan penyusunan informasi keuangan, sehingga UMKM lebih siap memenuhi kebutuhan informasi dan asesmen lembaga keuangan.

Digitalisasi transaksi dan pencatatan keuangan UMKM membantu dalam meningkatkan kelayakan pembiayaan UMKM melalui pemberian akses informasi keuangan UMKM kepada perbankan. Hingga April 2026, QRIS



Grafik B4.1.1. Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Nasional

telah menjangkau lebih dari 45 juta *merchant* yang mayoritas merupakan UMKM. Rekam jejak transaksi digital tersebut berpotensi melengkapi informasi yang digunakan lembaga keuangan dalam pengembangan penilaian kelayakan berbasis transaksi dan arus kas (*alternative credit scoring*). Di sisi lain, SIAPIK mendukung pencatatan keuangan UMKM yang lebih terstruktur sehingga dapat membantu menyediakan informasi mengenai kondisi dan kinerja usaha. Pemanfaatan data tersebut berpotensi mengurangi kesenjangan informasi antara UMKM dan lembaga keuangan, walaupun penerapannya tetap memerlukan kualitas dan integrasi data, pengembangan metodologi, serta asesmen risiko yang memadai. Pendekatan dimaksud akan mengurangi asimetri informasi dan membuka peluang pembiayaan yang lebih inklusif bagi UMKM.

Penguatan kapasitas usaha, kualitas informasi, dan fasilitasi akses pembiayaan membentuk mekanisme yang saling melengkapi dalam mengurangi hambatan pembiayaan UMKM.

Literasi dan pendampingan meningkatkan kesiapan pelaku usaha, digitalisasi dan pencatatan keuangan memperbaiki ketersediaan informasi, sementara *business matching* membantu mempertemukan UMKM dengan mitra untuk meningkatkan profitabilitas sehingga semakin layak untuk dibiayai perbankan. Sinergi tersebut berpotensi memperluas basis pembiayaan UMKM dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian. Dengan demikian, inovasi pembiayaan inklusif tidak hanya bermanfaat untuk memperluas akses, tetapi juga agar meningkatkan kelayakan UMKM untuk dibiayai serta memperluas basis pertumbuhan ekonomi.

Boks 4.2

Sinergi Kebijakan untuk Memperkuat Kelayakan Pembiayaan PSEL

Pengembangan fasilitas PSEL merupakan salah satu upaya untuk mengatasi persoalan darurat sampah perkotaan sekaligus mendukung transisi menuju ekonomi berkelanjutan. PSEL telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Perpres Nomor 109 Tahun 2025 yang mengatur tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Model bisnis PSEL mengintegrasikan layanan pengelolaan sampah dengan penyediaan energi listrik melalui keterlibatan Pemerintah Daerah sebagai penyedia pasokan dan layanan pengumpulan sampah, badan usaha sebagai pengembang dan operator fasilitas, Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pembeli listrik, serta lembaga keuangan dan investor sebagai penyedia pembiayaan. Struktur tersebut menempatkan PSEL tidak hanya sebagai proyek pembangkit energi, tetapi juga sebagai infrastruktur pelayanan publik yang menghasilkan manfaat lingkungan dan sosial. Karakter tersebut menyebabkan kelayakan pembiayaan PSEL tidak hanya ditentukan oleh prospek pendapatan dari penjualan listrik, tetapi juga oleh kesiapan proyek, kesinambungan layanan pengelolaan sampah, dan pembagian risiko antarpihak.

Skala pengembangan PSEL membuka kebutuhan pembiayaan berkelanjutan yang cukup besar. Pada Mei 2026, Pemerintah menargetkan pembangunan PSEL di 33 lokasi yang akan melayani setidaknya 61 kabupaten/kota, dengan total kapasitas pengolahan mencapai sekitar 39.450 Ton per hari atau setara 14,4 juta Ton per tahun. Setiap proyek diperkirakan membutuhkan investasi sekitar Rp2–3 Triliun sehingga total kebutuhan investasi diperkirakan sebesar Rp66–90 triliun. Danantara melalui PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera) berperan dalam mengonsolidasikan pelaksanaan investasi (antara lain melalui kajian teknis, keekonomian,

dan alokasi risiko proyek), pengembangan, dan operasional proyek PSEL dengan tujuan memperkuat efisiensi pengelolaan, tata kelola, koordinasi dengan mitra, dan menarik partisipasi investor domestik maupun global. Dari sisi penerimaan proyek, mekanisme Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dengan PLN (USD 0,20/kWh dengan jangka waktu hingga 30 tahun) memberikan kepastian pembelian listrik dan meningkatkan visibilitas arus kas jangka panjang bagi investor dan kreditor PSEL.

Keberadaan PJBL menjadi fondasi utama penilaian kelayakan dan *bankability* proyek PSEL, yang selanjutnya perlu ditopang oleh mitigasi risiko dan kesiapan proyek secara menyeluruh. *Bankability* proyek masih dipengaruhi oleh sejumlah risiko, terutama risiko kepastian volume dan kualitas pasokan sampah, kesiapan Pemerintah Daerah dalam menyediakan layanan pengumpulan dan pengangkutan, kesiapan lahan, keandalan teknologi, risiko konstruksi dan operasional, serta kejelasan pembagian risiko antarpihak. Ketidakpastian pada faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi kontinuitas operasi dan arus kas proyek, sehingga menjadi bagian penting dalam asesmen lembaga keuangan. Dengan demikian, penguatan kelayakan pembiayaan PSEL membutuhkan mitigasi risiko secara menyeluruh pada sisi pendapatan maupun kesiapan dan keberlangsungan proyek.

Selain pendapatan dari perjanjian jual beli tenaga listrik dan jasa pengolahan sampah, proyek PSEL juga berpotensi menghasilkan kredit karbon dari pengurangan emisi metana. Sebagaimana dibahas pada subbab 4.2, tambahan sumber pendapatan dari penjualan kredit karbon dapat memperbaiki profil arus kas dan meningkatkan indikator kelayakan proyek seperti *Internal Rate of Return* dan *Debt Service*

Coverage Ratio (DSCR). Namun, realisasi potensi tersebut bergantung pada kesiapan proyek yang memenuhi standar verifikasi internasional, harga karbon yang memadai, serta likuiditas pasar yang masih terbatas. Dengan demikian, pendapatan karbon dapat menjadi komponen pelengkap yang memperkuat *bankability* PSEL, bukan pengganti kepastian pendapatan dari perjanjian jual beli tenaga listrik dan *tipping fee* yang tetap menjadi fondasi kelayakan proyek.

Karakteristik PSEL yang padat modal dan memiliki profil risiko yang berbeda pada setiap tahap pengembangan membutuhkan struktur pembiayaan yang sesuai. Karakter proyek PSEL yang padat modal khususnya pada tahap awal proyek (*high upfront costs*) menuntut pendekatan *blended finance*. Oleh karena itu, diperlukan penguatan skema pembiayaan berbasis proyek yang mampu mengombinasikan berbagai sumber pendanaan. Penguatan pembiayaan PSEL memerlukan pendekatan yang menempatkan proyek sebagai infrastruktur pengelolaan sampah yang sekaligus menghasilkan energi

listrik dan bermanfaat bagi lingkungan, sehingga kelayakannya tidak hanya dinilai dari pendapatan listrik, tetapi juga dari manfaat lingkungan dan sosial yang dihasilkan.

Bank Indonesia turut mendukung penguatan pembiayaan PSEL melalui kebijakan yang bekerja pada sisi penawaran pembiayaan dan fasilitasi kesiapan proyek. Dari sisi penawaran, KLM memberikan insentif likuiditas kepada perbankan yang menyalurkan pembiayaan pada sektor berkelanjutan, termasuk kegiatan pengelolaan limbah dan daur ulang sampah yang dilakukan PSEL sebagaimana tercantum dalam Lampiran PADG No. 27 tahun 2025 tentang peraturan pelaksanaan KLM. Dari sisi kesiapan pembiayaan, PINISI melengkapi dukungan di sisi permintaan melalui pendalaman kebutuhan dan struktur pembiayaan PSEL bersama Danantara dan pemangku kepentingan terkait, termasuk kebutuhan penjaminan, mitigasi risiko, dan dukungan kelembagaan, serta fasilitasi pertemuan antara proyek yang semakin siap dengan sumber pendanaan yang sesuai.

Bab 5

BAURAN KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL TERUS DIPERKUAT UNTUK MENDORONG INTERMEDIASI DAN MENJAGA KETAHANAN

Di tengah kebijakan moneter yang *pro-stability*, Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan makroprudensial *pro-growth* untuk mendukung pertumbuhan dengan tetap menjaga ketahanan sistem keuangan. Penguatan diarahkan untuk memperluas ruang intermediasi sekaligus meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas dan pendanaan perbankan. Hal tersebut dilakukan melalui implementasi insentif KLM *Forward Looking*, peningkatan batasan RPLN, reformulasi RIM melalui penguatan cakupan dan penyempurnaan kriteria surat berharga yang diperhitungkan, dan optimalisasi PLM melalui perluasan jenis surat berharga berkualitas tinggi lainnya yang dapat diperhitungkan. Secara bersama-sama, penguatan instrumen tersebut memperluas pilihan pembiayaan dan pendanaan perbankan melalui kredit maupun instrumen berbasis pasar, sekaligus mendukung pendalaman pasar keuangan. Penguatan intermediasi tersebut juga diimbangi dengan penyempurnaan kerangka manajemen krisis terintegrasi untuk menjaga kesiapan dan ketahanan sistem keuangan.

Implementasi KLM *Forward Looking* pada semester I 2026 menunjukkan peningkatan pemanfaatan insentif melalui *lending channel* dan *interest rate channel*. Pemanfaatan insentif melalui *lending channel* mencapai Rp357,7 triliun, atau setara dengan 4,04% dari DPK, dengan penyaluran yang terus meningkat pada sektor Pertanian, Industri, dan Hilirisasi, serta sektor Konstruksi, Real Estate, dan Perumahan. Sementara itu, pemanfaatan

insentif melalui *interest rate channel* mencapai Rp62,9 triliun atau sebesar 0,71% terhadap DPK. Dukungan likuiditas KLM memberikan tambahan fleksibilitas bagi perbankan dalam mengelola likuiditas dan pendanaan, sementara peningkatan pemanfaatan *interest rate channel* mengindikasikan semakin positifnya respons perbankan terhadap desain insentif dalam penetapan suku bunga kredit/pembiayaan.

Implementasi kebijakan makroprudensial turut diperkuat melalui sinergi erat dengan Pemerintah, Kementerian/Lembaga, industri, dan mitra di level regional maupun internasional. Pada sisi intermediasi, program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) melengkapi dukungan kebijakan makroprudensial dari sisi permintaan dengan membantu mengurangi friksi informasi, meningkatkan kesiapan pembiayaan, serta mempertemukan kebutuhan sektor riil dengan sumber pendanaan. Sinergi juga diarahkan untuk meningkatkan kesiapan pencegahan dan penanganan krisis melalui koordinasi KSSK, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan OJK, memperkuat akuntabilitas kelembagaan, serta meningkatkan ketahanan terhadap risiko siber, kejahatan keuangan digital, dan risiko lintas batas. Dengan demikian, sinergi lintas pemangku kepentingan menjadi elemen penting dalam memperkuat implementasi kebijakan, menjaga keberlanjutan intermediasi, serta meningkatkan kesiapan dan ketahanan sistem keuangan dalam menghadapi berbagai risiko.

5.1

Penguatan Kebijakan Makroprudensial untuk Mendukung Pertumbuhan dengan Tetap Menjaga Ketahanan Sistem Keuangan

Bauran kebijakan Bank Indonesia terus diperkuat secara terintegrasi untuk menjaga stabilitas dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan moneter yang *pro-stability* tetap diarahkan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah di tengah ketidakpastian global serta menjaga inflasi dalam sasaran, melalui optimalisasi intervensi di pasar valuta asing, pengelolaan struktur suku bunga pasar yang sejalan dengan BI-Rate dan instrumen operasi moneter *pro-market*, serta menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Penguatan tersebut dilengkapi dengan kebijakan transaksi pasar valas, termasuk penurunan batas transaksi tunai pembelian valas terhadap Rupiah tanpa *underlying* menjadi USD10.000 per pelaku per bulan, serta perluasan kebijakan insentif untuk meningkatkan aliran masuk investasi portofolio asing dan memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah. Sejalan dengan itu, pendalaman pasar uang dan pasar valas terus diperkuat melalui perluasan instrumen dan insentif transaksi, termasuk peningkatan penggunaan *Local Currency Transaction* (LCT) untuk mendukung diversifikasi transaksi valas serta perdagangan dan investasi dengan negara mitra. Seluruh bauran kebijakan tersebut saling melengkapi dalam menjaga stabilitas makrofinansial dan kondisi pasar keuangan, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kebijakan makroprudensial yang *pro-growth* untuk mendukung intermediasi dengan tetap menjaga SSK.

Dalam kerangka bauran kebijakan tersebut, kebijakan makroprudensial dipertahankan *pro-growth* untuk mendukung intermediasi dan pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga ketahanan sistem keuangan. Arah kebijakan tersebut ditempuh melalui penguatan insentif intermediasi, peningkatan fleksibilitas pengelolaan likuiditas dan pendanaan perbankan, serta optimalisasi berbagai instrumen makroprudensial untuk menjaga risiko sistemik tetap terkendali. Bauran kebijakan makroprudensial terus disempurnakan agar semakin responsif terhadap dinamika perekonomian, serta mampu mendukung pembiayaan perekonomian secara berkelanjutan.

KLM sebagai salah satu instrumen utama kebijakan makroprudensial *pro-growth* terus diperkuat melalui pendekatan berbasis kinerja dan berorientasi ke depan (KLM *Forward Looking*) yang berlaku sejak 1 Desember 2025. Insentif diberikan kepada bank yang

berkomitmen menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada sektor prioritas, termasuk sektor prioritas Pemerintah (*lending channel*), serta menetapkan suku bunga kredit/pembiayaan yang sejalan dengan arah suku bunga kebijakan Bank Indonesia (*interest rate channel*). Besaran insentif KLM paling tinggi sebesar 5,5% dari DPK, yang terdiri atas insentif *lending channel* paling tinggi sebesar 4,5% dari DPK dan insentif *interest rate channel* paling tinggi sebesar 1,0% dari DPK²³. Hingga Juni 2026, total insentif KLM mencapai Rp420,7 triliun atau sebesar 4,76% dari DPK, meningkat dibandingkan posisi Desember 2025 sebesar Rp388,0 triliun.

KLM *Forward Looking* terus dioptimalkan untuk meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas dan memperluas dukungan terhadap intermediasi perbankan, baik melalui pembiayaan (*financing*) nonkredit maupun pendanaan (*funding*) non-DPK. Per 1 Agustus 2026, telah dilakukan penyesuaian KLM *lending channel* menjadi KLM *financing channel*, dengan memperhitungkan kepemilikan bank atas surat berharga/surat berharga syariah korporasi yang ditetapkan Bank Indonesia sebagai bagian dari pencapaian penyaluran kredit/pembiayaan kepada sektor UMKM, koperasi, inklusi, berkelanjutan dan lainnya. Dalam skema tersebut, tambahan insentif atas kepemilikan surat berharga korporasi diberikan paling tinggi sebesar 1,0% dari DPK, sementara keseluruhan insentif *financing channel* dan *interest rate channel* masing-masing tetap paling tinggi sebesar 4,5% dan 1,0% dari DPK. Selain itu, penguatan juga dilakukan dengan penambahan *channel* insentif baru yakni KLM *financing to funding channel* atau insentif kepada bank yang memenuhi nilai RIM sesuai dengan rentang yang ditetapkan oleh Bank Indonesia namun belum memanfaatkan insentif maksimum KLM sebesar 5,5%. Besaran tambahan insentif *financing to funding channel* ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% dari DPK.

Penguatan RIM dilakukan untuk mendukung peningkatan kapasitas intermediasi perbankan melalui pemanfaatan instrumen berbasis pasar dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Rentang RIM perbankan dipertahankan pada kisaran 84-94% dan per Juni 2026 mencapai

23 PADG Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial.

sebesar 86,04% atau lebih tinggi dibandingkan Desember 2025 sebesar 84,60%. Per 1 Juli 2026 dilakukan perluasan cakupan dan penyempurnaan kriteria surat berharga/surat berharga syariah korporasi yang dimiliki dan diterbitkan oleh bank dalam komponen perhitungan RIM²⁴. Perluasan tersebut mencakup surat berharga/surat berharga syariah korporasi yang dimiliki maupun diterbitkan oleh bank sesuai dengan kriteria yang ditetapkan Bank Indonesia, antara lain memiliki peringkat paling rendah setara *investment grade*, diterbitkan atau dimiliki oleh pihak yang memenuhi ketentuan, serta ditatausahakan pada lembaga yang berwenang memberikan layanan penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek. Penyempurnaan juga dilakukan melalui perluasan mekanisme penerbitan surat berharga, baik melalui penawaran umum (*public offering*) maupun penempatan terbatas (*private placement*).

Instrumen PLM terus dioptimalkan untuk menjaga ketahanan likuiditas sekaligus meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas perbankan. Rasio PLM untuk Bank Umum Konvensional (BUK) dipertahankan sebesar 4% dengan fleksibilitas repo SSB sebesar 4% dan rasio PLM Syariah sebesar 2,5% dengan fleksibilitas repo sebesar 2,5%. Bank Indonesia juga melakukan perluasan jenis surat berharga yang dapat diperhitungkan dalam pemenuhan PLM dan PLM Syariah²⁵, mencakup surat berharga berkualitas tinggi lainnya yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan lain yang dibentuk atau didirikan Pemerintah untuk mendukung program Pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat yang ditetapkan oleh Bank Indonesia²⁶, serta Bank

Indonesia *Floating Rate Note* (BI-FRN)²⁷ yang mengacu pada ketentuan surat berharga dalam operasi moneter²⁸.

Penyempurnaan RPLN diarahkan untuk meningkatkan fleksibilitas struktur pendanaan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia memperkuat ketentuan RPLN melalui peningkatan rasio RPLN dari maksimum 35% menjadi 40% dari modal bank yang berlaku efektif sejak 1 Juli 2026²⁹, melalui penyesuaian parameter kontrasiklikal. Efektif 13 Juli 2026, cakupan kewajiban yang dikecualikan dari perhitungan RPLN juga diperluas untuk transaksi tertentu yang menggunakan instrumen valuta asing Pemerintah (SBN valas Pemerintah) serta Utang luar Negeri (ULN) Bank jangka pendek yang dijamin atau memiliki agunan berupa SBN valas Pemerintah, sebagai instrumen repo, jaminan, atau agunan. Secara bersama-sama, penguatan KLM, reformulasi RIM, dan penyempurnaan RPLN memperluas fleksibilitas pembiayaan dan pendanaan perbankan melalui kredit maupun instrumen berbasis pasar. Mekanisme saling melengkapi ketiga instrumen tersebut dalam mendukung intermediasi dibahas lebih lanjut pada Boks 5.1.

Arah kebijakan pada berbagai instrumen makroprudensial lainnya tetap akomodatif untuk menjaga intermediasi perbankan dan sejalan dengan upaya menjaga stabilitas sistem keuangan. Rasio *Countercyclical Capital Buffer* (CCyB) dipertahankan 0% sehingga bank tidak diwajibkan membentuk tambahan penyangga (*buffer*) modal. Kebijakan LTV/FTV tetap akomodatif dengan rasio paling tinggi sebesar 100% untuk kredit/pembiayaan properti, termasuk properti berwawasan lingkungan, yaitu untuk properti rumah tapak, rumah susun, serta ruko/rukan. Demikian pula ketentuan uang muka untuk KKB/PKB, termasuk kendaraan bermotor

24 PADG Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

25 PADG Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rasio Intermediasi Makroprudensial dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

26 Yang dimaksud lembaga jasa keuangan lain yang dibentuk atau didirikan Pemerintah untuk mendukung program Pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat adalah lembaga keuangan khusus yang mendukung pembiayaan sektor prioritas, antara lain infrastruktur, pertanian, dan/atau perumahan. Salah satunya adalah PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) yang didirikan Pemerintah sebagai lembaga pembiayaan perumahan sekunder, yang merupakan penyedia likuiditas (*liquidity provider*) bagi lembaga penyalur pembiayaan perumahan untuk menjawab tantangan *maturity mismatch* di sektor perumahan sekunder. Dengan demikian, setiap masyarakat Indonesia dapat mengakses pembiayaan

perumahan yang terjangkau dan memiliki hunian yang layak.

27 BI-FRN merupakan instrumen operasi moneter yang *pro-market* dengan kupon mengambang yang bertujuan untuk mendorong pembentukan dan pengembangan *Overnight Index Swap* berbasis INDONIA, serta mendukung terbentuknya suku bunga acuan berbasis transaksi yang *robust* dan kredibel.

28 PADG Nomor 18 tahun 2025 tentang Kriteria, Persyaratan, dan Penggunaan Surat Berharga dalam Operasi Moneter.

29 PADG Nomor 19 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank.

berwawasan lingkungan, tetap dipertahankan paling sedikit 0%. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung sektor properti dan otomotif sebagai sektor yang memiliki *backward linkage* dan *forward linkages* yang kuat serta memberikan daya ungkit tinggi terhadap perekonomian, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko perbankan. Pelonggaran instrumen-instrumen tersebut merupakan bagian dari bauran kebijakan BI untuk membantu menjaga ruang intermediasi perbankan di tengah kebijakan moneter yang diarahkan *pro-stability*. Sementara itu, kebijakan pengelolaan risiko pasar dan nilai tukar tetap diarahkan untuk menjaga ketahanan perbankan terhadap risiko eksternal dengan mempertahankan rasio PDN sebesar 20% dari modal.

Kebijakan RPIM melengkapi arah kebijakan makroprudensial yang *pro-growth* dengan mendorong penyaluran pembiayaan kepada segmen inklusif secara seimbang dan berkualitas. Pemenuhan RPIM dapat dilakukan melalui berbagai model pembiayaan inklusif, baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai karakteristik dan model bisnis masing-masing bank. Di tengah pertumbuhan kredit UMKM yang masih terbatas, dukungan kebijakan melalui RPIM juga dilengkapi dengan pengembangan kapasitas dan peningkatan kesiapan pelaku usaha untuk memperoleh pembiayaan. Salah satunya melalui Program Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu yang mengintegrasikan penguatan kapasitas usaha, kesiapan pembiayaan, dan fasilitasi akses pembiayaan, sebagaimana dibahas lebih lanjut pada subbab 5.3.

Selain memperkuat intermediasi, Bank Indonesia terus memperkuat kerangka ketahanan sistem keuangan melalui penyempurnaan Protokol Manajemen Krisis Terintegrasi (PMKT). Implementasi PMKT menjadi semakin penting di tengah penguatan mandat Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), serta meningkatnya kompleksitas dan keterkaitan risiko dalam sistem keuangan. Sumber risiko tidak hanya berasal dari dinamika ekonomi dan pasar keuangan, tetapi juga dari disrupsi teknologi dan siber, bencana alam, risiko kesehatan, persepsi publik, tata kelola, kondisi keuangan, dan operasional institusi. Interkoneksi antarpelaku sistem keuangan dan percepatan propagasi informasi melalui kanal digital meningkatkan peluang terjadinya krisis multidimensi dengan transmisi lebih cepat dan dampak lebih luas. Oleh karena itu, kerangka manajemen krisis disempurnakan agar mampu mengakomodasi risiko kebijakan dan kelembagaan yang dapat memengaruhi pelaksanaan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran.

PMKT mulai berlaku pada 1 Juli 2026 sebagai tindak lanjut penguatan kerangka yang dilakukan selama semester I 2026. PMK Kebijakan mencakup subprotokol moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran, sedangkan PMK Kelembagaan mencakup aspek tata kelola, keuangan, dan operasional. PMKT dirancang untuk memastikan keselarasan proses surveilans dan asesmen, penetapan status, respons kebijakan, serta pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan potensi rambatan risiko dua arah antara tekanan kebijakan dan gangguan kelembagaan. Penguatan PMKT difokuskan pada penyempurnaan indikator dan asesmen, yang mencakup dimensi risiko, kerentanan, dan *contagion*, penguatan aspek kebijakan sesuai status tekanan protokol manajemen krisis Bank Indonesia, serta integrasi antara protokol manajemen krisis Kebijakan dan protokol manajemen krisis Kelembagaan, termasuk mekanisme koordinasi dan pengambilan keputusan. Penerapan PMKT Bank Indonesia juga diselaraskan dengan protokol manajemen krisis nasional.

5.2 | Asesmen Implementasi dan Transmisi KLM *Forward Looking*

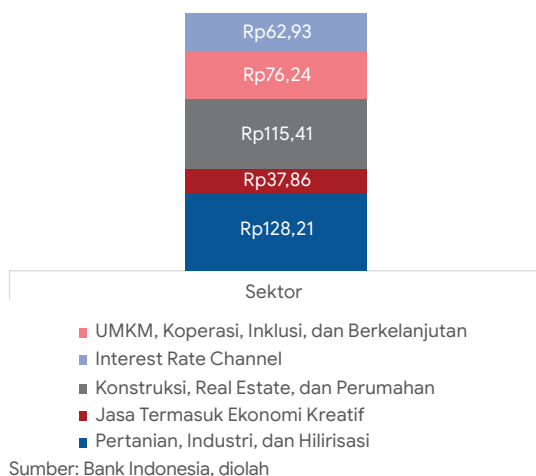
Implementasi KLM *Forward Looking* pada semester I 2026 menunjukkan peningkatan pemanfaatan insentif melalui *lending channel* dan *interest rate channel*. KLM *Forward Looking* yang berlaku efektif sejak 1 Desember 2025 diimplementasikan melalui dua saluran (*channel*), yaitu

lending channel untuk mendorong penyaluran kredit pada sektor prioritas dan *interest rate channel* untuk memperkuat transmisi suku bunga kebijakan. Hingga akhir Juni 2026, insentif KLM yang diperoleh bank tercatat sebesar Rp420,7 triliun, terdiri atas Rp357,7 triliun atau 4,04% dari DPK melalui *lending channel*.

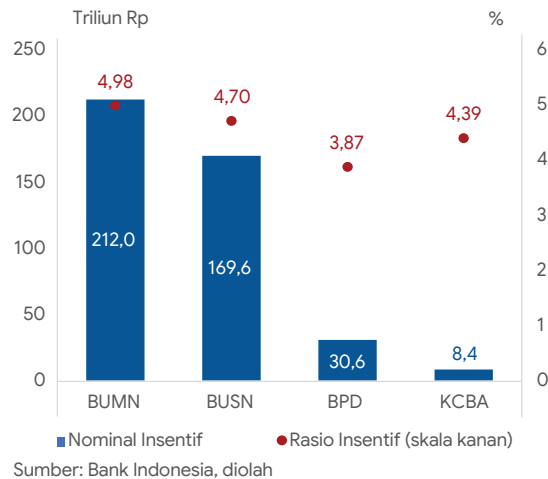
Sementara pada saat yang sama, insentif KLM melalui *interest rate channel* mencapai Rp62,93 triliun atau 0,71% dari DPK, meningkat dari Rp33,14 triliun atau 0,38% dari DPK pada Desember 2025 (Grafik 5.2.1). Perkembangan tersebut mengindikasikan semakin membaiknya pemanfaatan insentif KLM melalui kedua saluran kebijakan. Berdasarkan kelompok bank, insentif KLM diperoleh masing-masing bank BUMN sebesar Rp212,0 triliun, BUSN sebesar Rp169,6 triliun, BPD sebesar Rp30,6 triliun, dan KCBA sebesar Rp8,4 triliun (Grafik 5.2.2).

Pada *lending channel*, peningkatan pemanfaatan KLM berlangsung sejalan dengan penguatan pertumbuhan kredit pada sejumlah sektor yang menjadi cakupan kebijakan. Pasca penerapan KLM *Forward Looking* hingga Juni 2026, pertumbuhan kredit pada sektor Pertanian, Industri, dan Hilirisasi, serta sektor Konstruksi, Real Estate, dan Perumahan mencatatkan penguatan pertumbuhan kredit (Grafik 5.2.3). Mekanisme pemberian insentif *lending channel* yang berbasis komitmen ke depan (*forward-looking*) memberikan insentif bagi perbankan untuk mempertahankan komitmen penyaluran kredit pada sektor prioritas, meskipun perkembangannya tetap dipengaruhi oleh kondisi permintaan pembiayaan, persepsi risiko, dan kesiapan debitur maupun proyek.

Dukungan likuiditas KLM pada saat yang sama memberikan ruang bagi perbankan untuk mengelola likuiditas dan biaya pendanaan di tengah persaingan penghimpunan dana yang masih tinggi. Pada episode penurunan BI-rate, akhir April 2026, tambahan likuiditas yang bersumber dari KLM turut memberikan bantalan tekanan kenaikan biaya dana (*cost of funds/CoF*) di tengah persaingan penghimpunan dana yang masih tinggi, tecermin dari



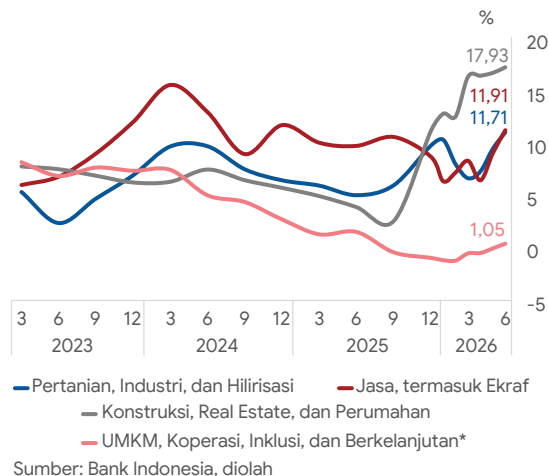
Grafik 5.2.1. Capaian Insentif KLM Sektoral



Grafik 5.2.2. Capaian Insentif KLM Berdasarkan Kelompok Bank

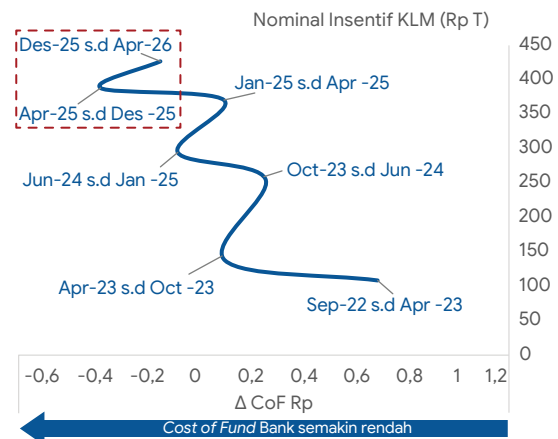
berlanjutnya tren penurunan biaya dana perbankan ke level yang lebih rendah dibandingkan periode prapandemi (Grafik 5.2.4). Sementara itu, sejak Mei 2026 biaya dana cenderung mengalami peningkatan.

Peningkatan pemanfaatan insentif melalui *interest rate channel* mengindikasikan semakin positifnya respons perbankan terhadap desain insentif yang dikaitkan dengan penetapan suku bunga kredit/pembiayaan. Sejalan dengan kenaikan BI-Rate sebesar 50 bps pada Mei 2026 dan 50 bps secara kumulatif pada Juni 2026, perbankan secara bertahap menyesuaikan suku bunga kredit. Suku bunga deposito tenor 1 (satu) bulan tercatat meningkat sebesar 51 bps, dari 4,25% pada Desember 2025 menjadi sebesar 4,76% pada Juni 2026. Namun, rata-rata suku bunga kredit perbankan masih menurun sebesar 39 bps, dari 9,20% menjadi 8,81% pada periode yang sama. Perbedaan respons tersebut



Grafik 5.2.3. Pertumbuhan Kredit Sektoral KLM Forward Looking

menunjukkan bahwa peningkatan biaya pendanaan belum sepenuhnya diteruskan kepada debitur melalui kenaikan suku bunga kredit. Bersamaan dengan meningkatnya elastisitas antara suku bunga kredit dan suku bunga kebijakan, perkembangan ini mengindikasikan bahwa *interest rate channel* KLM turut memperkuat respons penetapan suku bunga kredit sekaligus menjaga agar transmisi kenaikan biaya dana ke sektor riil berlangsung secara bertahap.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik 5.2.4. Pergerakan CoF dan Insentif KLM

5.3

Sinergi Memperkuat Implementasi Kebijakan dan Ketahanan Sistem Keuangan

Implementasi kebijakan Bank Indonesia terus diperkuat melalui sinergi yang erat antar Kementerian/Lembaga, otoritas, industri, dan mitra strategis di tingkat domestik maupun internasional. Stabilitas sistem keuangan merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan koordinasi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, terutama di tengah meningkatnya kompleksitas dan keterkaitan risiko. Sinergi diarahkan untuk memperkuat intermediasi, meningkatkan kesiapan pencegahan dan penanganan krisis, menyelaraskan respons kebijakan dan pengawasan, serta memperkuat ketahanan sistem keuangan terhadap berbagai risiko.

Pada aspek intermediasi, sinergi diperkuat melalui inisiatif program PINISI yang melengkapi dukungan kebijakan makroprudensial dari sisi permintaan (*demand side*). PINISI membantu mengurangi friksi intermediasi melalui penguatan informasi dan keyakinan pelaku ekonomi, penyelarasan program dan peningkatan kesiapan pembiayaan, serta fasilitasi *matching* antara kebutuhan sektor riil dan kapasitas pendanaan. Kerangka dan perkembangan implementasi PINISI dibahas lebih lanjut pada Boks 5.2.

Sinergi pada sisi permintaan juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kesiapan pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan. Salah satunya dilakukan melalui Program Transformasi

Kewirausahaan UMKM Terpadu yang memadukan penguatan kapasitas usaha, peningkatan *bankability*, serta perluasan akses pembiayaan bagi UMKM dan pelaku usaha syariah. Program tersebut dilaksanakan melalui sinergi dengan 46 Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, lembaga keuangan, asosiasi usaha, *offtaker*, serta berbagai mitra strategis lainnya. Pada 2026, implementasi program dilakukan melalui berbagai inisiatif, antara lain *Championship* Pejuang Kopi Nusantara (Cangkir Barista), *Championship* Inovasi Wastra Nusantara (Citra Nusa), Air Berkah Indonesia, dan Tani Berkah.

Pada aspek ketahanan sistem keuangan, sinergi antaranggota KSSK terus diperkuat untuk meningkatkan kesiapan pencegahan dan penanganan krisis. Pada Juni 2026, telah dilaksanakan Simulasi Tematik Nasional (Simtik) 2026 dalam penanganan permasalahan perbankan dengan metode resolusi Bank Perantara (*Bridge Bank*). Simulasi ini menguji penerapan UU P2SK dan peraturan lembaga anggota KSSK, mengevaluasi kesesuaian proses internal lembaga pada tahap persiapan, pelaksanaan resolusi, dan pasca resolusi bank dengan metode Bank Perantara, serta menguji kesiapan lembaga anggota KSSK dan mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan metode resolusi Bank Perantara. Kegiatan ini juga memperkuat pemahaman dan tanggung jawab masing-masing otoritas, termasuk Bank Indonesia, dalam mendukung

pelaksanaan resolusi perbankan. Hasil Simtik 2026 mengidentifikasi aspek yang perlu diperkuat dalam koordinasi dan protokol resolusi, yang akan ditindaklanjuti dalam penyempurnaan ketentuan serta mekanisme operasional terkait.

Koordinasi Bank Indonesia dan LPS terus diperkuat, khususnya dalam mendukung kesiapan resolusi perbankan. Penguatan sinergi tersebut diwujudkan melalui peningkatan pertukaran informasi, integrasi pelaporan penanganan bank, serta penyelarasan mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan resolusi perbankan. Kerja sama juga diperluas melalui berbagai kegiatan peningkatan kapasitas dan *knowledge sharing*, antara lain terkait *universal banking*, pelaksanaan *benchmarking* Bank Indonesia dan LPS, meliputi perencanaan dan implementasi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*), pelaksanaan *stress test*, standar biaya pada lembaga negara, serta pembahasan berbagai isu kelembagaan lainnya. Bank Indonesia dan LPS juga melakukan revisit Nota Kesepahaman (NK BI–LPS) agar tetap selaras dengan kebutuhan kedua lembaga, khususnya dalam penanganan bank dalam resolusi.

Sinergi Bank Indonesia dan OJK terus diperkuat melalui harmonisasi ketentuan makroprudensial dan mikroprudensial, meningkatkan efektivitas koordinasi pengawasan, serta mendukung pengembangan sektor keuangan. Harmonisasi dilakukan melalui pemberian masukan terhadap ketentuan makroprudensial dan mikroprudensial yang diterbitkan kedua lembaga sepanjang Semester I-2026³⁰ disertai penguatan koordinasi dalam perizinan terintegrasi (termasuk proses *spin-off* syariah), penanganan risiko sistemik termasuk risiko siber, evaluasi dan penetapan target RPIM, penyusunan rencana pemeriksaan bank, dan pelaksanaan *joint stress test*. Koordinasi juga diperluas untuk mendukung pengembangan keuangan berkelanjutan

serta akselerasi transformasi ekonomi dan keuangan digital. Di bidang keuangan berkelanjutan, koordinasi difokuskan pada harmonisasi kebijakan, pembahasan regulasi lintas otoritas, serta pengembangan data dan alat ukur keuangan hijau, termasuk pembahasan kalkulator emisi perbankan. Pada ekonomi dan keuangan digital penguatan sinergi dilakukan melalui pengembangan Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI), persiapan Forum Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI), dan dalam tahap pengkajian bersama penguatan *joint sandbox* melalui KKD BI–OJK.

Sinergi dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terus diperkuat sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi akuntabilitas dan penguatan kelembagaan Bank Indonesia. Komunikasi tersebut juga menjadi wadah pembahasan berbagai penguatan kerangka hukum sektor keuangan, termasuk perluasan tujuan Bank Indonesia yang tidak hanya mencakup stabilitas nilai tukar Rupiah, tetapi juga pemeliharaan stabilitas sistem pembayaran dan turut menjaga SSK dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, perubahan UU P2SK di tahun 2026 juga memperkuat pelaksanaan bauran kebijakan Bank Indonesia untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja, memperluas fungsi edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif. Bank Indonesia secara berkala juga menyampaikan perkembangan perekonomian terkini, stabilitas sistem keuangan, serta arah dan bauran kebijakan kepada Komisi XI DPR RI sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan akuntabilitas. Komunikasi tersebut juga mencakup pembahasan implementasi berbagai penguatan kewenangan Bank Indonesia serta penguatan koordinasi kebijakan dengan Pemerintah, OJK, dan LPS dalam menjaga SSK dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sinergi dengan otoritas terkait yang tergabung dalam Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) dan penyelenggara jasa sistem pembayaran, terus diperkuat untuk memitigasi perkembangan risiko siber dan kejahatan keuangan digital yang berpotensi menimbulkan risiko lintas sektor. Perkembangan modus *fraud*, termasuk eksploitasi celah keamanan pada infrastruktur layanan sistem pembayaran dan pemindahan dana secara cepat ke ekosistem aset kripto, meningkatkan kebutuhan pertukaran informasi dan koordinasi penanganan secara berkelanjutan. Bank Indonesia memfasilitasi forum

30 Sepanjang semester I 2026, harmonisasi dilakukan terhadap berbagai ketentuan Bank Indonesia, antara lain Rancangan PBI tentang Pengaturan Industri Kegiatan Usaha Penunjang Valuta Asing Bukan Bank (RPBI Pengaturan Industri UPB BB), Rancangan PADG perubahan kedua RIM PLM, Rancangan PADG perubahan KLM, serta Rancangan PADG RPLN. Sementara itu, OJK juga melakukan penguatan regulasi melalui Rancangan POJK Rencana Bisnis Bank Umum, Rancangan PADK tata kelola dan manajemen risiko penyelenggaraan produk investasi perbankan syariah, Rancangan PADK Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia bagi BUS/ UUS, Rancangan POJK Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi BUS, serta Rancangan POJK *structured product* oleh bank umum. Harmonisasi tersebut diarahkan untuk memperkuat konsistensi pengaturan lintas otoritas dalam mendukung stabilitas sistem keuangan.

berbagi informasi mengenai perkembangan risiko teknologi informasi, siber, dan modus kejahatan terkini agar penyelenggara jasa sistem pembayaran dapat melakukan evaluasi dan memperkuat kesiapan serta ketahanan sistemnya. Upaya tersebut dilengkapi dengan kerja sama penelusuran aliran dana (*money trail*) bersama Indonesia *Anti-Scam Centre* untuk mempercepat identifikasi transaksi yang terindikasi terkait kejahatan.

Sinergi pada tingkat regional dan global terus diperkuat untuk mendukung pertukaran informasi, penerapan standar internasional, dan kesiapan menghadapi risiko lintas batas. Bank Indonesia berperan aktif dalam berbagai forum strategis, antara lain Financial Stability Board (FSB), Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), ASEAN Working Committee on the ASEAN Banking Integration Framework (WC-ABIF), serta Executives Meeting of East Asia-Pacific Central Banks (EMEAP), yang menjadi wadah untuk membahas

kerentanan sistem keuangan global, memperkuat praktik pengawasan, dan meningkatkan ketahanan terhadap perkembangan risiko. Di tingkat regional, peran Bank Indonesia sebagai *Co-Chair Task Force on Supervisory Arrangement* di bawah WC-ABIF mendukung harmonisasi praktik supervisi perbankan serta penguatan *safeguards* SSK sejalan dengan pendalaman integrasi perbankan ASEAN. Sementara itu, penyelesaian masa kepengurusan sebagai ketua dalam forum EMEAP *Working Group on Banking Supervision* periode 2024-2026 mencerminkan kontribusi Bank Indonesia dalam memperkuat koordinasi pengawasan di kawasan Asia Pasifik melalui agenda yang berfokus pada penguatan ketahanan sektor keuangan terhadap percepatan digitalisasi, perkembangan aset kripto, *digital fraud*, dan pemanfaatan AI oleh lembaga keuangan. Dalam forum internasional tersebut, Bank Indonesia turut mengangkat dampak eskalasi geopolitik di Timur Tengah dan fragmentasi rantai pasok global terhadap stabilitas sistem keuangan negara berkembang.

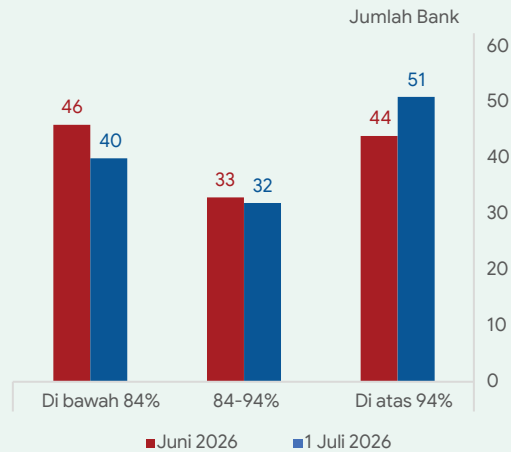
Boks 5.1

Peningkatan Fleksibilitas Pembiayaan dan Pendanaan untuk Mendorong Intermediasi Perbankan Melalui Penyempurnaan RIM, KLM, dan RPLN

Penguatan fleksibilitas pembiayaan dan pendanaan menjadi salah satu strategi Bank Indonesia untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan kredit di tengah meningkatkan kebutuhan pembiayaan perekonomian. Dalam kerangka tersebut, penyempurnaan RIM, KLM, dan RPLN bekerja saling melengkapi. Reformulasi RIM memperluas cakupan instrumen pembiayaan dan pendanaan berbasis pasar yang diperhitungkan dalam intermediasi sekaligus meningkatkan fleksibilitas pengelolaan likuiditas melalui penyesuaian kewajiban giro RIM, menyediakan insentif likuiditas yang mendukung fleksibilitas pengelolaan pendanaan melalui KLM, sedangkan penyempurnaan RPLN memperluas alternatif sumber pendanaan jangka pendek dari luar negeri. Secara bersama-sama, penguatan ketiga instrumen tersebut memperluas fleksibilitas perbankan dalam mengelola pembiayaan dan sumber pendanaan, sehingga mendukung kapasitas intermediasi dengan tetap

memperhatikan prinsip kehati-hatian, sekaligus memperluas pemanfaatan instrumen berbasis pasar sebagai pelengkap kredit dan DPK.

Reformulasi RIM meningkatkan fleksibilitas pengelolaan intermediasi dan likuiditas perbankan melalui perluasan cakupan instrumen yang dapat diperhitungkan sebagai komponen RIM dan implikasinya terhadap pemenuhan kewajiban giro RIM. Sejak berlaku efektif pada 1 Juli 2026, rasio RIM agregat perbankan meningkat menjadi 88,50%, dari sebelumnya sebesar 86,04% pada akhir Juni 2026. Perubahan kebijakan tersebut mendorong pergeseran sebaran rasio RIM perbankan ke level yang lebih tinggi (Grafik B5.1.1). Sejalan dengan pergeseran posisi RIM sejumlah bank ke atas batas bawah 84%, kewajiban pemenuhan giro RIM menurun dibandingkan posisi akhir Juni 2026, sehingga memberikan tambahan fleksibilitas bagi bank dalam mengelola likuiditasnya untuk mendukung aktivitas intermediasi lebih lanjut.



Sumber: Bank Indonesia, diolah

Grafik B5.1.1. Sebaran Rasio Sebelum dan Pascapenguatan RIM

Peningkatan batasan RPLN menjadi 40% terhadap modal memperluas alternatif sumber pendanaan jangka pendek bagi perbankan. Tambahan ruang tersebut meningkatkan fleksibilitas bank dalam mengelola struktur pendanaan (*funding mix*) dan memanfaatkan sumber dana luar negeri untuk mendukung kebutuhan likuiditas. Pada saat yang sama, penguatan kebijakan RPLN dapat membantu menekan biaya dana dan memperkuat kapasitas penyaluran kredit untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Pelonggaran RPLN tetap disertai dengan persyaratan prudensial dan pengelolaan risiko yang memadai agar risiko yang bersumber dari pendanaan luar negeri tetap terkendali. Bank yang memiliki kewajiban jangka pendek tetap harus memenuhi prinsip kehati-hatian, yaitu memenuhi rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), PDN, dan NPL sesuai dengan ketentuan. Realisasi awal dari pasca implementasi penguatan kebijakan RPLN menunjukkan peningkatan ULN jangka pendek Bank dari Rp160 triliun pada akhir Mei 2026 menjadi Rp163,4 triliun setelah kebijakan diberlakukan.

KLM melengkapi reformulasi RIM dan penyempurnaan RPLN melalui pemberian insentif likuiditas yang memperkuat fleksibilitas perbankan dalam mendukung intermediasi. Dalam kerangka tersebut, RIM memperluas ruang intermediasi melalui pemanfaatan instrumen kredit dan berbasis pasar, RPLN menambah alternatif sumber

pendanaan jangka pendek dari luar negeri, sementara KLM memberikan likuiditas tambahan yang meningkatkan fleksibilitas dalam mengelola kebutuhan likuiditas dan struktur pendanaan di tengah persaingan penghimpunan dana yang masih tinggi. Komplementaritas ketiga instrumen tersebut memperluas pilihan bank dalam mengelola sisi aset dan liabilitas sesuai karakteristik dan model bisnis masing-masing sehingga memberi ruang lebih besar bagi perbankan untuk mendorong intermediasi di tengah kebijakan moneter yang bersifat *pro-stability*.

Secara keseluruhan, penguatan instrumen makroprudensial turut mendukung agenda pendalaman pasar keuangan melalui perluasan di sisi pembiayaan maupun pendanaan. Di sisi pembiayaan (*financing*), reformulasi RIM memperluas cakupan surat berharga korporasi dan surat berharga syariah korporasi yang dapat diperhitungkan sebagai komponen RIM, sehingga membuka ruang yang lebih besar bagi pemanfaatan instrumen berbasis pasar sebagai pelengkap kredit perbankan. Perluasan tersebut mencakup berbagai EBUS, seperti Surat Berharga Komersial, Efek Beragun Aset, *Medium Term Notes*, *Negotiable Certificate of Deposit*, dan instrumen sejenis lainnya yang memenuhi kriteria. Di sisi pendanaan (*funding*), penguatan RIM juga memperluas ruang diversifikasi sumber pendanaan di luar DPK melalui surat berharga yang diterbitkan bank, sementara arah pengembangan KLM ke depan semakin memperkuat keterkaitan kebijakan makroprudensial dengan pemanfaatan instrumen berbasis pasar. Perluasan pada kedua sisi tersebut diharapkan mendorong diversifikasi pembiayaan dan pendanaan sekaligus mendukung penambahan basis investor dan likuiditas pasar keuangan. Dalam kerangka di atas, penguatan Surat Berharga Komersial sebagai bagian dari *Blueprint* Pendalaman Pasar Uang dan Pasar Valas 2030 berupa penyempurnaan kerangka regulasi, infrastruktur pasar, standardisasi dokumen penerbitan, serta perluasan basis investor, diharapkan memperkuat peran SBK sebagai alternatif pembiayaan jangka pendek bagi dunia usaha sekaligus memperluas pilihan instrumen investasi bagi perbankan dan pelaku pasar.

Boks 5.2

PINISI: Wadah untuk Sinergi dan Menumbuhkan Optimisme serta *Debottlenecking* Permasalahan Pembiayaan dalam Rangka Akselerasi Percepatan Intermediasi Indonesia

Di tengah kapasitas pembiayaan dan *lending appetite* perbankan yang tetap memadai serta kebutuhan pembiayaan sektor riil yang masih besar, kendala intermediasi menyebabkan potensi pembiayaan belum sepenuhnya optimal tersalurkan ke sektor riil. Friksi tersebut antara lain bersumber dari kesenjangan informasi mengenai prospek dan perkembangan proyek, perbedaan persepsi risiko, keyakinan pelaku usaha, kesiapan pelaku ekonomi, serta belum optimalnya keselarasan kebijakan dan program. Kondisi ini mencerminkan *market imperfections* yang menyebabkan kapasitas pendanaan belum sepenuhnya bertransformasi menjadi pembiayaan dan aktivitas ekonomi produktif. Oleh karena itu, penguatan intermediasi perlu menyentuh tidak hanya ketersediaan dana, tetapi juga berbagai faktor yang memengaruhi keputusan pembiayaan dan *appetite* pelaku ekonomi.

Dalam rangka mengatasi berbagai kendala intermediasi tersebut, Bank Indonesia menginisiasi program PINISI sebagai wadah sinergi untuk memperkuat informasi dan keyakinan pelaku ekonomi, meningkatkan kesiapan pembiayaan melalui penyelarasan program dan *debottlenecking*, serta mempertemukan kebutuhan sektor riil dengan sumber pembiayaan melalui fasilitasi dan *project matching*. PINISI melengkapi kebijakan makroprudensial yang memperkuat kapasitas penawaran pembiayaan dari sisi *supply*, dengan mendorong agar kapasitas tersebut semakin terhubung dengan kebutuhan sektor riil, dari sisi *demand*. Peran ini dilakukan secara kolaboratif dengan Kementerian, Lembaga, otoritas, dan industri melalui penguatan informasi dan keyakinan, peningkatan kesiapan pembiayaan, penyelesaian hambatan, serta fasilitasi pertemuan antara proyek dan sumber pendanaan. Dengan demikian, PINISI menjadi bagian dari upaya Bank Indonesia memperkuat transmisi kebijakan makroprudensial ke pembiayaan, khususnya pada sektor-sektor yang menjadi prioritas Pemerintah.

PINISI terdiri dari 3 (tiga) ruang lingkup utama yang merepresentasikan upaya untuk mendorong pertumbuhan intermediasi, mengurangi berbagai kendala intermediasi, dan meningkatkan kesiapan pelaku ekonomi dalam pembiayaan. Yang Pertama adalah mendorong pembiayaan pada sektor riil yang selaras dengan program Pemerintah dan mampu menggerakkan aktivitas ekonomi produktif lainnya. *Building confidence and bridging information*, diarahkan untuk mengurangi kesenjangan informasi dan membangun optimisme bagi pelaku ekonomi, antara lain melalui *policy dialogue*, dan komunikasi berkesinambungan mengenai prospek ekonomi dan peluang investasi. Yang Kedua, melakukan pemetaan kendala dan rekomendasi untuk mengurangi hambatan intermediasi. *Program Alignment and Debottlenecking* mendorong peningkatan akses dan inovasi skema pembiayaan yang selaras dengan kebutuhan, antara lain melalui fasilitasi penyelesaian kendala regulasi dan struktur pembiayaan. Selanjutnya, mendorong peningkatan kesiapan dan pengembangan kemampuan pelaku ekonomi untuk memperoleh pembiayaan. *Financing or Partnership Facilitation, and Project Matching* mempertemukan kebutuhan sektor riil dengan sumber pendanaan dan/atau mitra strategis, melalui *project exposure dan business meeting*. Ketiga ruang lingkup utama tersebut membentuk satu rangkaian untuk membangun keyakinan, mengurangi kendala, dan meningkatkan kesiapan melalui fasilitasi pembiayaan.

Efektivitas ketiga klaster tersebut diperkuat oleh empat prinsip pengelolaan, yaitu *Building Confidence, Aligning Program, Driving Measurement, dan Gaining Sustainability*. *Building Confidence* menempatkan optimisme dan persepsi positif sebagai fondasi kolaborasi antarlembaga. *Aligning Program* memastikan berbagai inisiatif dan kegiatan bergerak dalam tujuan dan prioritas yang selaras. *Driving*

Measurement memastikan bahwa setiap proses memiliki tindak lanjut dan hasil yang dapat dipantau dan dievaluasi. Selanjutnya, *Gaining Sustainability*, menjaga agar kolaborasi menghasilkan dampak yang *impactful*, skala nasional, dan berkesinambungan. Dengan kerangka ini, PINISI tidak berhenti sebagai forum komunikasi, namun merupakan instrumen sinergi yang berkontribusi nyata dalam mendorong ekonomi nasional.

Kick-off PINISI pada 27–28 April meletakkan fondasi awal implementasi sinergi antarlembaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan intermediasi. *Policy dialogue* Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan, BPI Danantara Indonesia, dan Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3MPPE), dilakukan untuk menguatkan informasi peran Pemerintah dan regulator dalam membangun optimisme kinerja ekonomi Indonesia kepada pelaku ekonomi termasuk investor Dalam dan Luar Negeri, dan memberikan gambaran mengenai peluang serta tantangan intermediasi untuk meningkatkan permintaan pembiayaan, termasuk proyek strategis nasional. Kegiatan dilengkapi dengan fasilitasi bisnis dana proyek serta skema pembiayaan melalui *project expose* dari perbankan, asosiasi, dan pelaku ekonomi.

Program PINISI selaras dengan kebutuhan pembiayaan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Terdapat ruang pembiayaan dari perbankan yang perlu dimobilisasi pada sektor ekonomi produktif termasuk proyek strategis nasional dengan sumber pendanaan non-APBN. Penyelarasan sektor ekonomi utama dan Proyek Strategis Nasional (PSN), serta perumusan inisiatif program kolaborasi menjadi bagian diskusi interaksi dengan Kementerian PPN/Bappenas, Satgas P3MPPE, dan Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional. Sementara itu, pemberdayaan sinergi PINISI dengan Satgas P3MPPE juga dilakukan melalui ruang interaksi pada kegiatan KKI X PINISI pada Agustus 2026, sebagai media konsultasi, diseminasi, dan fasilitasi pelaku usaha, antara lain terkait kanal *debottlenecking* dan KUR.

Pendalaman terhadap kebutuhan pembiayaan dilakukan pada sektor ekonomi produktif utamanya Proyek Strategis Nasional (PSN). Sinergi dengan Danantara diarahkan untuk meningkatkan kesiapan pembiayaan proyek strategis, termasuk peninjauan potensi pembiayaan untuk proyek *Waste-to-Energy* (WTE). Pendalaman tidak hanya mencakup kebutuhan dana, tetapi juga struktur pembiayaan, mitigasi risiko, dan dukungan kelembagaan yang diperlukan. Pendekatan tersebut penting untuk memastikan proyek yang secara ekonomi potensial dapat berkembang menjadi proyek yang layak dan siap memperoleh pembiayaan.



Gambar B5.2.1. Kick Off PINISI 2026

Kebutuhan untuk mendorong pembiayaan perlu diselaraskan dengan permintaan pelaku ekonomi. Untuk itu, Bank Indonesia melalui *Focus Group Discussion* (FGD), seminar nasional dan pertemuan bilateral, mempererat kolaborasi dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan asosiasi lainnya, untuk menyelaraskan upaya peningkatan intermediasi dengan kebutuhan, peluang, dan permintaan pelaku ekonomi. Sinergi tidak selalu berfokus pada korporasi dengan kebutuhan pembiayaan skala besar melainkan juga pada pelaku UMKM, diantaranya melalui kemitraan usaha serta skema pembiayaan berbasis ekosistem dan rantai pasok. Keterhubungan UMKM dengan korporasi diharapkan memperkuat akses pasar, kepastian arus usaha, dan rekam jejak transaksi, sehingga mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan *bankability* UMKM.

Pendekatan intermediasi juga dilakukan dengan mendorong alternatif pembiayaan melalui pendalaman pasar keuangan. Penguatan ekosistem obligasi korporasi dan sekuritisasi aset utamanya aset kredit, dapat menjadi sumber pembiayaan jangka panjang bagi sektor riil. Bersama OJK, Kementerian Keuangan, Sarana Multigriya Finansial, dan Perbankan, serta pemangku kepentingan terkait, *policy dialogue* diarahkan untuk mengidentifikasi kendala seperti likuiditas pasar sekunder, struktur dan biaya sekuritisasi, dan kedalaman basis investor. Penguatan jalur pembiayaan berbasis pasar ini penting untuk melengkapi kredit perbankan sekaligus memperluas pilihan pendanaan sesuai kebutuhan dan karakteristik sektor riil.

Jangkauan PINISI meliputi kolaborasi lintas Kementerian/Lembaga, otoritas, industri, dan pelaku usaha, baik di tingkat pusat maupun daerah. Di tingkat pusat, sinergi yang dilakukan mencakup dorongan kemitraan berkualitas antara korporasi dengan pelaku UMKM melalui Gerakan Korporasi Gandeng UMKM. PINISI menjadi bagian rangkaian kegiatan nasional seperti KKI dan Bulan Pembiayaan Syariah, yang turut menghadirkan Kementerian Perindustrian, perbankan, dan asosiasi terkait dalam kegiatan diskusi. Di tingkat daerah, kolaborasi dilakukan melalui kegiatan level regional berupa Pesona Tambun Bunga di Palangkaraya dan Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi Riau, melalui forum diskusi dan dilanjutkan dengan identifikasi proyek unggulan daerah yang *ready to offer* serta fasilitasi *business meeting* antara korporasi dan perbankan. Implementasi awal tersebut antara lain menghasilkan kesepakatan pembiayaan pada sektor prioritas daerah dan mengidentifikasi potensi pembiayaan ke depan.

Ke depan, PINISI akan diperkuat melalui perluasan jangkauan, pendalaman kolaborasi, serta kesinambungan tindak lanjut pada berbagai sektor dan daerah. Arah penguatan difokuskan agar setiap kebutuhan pembiayaan dapat semakin terhubung dengan sumber pendanaan, sementara hambatan yang menghalangi proses tersebut dapat diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara lebih sistematis. Dengan fungsi tersebut, PINISI diharapkan menjadi *platform* yang menjembatani *policy support* dengan *financing outcomes*, sekaligus melengkapi bauran kebijakan Bank Indonesia dalam memperkuat intermediasi sebagai kontribusi nyata mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan.

Bab 6

OUTLOOK KETAHANAN DAN INTERMEDIASI, SERTA ARAH KEBIJAKAN MAKROPRUDENSIAL

Ketahanan sistem keuangan Indonesia pada 2026 diperkirakan tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Perekonomian domestik diperkirakan tetap tumbuh dalam kisaran 4,9–5,7% dengan inflasi tetap terjaga dalam sasaran, ditopang oleh permintaan domestik, stimulus Pemerintah, dan implementasi program prioritas. Ketahanan perbankan diperkirakan tetap kuat dengan AL/DPK dan CAR masing-masing berada di atas 23% serta risiko kredit tetap terkendali. Ketahanan korporasi dan rumah tangga secara agregat juga diperkirakan tetap terjaga, meskipun tekanan beban bunga, moderasi profitabilitas, dan daya beli pada sebagian kelompok masih perlu dicermati.

Ruang pertumbuhan intermediasi pada 2026 tetap terbuka, meskipun realisasinya diperkirakan belum merata antarsektor. *Credit gap* yang masih negatif pada mayoritas sektor menjadi salah satu indikasi masih tersedianya ruang ekspansi kredit, sementara kondisi penyaluran kredit relatif lebih longgar pada kredit investasi dan sejumlah sektor. Dari sisi permintaan, prospek penjualan dan belanja modal korporasi yang tetap tumbuh positif membuka

peluang peningkatan kebutuhan pembiayaan sektor swasta, terutama pada sektor Industri. Namun, realisasinya tetap dipengaruhi oleh prospek usaha, persepsi risiko, kesiapan pembiayaan, serta kecenderungan sebagian korporasi untuk tetap berhati-hati dalam melakukan ekspansi.

Dengan ketahanan perbankan yang tetap kuat dan ruang intermediasi yang masih tersedia, kebijakan makroprudensial pada 2026 tetap diarahkan *pro-growth* dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk mendukung pertumbuhan kredit/pembiayaan pada kisaran 8–12%. Penguatan KLM dilanjutkan melalui peningkatan total insentif menjadi paling tinggi 6,0% dari DPK dan pengembangan KLM Pendalaman Pasar Uang, sementara RIM, RPLN, dan RPIM terus dioptimalkan serta PINISI melengkapi dukungan kebijakan dari sisi permintaan. Ke depan, kalibrasi parameter KLM dan perluasan modalitas RPIM diarahkan untuk memperkuat pembiayaan sektor prioritas dan inklusif. Arah tersebut juga ditopang oleh penguatan kerangka kelembagaan dan infrastruktur pasar keuangan pascaperubahan UU P2SK.

6.1

Ketahanan Perekonomian dan Sistem Keuangan Diprakirakan Tetap Terjaga

Prospek makroekonomi domestik pada 2026 diprakirakan tetap mendukung ketahanan sistem keuangan di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Konflik di Timur Tengah, tekanan inflasi global, dan arah kebijakan moneter global yang tetap ketat berpotensi menahan pertumbuhan ekonomi dunia serta menjaga volatilitas pasar keuangan pada level tinggi. Di tengah kondisi tersebut, perekonomian Indonesia diprakirakan tetap tumbuh dalam kisaran 4,9–5,7% dengan inflasi IHK terjaga dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$. Prospek pertumbuhan domestik terutama ditopang oleh permintaan domestik, stimulus Pemerintah, dan implementasi program prioritas, sementara stabilitas eksternal diprakirakan tetap terjaga dengan defisit transaksi berjalan pada kisaran 0,5–1,3% terhadap PDB. Kondisi makroekonomi domestik yang tetap terjaga tersebut menjadi penopang bagi ketahanan sektor keuangan dalam menghadapi risiko global.

Ketahanan perbankan diprakirakan tetap kuat ditopang oleh *buffer* likuiditas dan permodalan yang memadai serta risiko kredit yang tetap terkendali. Dari sisi likuiditas, AL/DPK diprakirakan masih berada di atas 23%, melampaui ambang batas 10% dan rata-rata historis, ditopang oleh pertumbuhan DPK yang tetap terjaga dan penguatan sumber pendanaan perbankan. Selain itu, rasio LCR dan NSFR juga diprakirakan masih berada di atas ketentuan minimum. Sejalan dengan itu, permodalan perbankan diprakirakan tetap kuat dengan rasio CAR diprakirakan tetap berada di atas 23%, yang memberikan ruang *loss absorptive capacity* memadai untuk menyerap potensi risiko kredit maupun tekanan makroekonomi. Secara komparatif, rasio CAR perbankan Indonesia diprakirakan tetap lebih tinggi dibandingkan negara *peers* di *emerging markets*. Risiko kredit perbankan diprakirakan tetap terkendali dengan NPL di bawah 5%, serta proyeksi LaR yang terus membaik sejalan dengan prospek pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat pada 2026. Meskipun demikian, peningkatan rasio CKPN terhadap LaR di atas rerata historis pada sektor Pertanian, Perdagangan, Pengangkutan, dan Jasa Sosial mencerminkan sikap kehati-hatian bank terhadap potensi kenaikan risiko kredit pada sektor-sektor dimaksud. Dengan demikian, ketahanan

perbankan secara agregat diprakirakan tetap kuat, meskipun heterogenitas risiko kredit antarsektor tetap perlu dicermati.

Ketahanan korporasi diprakirakan tetap terjaga, meskipun masih dibayangi tantangan akibat berlanjutnya ketidakpastian global dan risiko domestik. Peningkatan beban bunga menekan profitabilitas, sehingga kemampuan bayar korporasi yang tecermin dari ICR diperkirakan termoderasi. Dari sisi likuiditas, korporasi diprakirakan tetap menjaga *buffer* yang memadai, meski ruang penambahannya cenderung terbatas seiring kebutuhan pendanaan operasional dan investasi. *Debt at risk* diprakirakan meningkat moderat dibandingkan akhir tahun 2025, terutama pada korporasi nonekspor dengan ICR yang sedikit berada di bawah *threshold* ($ICR < 1$). Walaupun demikian, mayoritas korporasi masih berada pada zona aman berdasarkan indikator *Probability of Default* ditopang ketersediaan kas dan ketersediaan aset lancar yang memadai untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa ketahanan korporasi secara umum masih terjaga, meskipun tekanan terhadap kemampuan membayar pada kelompok tertentu tetap perlu dicermati.

Ketahanan rumah tangga pada 2026 secara agregat diprakirakan tetap terjaga. Pertumbuhan pendapatan yang belum solid dan tingginya beban cicilan berpotensi meningkatkan tekanan terhadap kemampuan membayar sebagian rumah tangga. Namun, risiko kredit konsumsi diprakirakan tetap terjaga dengan NPL di bawah 5% pada akhir 2026. Ketahanan tersebut ditopang oleh penguatan *selective lending* perbankan kepada debitur berisiko rendah, serta berbagai kebijakan Pemerintah yang menopang daya beli, antara lain perluasan KPR subsidi, penguatan pasar tenaga kerja, dan subsidi energi. Optimisme konsumen juga masih terjaga sebagaimana tecermin dari Indeks Keyakinan Konsumen pada triwulan II 2026 yang berada pada level optimis. Dengan demikian, ketahanan rumah tangga secara agregat diprakirakan tetap terjaga, meskipun tekanan pada kemampuan membayar kelompok rumah tangga tertentu masih perlu dimonitor.

6.2

Prospek Intermediasi Tetap Positif di Tengah Dinamika Permintaan Sektoral

Ketahanan perbankan yang tetap kuat memberikan ruang dari sisi kapasitas bagi pertumbuhan intermediasi pada 2026, meskipun realisasinya diperkirakan belum merata antarsektor. Pada periode sebelumnya, pertumbuhan kredit, antara lain ditopang oleh entitas serta kegiatan terkait program Pemerintah, termasuk PKPN yang kemudian mendorong kebutuhan pembiayaan pada sektor-sektor terkait. Ke depan, *credit gap* yang masih negatif pada mayoritas sektor menjadi salah satu indikasi masih tersedianya ruang ekspansi kredit, sementara sektor Konstruksi menunjukkan ekspansi kredit yang relatif lebih tinggi. Namun, tersedianya ruang tersebut tidak serta-merta menunjukkan tambahan permintaan kredit, sehingga realisasinya tetap dipengaruhi oleh prospek usaha, kebutuhan investasi, persepsi risiko, dan kesiapan pembiayaan pada masing-masing sektor.

Dari sisi penawaran, kondisi penyaluran kredit diperkirakan akomodatif, meskipun tetap selektif antarsektor. ILR mengindikasikan kondisi penyaluran kredit yang relatif lebih longgar, terutama pada kredit investasi dan sektor-sektor yang memiliki keterkaitan erat dengan program Pemerintah seperti Konstruksi, Jasa Sosial, Industri Pengolahan, serta Listrik, Gas, dan Air. Namun demikian, *lending appetite* pada beberapa sektor, antara lain Pertanian, Pertambangan, Perdagangan, Pengangkutan, serta Kredit Konsumsi masih relatif berhati-hati sejalan dengan tantangan dan risiko sektoral, termasuk perkembangan harga komoditas dan perubahan kebijakan, serta tekanan daya beli masyarakat.

Dari sisi permintaan, prospek penjualan dan belanja modal korporasi yang tetap tumbuh positif membuka peluang meningkatnya kebutuhan pembiayaan sektor swasta, terutama pada sektor Industri. Prospek usaha yang tetap baik dan berlanjutnya investasi pada proyek hilirisasi dan kawasan industri berpotensi mendorong kebutuhan pembiayaan untuk ekspansi kapasitas. Peluang tersebut turut didukung oleh kemampuan membayar korporasi (ICR) yang secara umum masih terjaga, sehingga kebutuhan investasi pada korporasi dengan prospek usaha yang kuat memiliki peluang lebih besar untuk berkembang menjadi permintaan pembiayaan. Namun demikian, peluang pertumbuhan tersebut belum merata antarsektor. Pertumbuhan penjualan dan belanja modal berpotensi termoderasi pada sektor tertentu, khususnya pertambangan sejalan dengan penyesuaian RKAB pada komoditas batubara dan nikel serta selesainya pembangunan beberapa proyek besar hilirisasi. Selain itu, kecenderungan sebagian korporasi untuk tetap berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan mengoptimalkan pendanaan internal dapat membatasi tambahan permintaan pembiayaan eksternal. Kecenderungan sebagian korporasi untuk tetap berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan mengoptimalkan pendanaan internal juga dapat membatasi tambahan permintaan pembiayaan eksternal. Dengan demikian, ruang pertumbuhan intermediasi dari sisi korporasi tetap terbuka, terutama pada sektor dengan prospek usaha, kebutuhan investasi, dan kapasitas pembayaran yang memadai.

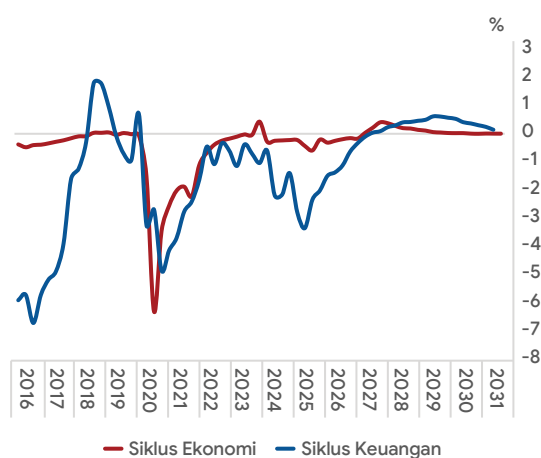
6.3 | Arah Kebijakan Makroprudensial

Ketahanan perbankan yang tetap kuat dan ruang pertumbuhan intermediasi yang masih tersedia menjadi landasan bagi kebijakan makroprudensial pada 2026 tetap diarahkan *pro-growth* dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Arah kebijakan tersebut mempertimbangkan siklus keuangan dan ekonomi yang diperkirakan masih berada di bawah kapasitas optimalnya (Grafik 6.3.1) serta *credit gap* yang masih negatif pada mayoritas sektor ekonomi. Dari sisi kapasitas, likuiditas dan permodalan perbankan yang kuat memberikan ruang bagi peningkatan intermediasi dengan tetap menjaga ketahanan serta risiko kredit. Namun demikian, permintaan kredit belum sepenuhnya merata sejalan dengan perbedaan prospek usaha, persepsi risiko, kebutuhan investasi, dan kesiapan pembiayaan antarsektor. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, kebijakan makroprudensial diarahkan untuk menjaga kapasitas pembiayaan sekaligus memperkuat transmisinya kepada sektor produktif dan sektor prioritas, termasuk sektor inklusif dan berkelanjutan, dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan.

Melanjutkan penguatan Kebijakan KLM pada 1 Agustus 2026, Bank Indonesia kembali melakukan penyempurnaan KLM untuk memperluas dukungan terhadap intermediasi sekaligus merespons segmentasi likuiditas serta mempercepat pendalaman pasar keuangan. Melalui penyempurnaan yang akan berlaku efektif

pada 1 September 2026, total besaran insentif KLM ditingkatkan dari sebelumnya paling tinggi 5,5% menjadi 6,0% dari DPK. Dalam skema tersebut, alokasi KLM untuk *financing channel* disesuaikan dari semula maksimum 4,5% menjadi paling tinggi 4,0% dari DPK dan dilengkapi KLM Pendalaman Pasar Uang paling tinggi sebesar 2,0% dari DPK bagi bank yang menjaga rasio kepemilikan surat-surat berharga pada tingkat optimal. KLM Pendalaman Pasar Uang akan menggantikan *interest rate channel* dan *financing to funding channel*, sehingga arah insentif semakin menghubungkan dukungan terhadap intermediasi dengan penguatan aktivitas pasar uang. Penguatan tersebut juga diperkuat oleh perluasan *underlying* transaksi repo melalui penambahan obligasi dan/atau sukuk korporasi PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Sarana Multi Finance (Persero) untuk memperluas pemanfaatan instrumen berbasis pasar dalam pengelolaan likuiditas yang mulai berlaku selambatnya pada akhir September 2026.

Untuk memperkuat transmisi kebijakan, berbagai instrumen makroprudensial terus dioptimalkan untuk mendukung pencapaian pertumbuhan pembiayaan/kredit pada kisaran 8–12%. Implementasi RIM dan RPLN diarahkan untuk memperluas fleksibilitas pembiayaan dan pendanaan perbankan, sementara penguatan RPIM memperluas modalitas pembiayaan inklusif. Implementasi KLM akan dievaluasi secara berkala sesuai dinamika kondisi makrofinansial dan arah suku bunga kebijakan Bank Indonesia. Pada sisi intermediasi, program PINISI melengkapi dukungan kebijakan makroprudensial dari sisi permintaan dengan membantu mengurangi friksi informasi, meningkatkan kesiapan pembiayaan, serta mempertemukan kebutuhan sektor riil dengan sumber pendanaan. Dengan demikian, arah kebijakan ke depan tidak hanya ditujukan untuk menjaga kapasitas pembiayaan, tetapi juga memperkuat transmisinya kepada sektor produktif dan prioritas yang memiliki prospek dan kesiapan pembiayaan yang memadai. Arah penguatan pembiayaan kepada sektor prioritas dan inklusif dibahas lebih lanjut pada Boks 6.1.



Grafik 6.3.1. Siklus Ekonomi dan Keuangan Indonesia

Boks 6.1

Arah Penguatan Kebijakan Makroprudensial untuk Pembiayaan Sektor Prioritas dan Inklusif

Penguatan kebijakan makroprudensial ke depan diarahkan melalui kalibrasi parameter insentif dan perluasan modalitas pembiayaan untuk memperkuat transmisi kepada sektor prioritas dan inklusif. Arah tersebut sejalan dengan masih tersedianya ruang pertumbuhan intermediasi, meskipun realisasinya belum merata antarsektor sebagaimana dibahas pada subbab 6.2. Dalam kerangka tersebut, KLM diarahkan melalui evaluasi parameter dukungan kepada sektor prioritas, sementara RPIM diperkuat melalui perluasan modalitas pembiayaan inklusif. Dengan demikian, penguatan kebijakan ke depan tidak hanya diarahkan untuk menjaga kapasitas pembiayaan, tetapi juga meningkatkan peluang kapasitas tersebut ditransmisikan kepada sektor dan pelaku usaha yang memiliki prospek dan kesiapan pembiayaan yang memadai.

Pada sektor prioritas, kalibrasi KLM ke depan diarahkan agar parameter insentif tetap responsif terhadap perkembangan kebutuhan pembiayaan dan prioritas perekonomian. Insentif KLM yang terkait dengan penyaluran kredit/pembiayaan kepada kelompok sektor Pertanian, Industri, dan Hilirisasi tercatat sebesar Rp128,1 triliun atau setara 1,45% dari DPK, mendekati batas maksimum insentif sebesar 1,5%. Posisi tersebut menjadi salah satu basis evaluasi terhadap kecukupan parameter KLM, termasuk cakupan sektor dan besaran dukungan insentif, agar tetap selaras dengan perkembangan kebutuhan pembiayaan sektor prioritas Pemerintah. Kalibrasi tersebut tidak serta-merta menjamin tambahan pembiayaan karena realisasinya tetap dipengaruhi oleh permintaan, persepsi risiko, serta kesiapan debitur dan proyek.

Pada segmen inklusif, penguatan RPIM diarahkan melalui perluasan modalitas pembiayaan agar bank memiliki pilihan yang lebih beragam dalam menjangkau pelaku usaha sesuai karakteristik dan model bisnis masing-masing. Pertama, cakupan pembiayaan diperluas kepada pemasok, distributor, dan/atau mitra badan usaha sehingga pembiayaan inklusif dapat menjangkau pelaku usaha melalui keterkaitannya dalam ekosistem dan rantai usaha. Kedua, mekanisme kerja sama penyaluran antarbank diperluas melalui skema *channeling* dan *executing*, sehingga bank dapat memanfaatkan perbedaan kapasitas, jaringan, dan model bisnis dalam menyalurkan pembiayaan inklusif. Ketiga, mekanisme transfer RPIM antarbank berbasis kontrak yang akan berlaku mulai Oktober 2026 memberikan fleksibilitas tambahan bagi bank dalam memenuhi RPIM sesuai strategi intermediasinya.

Secara bersama-sama, kalibrasi parameter KLM dan perluasan modalitas RPIM memperkuat dua jalur kebijakan yang saling melengkapi dalam mendorong intermediasi. Kalibrasi KLM menjaga agar dukungan insentif tetap terarah kepada sektor prioritas, sementara penguatan RPIM memperluas jalur bagi pembiayaan inklusif melalui pendekatan berbasis ekosistem dan kerja sama antarbank. Namun, efektivitas transmisi kedua kebijakan tersebut tetap bergantung pada adanya kebutuhan pembiayaan yang memadai, kualitas informasi, kelayakan usaha atau proyek, serta asesmen risiko yang *prudent*. Dengan demikian, arah penguatan kebijakan tidak berhenti pada perluasan kapasitas atau kanal pembiayaan, tetapi juga diarahkan agar ruang intermediasi lebih berpeluang terealisasi menjadi pembiayaan produktif dan berkualitas.

Boks 6.2

Penguatan Kerangka Kelembagaan dan Infrastruktur Pasar Keuangan Pascaperubahan UU P2SK

Pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 4 tahun 2026 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Perubahan UU P2SK) pada 17 Juni 2026 memperkuat kerangka kelembagaan dan infrastruktur sektor keuangan yang menjadi landasan bagi pelaksanaan kebijakan dan pengembangan pasar keuangan ke depan. UU dimaksud mencakup sejumlah penyempurnaan kelembagaan serta pengaturan sektor keuangan. Dalam konteks Bank Indonesia, perubahan tersebut relevan melalui penguatan landasan pelaksanaan bauran kebijakan serta sejumlah pengaturan yang terkait dengan transaksi dan infrastruktur pasar keuangan.

Penguatan tugas Bank Indonesia mempertegas landasan kelembagaan bagi pelaksanaan bauran kebijakan dalam mendukung perekonomian dengan tetap menempatkan stabilitas sebagai prasyarat. Perubahan UU P2SK memperkuat tugas Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan dan bauran kebijakan yang dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor riil dan penciptaan lapangan kerja. Substansi tersebut telah menjadi pijakan bagi arah bauran kebijakan yang dibahas pada Bab V, sehingga dalam perspektif ke depan penguatan tugas tersebut terutama memberikan landasan kelembagaan bagi kesinambungan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran, termasuk menegaskan urgensi kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran yang saat ini bersifat *pro-growth*.

Perubahan UU P2SK juga memperkuat kerangka hukum transaksi pasar keuangan melalui pengaturan mengenai penyerahan margin awal dan *transfer margin*. Salah satunya adalah perubahan UU mengenai pasar modal terkait *transfer margin* dalam transaksi di pasar

keuangan, khususnya pada transaksi derivatif dengan *underlying* pasar uang dan pasar valas. Ketentuan ini diharapkan memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah melalui pengembangan transaksi derivatif dengan *hedging*, sekaligus menjadi sumber pembiayaan ekonomi untuk mengurangi biaya transaksi derivatif.

Pada pasar modal, perubahan UU P2SK membuka ruang bagi perubahan struktur kepemilikan Bursa Efek melalui proses demutualisasi. Perubahan UU PPSK juga membuka ruang demutualisasi bursa efek yang memungkinkan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara Indonesia) untuk menjadi pemegang saham bursa efek. Penguatan tersebut diarahkan untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan kepercayaan investor, dan memperluas partisipasi pemangku kepentingan dalam pengembangan pasar modal. Kehadiran Otoritas dan Lembaga Negara sebagai pemangku kepentingan diharapkan meningkatkan kepercayaan investor, memperluas partisipasi, serta mendukung pendalaman pasar modal yang lebih likuid dan terpercaya.

Secara keseluruhan, perubahan UU P2SK memperluas landasan kelembagaan bagi pelaksanaan bauran kebijakan Bank Indonesia serta memperkuat kerangka hukum dan tata kelola infrastruktur pasar keuangan. Penguatan tugas Bank Indonesia memberikan basis kelembagaan bagi pelaksanaan kebijakan yang konsisten antara tujuan stabilitas dan dukungan terhadap perekonomian, sementara pengaturan *transfer margin* dan demutualisasi Bursa Efek berdampak pada peningkatan tata kelola, independensi, efisiensi, dan daya saing pasar modal, yang pada gilirannya memperkuat ketahanan infrastruktur sistem keuangan nasional.

KAJIAN STABILITAS KEUANGAN

NO.47, Agustus 2026

PENGARAH

Destry Damayanti – Solikin M. Juhro – Evie Sylviani – Dhaha Praviandi Kuantan – Alexander Lubis – Merywati

KOORDINATOR DAN EDITOR UMUM

Dadan Gandara – Risa Fadila – Maulana Harris Muhajir – Rizki Fitrama – Arnita Rishanty – Yenny Imelda Magdalena – Dea Woro Rinujit

TIM PENYUSUN

Galoeh Andita Widorini, Widyastanto Nugroho, Hanan Mutiasari, Ratna Oktriyan, Kartika Caroline, Anita, Christian Armantyo, Novianti Ekasari, Septy Adriningsih, Afrah Asfarina Ghassani, Retno Khoirunisa, Hendro Wicaksono, Mohammad Iqbal Pratama, Anita Permatasari, Makmur Tradesman Hasudungan Panjaitan, Muhammad Farhan Perdana, Alya Ridha Aisy, Satria Mulia Purnomo, Alhanuna Alifa, Nabilah Az-Zahro', Viyasa Rahyaputra, Rafdy Hifdhurrahman, Donny Damara, Nazhif Fa'iq Nur Rizqi, Farhan Widiardana, Revol Ulung Bisara Tamba, Aqila Salma Kamila, Suharno Leonard Sabam Manik, Agustion Suhada

KONTRIBUTOR

Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM)
Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP)
Departemen Surveilans Makroprudensial, Moneter dan Market (DSMM)
Departemen Ekonomi-Kuangan Inklusif dan Hijau (DEIH)
Departemen Surveilans Sistem Pembayaran dan Pelindungan Konsumen (DSPK)
Departemen Pengembangan Pasar Keuangan (DPPK)
Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS)
Departemen Regional (DR)

INFORMASI DAN ORDER

KSK ini terbit pada Agustus 2026, didasarkan pada data dan informasi per Juni 2026, kecuali dinyatakan lain

DOKUMEN KSK LENGKAP DALAM FORMAT PDF TERSEDIA PADA WEBSITE BANK INDONESIA

<http://www.bi.go.id>

Sumber data adalah dari Bank Indonesia, kecuali jika dinyatakan lain

PERMINTAAN, KOMENTAR, DAN SARAN HARAP DITUJUKAN KEPADA

Bank Indonesia

Departemen Kebijakan Makroprudensial

Jl. MH Thamrin No.2, Jakarta, Indonesia

Email : KomunikasiMakroprudensial@bi.go.id



BANK INDONESIA



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA